



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan landasan kebijakan operasional pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2020, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan berupa saldo anggaran lebih tahun anggaran berjalan, penggeseran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan rencana pendapatan dalam perubahan dan kebutuhan akan adanya tambahan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta ada perubahan lokasi, kelompok sasaran kegiatan, dan kegiatan lanjutan tahun 2020, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15);
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2020.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas menggunakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 AUG 2020
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASEK BANG	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA BAPPEDALITVING	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 memberikan arahan untuk perubahan RKPD sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

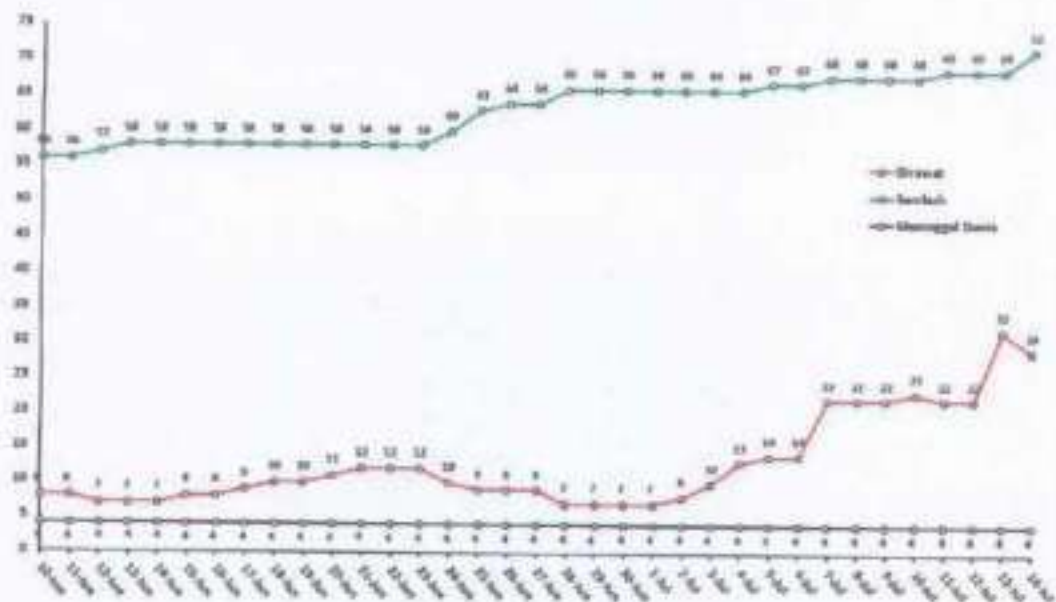
- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam kondisi terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pandemi Covid-19 merupakan keadaan darurat dan luar biasa yang memaksa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan perencanaan. Kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh Novel Coronavirus (Covid-19) yang pertama kali dilaporkan terjadi di Wuhan RRT pada tanggal 31 Desember 2019. Saat ini Covid-19 telah menjadi wabah hampir di seluruh negara di dunia.

Merujuk data yang dipublikasi *Worldometers*, hingga Rabu (15/7/2020) pagi, total kasus Covid-19 di seluruh dunia berjumlah 13,454,451 kasus. Dari 13,4 juta kasus infeksi tersebut, 7,846,427 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh, sementara 581,118 orang meninggal dunia. Di kawasan Asia Tenggara Indonesia merupakan negara dengan kasus Covid-19 terbanyak, dengan 78.527 kasus positif Covid-19, 37,636 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh, dan 3.710 orang meninggal dunia. Trend kasus Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan. Meskipun secara agregat wilayah provinsi dan kabupaten beberapa wilayah sudah mengalami penurunan kasus.

Untuk wilayah Kabupaten Banyumas kasus Covid-19 sampai dengan Selasa 14 Juli 2020 terdapat 105 positif, sembuh 72, dan meninggal dunia 4 orang. Jumlah kasusnya masih fluktuatif sebagaimana grafik berikut.



Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah Positif Covid-19 Kabupaten Banyumas
Per 14 Juli 2020, Pukul 14.48 WIB
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2020

Dari sisi kebijakan untuk penanganan Covid-19 Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 merupakan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilaksanakan untuk penanganan pandemi Covid-19 (Corona Vints Disease 2019) dan/atau dampak pandemi yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan yang signifikan sehingga diperlukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran

melalui *refocusing* dan realokasi anggaran dalam perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19, dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2020 adalah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Tujuan perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020;
2. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran termasuk prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020, terutama dalam rangka penanganan Covid-19;
3. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
5. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.4. Sistematika Perubahan RKPD

- Bab I Pendahuluan**
- Memuat/menjelaskan latar belakang perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2020, dasar hukum perubahan RKPD, maksud, tujuan, serta sistematika perubahan RKPD
- Bab II Evaluasi Triwulan II**
- Memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan yang mempengaruhi prioritas pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas dan perubahan target sasaran pembangunan Daerah.
- Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**
- Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah pasca triwulan II.
- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**
- Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan serta strategi pembangunan kabupaten banyumas dan prioritas pembangunan daerah tahun 2020 pasca triwulan II
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**
- Memuat program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan dan sasaran, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
- Bab VI Penutup**
- Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020.
- Lampiran** Memuat penjabaran perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2020 dan perubahan 2020 Kabupaten Banyumas.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

2.1. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Indikator kinerja daerah merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.

2.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 2.1.
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banyumas
Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.53	12.63	13.08	NA	NA	NA	DINDIK
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.7	7.40	7.55	NA	NA	NA	DINDIK
3	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.93	73.33	73.63	NA	NA	NA	DINKES
4	Indeks Gini		0.304	0.310	0.307	NA	NA	NA	BAPPE- DALIT- BANG
5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		0.3256	0.3456	0.3376	NA	NA	NA	BAPPE- DALIT- BANG
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		74.35	70.75	72.55	NA	NA	NA	BAPPE- DALIT- BANG
7	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	NA	NA	NA	BKAD
8	PDRB per kapita	juta rupiah	38.655	27.380	33.000	NA	NA	NA	BAPPE- DALIT- BANG
9	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	%	67	62	64	67.85	106.02		DINPER TAN KP
10	Persentase penduduk miskin	%	8.56	17.05	11.53	NA	NA	NA	BAPPE- DALIT- BANG
11	Persentase Penguatan cadangan pangan	%	86	70	80	NA	NA	NA	DINPER TAN KP
12	Persentase penurunan penduduk miskin	%	0.99	0.40	0.98	NA	NA	NA	BAPPE- DALIT- BANG

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
13.	Persentase Pertumbuhan PDRB	%	6.65	6.34	6.45	NA	NA	NA	BAPPE- DALIT- BANG
14	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5.86	5.78	5.82	NA	NA	NA	BAPPE- DALIT- BANG
15	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	%	4.52	4.44	4.48	NA	NA	NA	BAPPE- DALIT- BANG
16	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian kehutanan dan perikanan	%	4.03	3.17	3.58	NA	NA	NA	BAPPE- DALIT- BANG
17	Skor Pola Pangan Harapan	%	91.6	90.01	91.00	NA	NA	NA	DINPER- TAN KP
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67.71	65.19	66.49	65.19	98.04	⚡	DINA- KERKOP UKM
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3.76	4.62	4.23	NA	NA	NA	BAPPE- DALIT- BANG

Keterangan :

● : Telah Tercapai ▶ : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 19 target indikator hanya dua indikator yang telah tersedia datanya, yaitu indikator persentase penanganan daerah rawan pangan dengan status capaian telah tercapai, dan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja dengan status akan tercapai.

2.1.2. Aspek Daya Saing

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banyumas
Aspek Daya Saing

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Realisasi s.d. Triwulan II			
1	Angka Kriminalitas	Kasus	792	599	792	NA	NA	NA	BAKES- BANG
2	Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	80.01	NA	80.01	NA	NA	NA	BAPPE- DALIT- BANG
3	Nilai Tukar Petani (NTP)		101.33	100.08	101.33	NA	NA	NA	BAPPE- DALIT- BANG

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Realisasi s.d. Triwulan II			
4	Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	%	5	NA	5	NA	NA	NA	DINPO- RABUD PAR
5	Rasio Ketergantungan	%	49	49.8	49.0	NA	NA	NA	DINDUK CAPIL

Keterangan :

● : Telah Tercapai ▶ : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Capaian kinerja aspek daya saing, sampai dengan triwulan II tahun 2020 belum tersedia data.

2.2. Capaian Indikator Kinerja Program

2.2.1. Aspek Pelayanan Umum

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan bidang pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2020, ditunjukkan oleh capaian kinerja 62 target indikator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.
Capaian Kinerja Bidang Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Realisasi s.d. TW II			
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	%	99.99	100	100	99.99	99.99	▶	DINDIK
2	Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs / Paket B	%	99.9	99.99	100	99.9	99.9	▶	DINDIK
3	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ Paket A ke SMP/MTs/Paket B	%	0	104.39	100	0	0	▼	DINDIK
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs/ Paket B ke SMA/ SMK/MA/ Paket B	%	0	92.47	96.40	0	0	▼	DINDIK
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	0	99.71	99.85	0	0	▼	DINDIK
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs / Paket B (13-15 tahun)	%	0	95.26	95.29	0	0	▼	DINDIK
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	0	0.0004	0.00032	0	0	▼	DINDIK
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs / Paket B	%	0	0.0020	0.0025	0	0	▼	DINDIK
9	Angka rata-rata Nilai UASBN SD		65	65.00	72.00	65	90.28	▶	DINDIK

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Realisasi s.d. TW II			
10	Angka rata-rata Nilai UN SMP		53.58	52.78	59.00	53.58	90.81		DINDIK
11	APK PAUD/RA/ Sederajat	%	0	77.23	77.75	0	0		DINDIK
12	APK SD/MI/Paket A	%	0	108.82	103.00	0	0		DINDIK
13	APK SMP/MTs/ Paket B	%	0	86.79	93.00	0	0		DINDIK
14	APM SD/MI/Paket A	%	0	98.75	98.90	0	0		DINDIK
15	APM SMP/MTs/Paket B	%	0	81.41	81.60	0	0		DINDIK
16	Jumlah penerima beasiswa SD (akademis dan non akademis)	pelajar	0	NA	87547	0	0		DINDIK
17	Jumlah penerima beasiswa SMP	pelajar	0	NA	38855	0	0		DINDIK
18	Persentase kepala satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	100	NA	100	100	100		DINDIK
19	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	50	NA	100	50	50		DINDIK
20	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki sertifikat pendidik	%	100	NA	100	100	100		DINDIK
21	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang	%	100	NA	100	100	100		DINDIK
22	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	100	NA	100	100	100		DINDIK
23	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki sertifikat pendidik	%	90	NA	100	90	90		DINDIK
24	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	%	0	NA	100	0	0		DINDIK
25	Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	100	NA	100	100	100		DINDIK

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Realisasi s.d. TW II			
26	Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	%	0	NA	100	0	0	▼	DINDIK
27	Persentase pendidik PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi	%	20	51.77	100	20	20	▼	DINDIK
28	Persentase pendidik PAUD memiliki sertifikat profesi guru PAUD	%	75	20.96	100	75	75	●	DINDIK
29	Persentase pendidik SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	98	94.48	100	98	98	●	DINDIK
30	Persentase pendidik SD memiliki sertifikat pendidik	%	90	55.83	100	90	90	●	DINDIK
31	Persentase pendidik SMP memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	100	96.11	100	100	100	●	DINDIK
32	Persentase pendidik SMP memiliki sertifikat pendidik	%	90	63.78	100	90	90	●	DINDIK
33	Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi	%	9.09	10.41	9.09	9.09	100	●	DINDIK
34	Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/Dikmas Berprestasi	%	9.09	5.26	8.33	9.09	109.12	●	DINDIK
35	Persentase Peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi	%	5	10	13	5	38.46	▼	DINDIK
36	Persentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi	%	5	10	14	5	35.71	▼	DINDIK
37	Persentase Peningkatan Siswa SD Berprestasi	%	4	10	9	4	44.44	▼	DINDIK
38	Persentase peningkatan Siswa SMP Berprestasi	%	0	10.00	12.50	0	0	▼	DINDIK
39	Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki tenaga penunjang lainnya	%	80	NA	100	80	80	●	DINDIK
40	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	%	10	12.30	18.00	10	55.56	▼	DINDIK
41	Persentase satuan pendidikan SD memiliki tenaga penunjang lainnya	%	80	NA	100	80	80	●	DINDIK

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Realisasi s.d. TW II			
42	Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi	%	99	98.30	100	99	99		DINDIK
43	Persentase satuan pendidikan SMP memiliki tenaga penunjang lainnya	%	95	100	100	95	95		DINDIK
44	Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi	%	94	92.27	95.00	94	98.95		DINDIK
45	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	0	84.84	86.50	0	0		DINDIK
46	Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	0	87.61	89.00	0	0		DINDIK
47	Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alat mewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru tiap semester	%	10	NA	100	10	10		DINDIK
48	Persentase siswa PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap semester	%	100	NA	100	100	100		DINDIK
49	Persentase siswa pendidikan kesetaraan mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%	75	NA	100	75	75		DINDIK
50	Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun	%	80	NA	100	80	80		DINDIK
51	Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	%	0	NA	100	0	0		DINDIK
52	Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%	0	NA	100	0	0		DINDIK
53	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 satu paket buku teks pelajaran sesuai	%	100	NA	100	100	100		DINDIK

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Realisasi s.d. TW II			
	dengan kurikulum per tahun								
54	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%	100	NA	100	100	100	●	DINDIK
55	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	%	85	NA	100	85	85	▶	DINDIK
56	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	%	80	NA	100	80	80	▶	DINDIK
57	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	%	90	NA	100	90	90	▶	DINDIK
58	Persentase tutor pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	90	NA	100	90	90	▶	DINDIK
59	Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki sertifikat pendidik	%	100	NA	100	100	100	●	DINDIK
60	Rasio Guru terhadap murid PAUD		14.44	NA	18.0	14.44	80.22	▶	DINDIK
61	Rasio Guru terhadap murid SD		16.97	19.17	19.17	16.97	88.52	▶	DINDIK
62	Rasio Guru terhadap murid SMP		19.9	19.57	19.57	19.9	101.69	●	DINDIK

Keterangan :

● : Telah Tercapai ▶ : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian tersebut dari sebanyak 62 indikator diketahui bahwa 13 target indikator berstatus telah tercapai, 22 target indikator berstatus akan tercapai., 27 target indikator perlu perhatian/upaya keras.

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan ditunjukkan oleh capaian 99 indikator kinerja.

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Bidang Kesehatan

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO	%	75	70	75	0	0	▼	DINKES
2	Angka Kejadian Malaria (API : kasus per 1000 penduduk)		< 0.05	< 0.05	< 0.05	0	200	●	DINKES
3	Angka Kelangsungan Hidup bayi		992.1	991.57	991.98	0	0	▼	DINKES
4	Angka kematian balita		8.2	9.81	8.80	0	200	●	DINKES
5	Angka Kematian Bayi		7.9	8.43	8.01	0	200	●	DINKES
6	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup		66.5	54.16	67.50	60.6	110.22	●	DINKES
7	Angka Kematian Neonatal		4.5	5.84	5.25	0	200	●	DINKES
8	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.93	73.33	73.63	0	0	▼	DINKES
9	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	25	50	▼	DINKES
10	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	0	0	▼	DINKES
11	Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi	%	100	100	100	0	0	▼	DINKES
12	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	0	100	●	DINKES
13	Cakupan Desa Singa Aktif Mandiri	%	13	10.0	11.5	0	17.39	▼	DINKES
14	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	100	100	0	0	▼	DINKES
15	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	25	25	▼	DINKES
16	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	100	100	100	25	50	▼	DINKES
17	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	25	50	▼	DINKES
18	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	25	50	▼	DINKES

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
19	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	100	100	25	50	▼	DINKES
20	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	%	100	100	100	25	50	▼	DINKES
21	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit)	%	100	100	100	0	1	▼	DINKES
22	Cakupan pelayanan ibu hamil K1	%	100	100	100	25	50	▼	DINKES
23	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	0	0	▼	DINKES
24	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada pondok pesantren	%	100	NA	100	0	0	▼	DINKES
25	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	0	0	▼	DINKES
26	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	100	25	50	▼	DINKES
27	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	25	50	▼	DINKES
28	Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK	%	100	NA	100	0	0	▼	DINKES
29	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	0	0	▼	DINKES
30	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	%	100	100	100	0	0	▼	DINKES
31	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	NA	100	1	1	▼	DINKES
32	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	25	50	▼	DINKES
33	Cakupan Puskesmas	%	151	144	151	0	0	▼	DINKES
34	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	11.78	11.78	11.78	0	0	▼	DINKES
35	Case Fatality Rate DBD (%)	%	< 1	1.47	< 1	0	200	●	DINKES
36	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD Ajibarang		85	76.78	83.00	0	0	▼	DINKES

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPd 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
37	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD Banyumas		85	76.78	76.00	0	0		DINKES
38	Indeks kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Indeks	79	NA	77.5	0	0		DINKES
39	Non AFP rate per 100.000 penduduk		>= 2	>= 2	>= 2	0	200		DINKES
40	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	0	0		DINKES
41	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	NA	100	1	1		DINKES
42	Persentase balita gizi kurang mendapatkan PMT	%	100	100	100	50	108.65		DINKES
43	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	2	27		DINKES
44	Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	%	3	NA	4	7.55	11.25		DINKES
45	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	100	100	100	15	25		DINKES
46	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	65	26.05	56.00	0	0		DINKES
47	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	%	86.36	68.18	77.27	0	0		DINKES
48	Persentase Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	100	NA	75	30	42.67		DINKES
49	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa 10% untuk Bidang Kesehatan	%	30	5	15	0	20		DINKES
50	Persentase Fasyankes primer / sekunder yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	100	NA	100	0	0		DINKES
51	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	25	50		DINKES
52	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	2	27		DINKES
53	Persentase Jaminan Kesehatan Nasional	%	100	71.21	100	0	0		DINKES

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
54	Persentase kecamatan dengan Pokjunaal Desa Siaga	%	35	18.5	22.5	0	22.22	▼	DINKES
55	Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM	%	100	100	100	0	0	▼	DINKES
56	Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS	%	100	50	70	0	28.57	▼	DINKES
57	Persentase Kecamatan yang mencapai PHBS Institusi Pendidikan sehat 10 %	%	100	100	100	0	25	▼	DINKES
58	Persentase Kecamatan yang mencapai Rumah Tangga sehat 76,5%	%	80	79.60	80.00	0	50	▼	DINKES
59	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	100	80	100	0	80	▲	DINKES
60	Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	%	100	100	100	0	0	▼	DINKES
61	Persentase kunjungan neonatus lengkap dengan MTBM	%	100	100	100	0	0	▼	DINKES
62	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	NA	100	34.5	73.2	▲	DINKES
63	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	NA	100	0	0	▼	DINKES
64	Persentase orang terdeteksi dini infeksi Hepatitis B	%	1	1.82	1.00	0	0	▼	DINKES
65	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	%	100	100	100	0	1	▼	DINKES
66	Persentase orang usia 15 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	NA	100	0	3.1	▼	DINKES
67	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	NA	100	1.2	6.5	▼	DINKES
68	Persentase penduduk miskin non kuota terintegrasi JKN	%	95	95	95	0	0	▼	DINKES
69	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	NA	100	6.8	28.6	▼	DINKES

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
70	Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan 100%	%	100	100	100	0	0	▼	DINKES
71	Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	%	100	5	66	0	0	▼	DINKES
72	Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat	%	100	25	53	0	0	▼	DINKES
73	Persentase puskesmas melaksanakan STBM	%	100	100	100	0	0	▼	DINKES
74	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	95	100	0	0	▼	DINKES
75	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	95	65	65	0	100	●	DINKES
76	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar	%	95	85	85	0	100	●	DINKES
77	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi dasar yang layak	%	100	73.33	100	55	105	●	DINKES
78	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	%	95	65	65	0	30,77	▼	DINKES
79	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	NA	100	4.1	4.1	▼	DINKES
80	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	10	NA	20	14.81	125.95	●	DINKES
81	Prevalensi balita stunting	%	14	24.5	17.0	0	111.18	●	DINKES
82	Prevalensi Gizi Buruk	%	0.05	0.06	0.07	0.05	128.57	●	DINKES
83	Prevalensi gizi kurang	%	7.4	7.60	7.70	0	140	●	DINKES
84	Prevalensi HIV / AIDS (%) dari total populasi	%	0.14	0.17	0.14	0	200	●	DINKES
85	Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita mencapai 9,5%	%	80	NA	72	0	0	▼	DINKES
86	Prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun	%	11.8	13.31	12.10	0	200	●	DINKES
87	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	37.9	26.3	38.5	0	200	●	DINKES

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
88	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat antimalaria yang tepat	%	100	100	100	0	0	▼	DINKES
89	Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	82.5	70.10	75.00	0	0	▼	DINKES
90	Proporsi penduduk dengan asupan minimal < 2.100 Kkal/hari	%	64	NA	70	0	0	▼	DINKES
91	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	%	85	75	83	0	0	▼	DINKES
92	Rasio dokter per satuan penduduk	%	0.2	0.14	0.20	0	0	▼	DINKES
93	Rasio posyandu per satuan balita		20.7	20.29	20.50	0	24.39	▼	DINKES
94	Rasio Puskesmas per satuan penduduk		0.02	0.02	0.02	0	0	▼	DINKES
95	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0.01	0.01	0.01	0	0	▼	DINKES
96	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	0.40	0.35	0.40	0	0	▼	DINKES
97	Tingkat kematian akibat malaria	%	0.00	0.00	0.00	0	NAN	▼	DINKES
98	Tingkat Kematian karena Tuberculosis (Per 100.000 penduduk)		2	3	3	0	200	●	DINKES
99	Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk)		158	168	164	0	200	●	DINKES

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja bidang kesehatan sampai dengan triwulan II tahun 2020 dari 99 target indikator diketahui 20 target indikator berstatus telah tercapai, 2 target indikator berstatus akan tercapai, dan 77 indikator perlu upaya keras.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaran bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian 15 indikator kinerja.

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Persentase advice planning yang dikeluarkan sesuai tata ruang	%	100	100	100	100	100		DINPERKIM
2	Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%	66.6	57.7	66.7	66.6	99.85		DPU
3	Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	78.92	71.80	74.05	78.92	106.58		DPU
4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	78.89	75.39	73.1	78.89	107.92		DPU
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	37.87	71.03	53.06	37.87	71.37		DPU
6	Persentase kenaikan anggaran irigasi	%	88.01	0	6	88.01	1466.83		DPU
7	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	99.982	99.979	99.982	99.982	100		DPU
8	Persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu	%	0	0	0	0	NAN		DPU
9	Persentase kinerja perencanaan teknis dan kinerja pembinaan jasa konstruksi	%	22.47	NA	30.29	22.47	74.18		DPU
10	Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang	%	0.019	0.021	0.018	0.019	94.44		DPU
11	Persentase peningkatan jalan hotmix	%	20.01	NA	40	20.01	50.03		DPU
12	Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	%	85.8	NA	86.71	85.8	98.95		DPU
13	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0.38	0.71	0.53	0.38	71.7		DPU
14	Rasio jaringan irigasi		38.55	37.69	37.69	38.55	102.28		DPU
15	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0.89833	NA	0.91293	0.89833	98.4		DPU

Keterangan :

 : Telah Tercapai  : Akan Tercapai  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sampai dengan triwulan II Tahun 2020 dari 15 target indikator 6 target indikator telah tercapai, 7 target indikator akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian 17 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	77,58	76,30	76,55	76,30	99,67		DINPER KIM
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	59,84	51,36	51,93	51,36	98,90		DINPER KIM
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	96,30	NA	74,07	74	99,91		DINPER KIM
4	Jumlah IPAL Komunal	Unit	87,00	65	67,00	65	97,01		DINPER KIM
5	Persentase areal kawasan kumuh	%	20,19	20,30	20,24	20,30	100,30		DINPER KIM
6	Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	%	11,63	NA	11,43	0	-		DINPER KIM
7	Persentase lingkungan permukiman kumuh kawasan perkotaan	%	7,84	8,69	8,26	8,69	105,21		DINPER KIM
8	Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	%	88,17	83,17	84,17	83,17	98,81		DINPER KIM
9	Persentase penanganan permukiman kumuh	%	9,75	4,65	4,87	4,65	95,48		DINPER KIM
10	Persentase permukiman yang tertata	%	9,09	9,09	9,24	9,09	98,38		DINPER KIM
11	Persentase rumah sehat sesuai standar	%	77,58	75,81	76,55	75,81	99,03		DINPER KIM
12	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	92,00	82,88	84,00	82,88	98,67		DINPER KIM
13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	%	77,08	69,51	71,94	69,51	96,62		DINPER KIM

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
14	Proporsi rumah tangga lumuh perkotaan	%	0,00	1,95	1,73	1,80	95,95		DINPER KIM
15	Rasio permukiman layak huni	%	80,10	79,70	79,76	79,7	99,92		DINPER KIM
16	Rasio rumah layak huni	%	83,95	76,30	76,56	76,3	99,66		DINPER KIM
17	Rasio tempat pemukiman umum per satuan penduduk		46,18	34,67	37,07	34,67	93,53		DINPER KIM

Keterangan :

: Telah Tercapai : Akan Tercapai : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja bidang perumahan rakyat, sampai dengan triwulan II tahun 2020, 2 target indikator telah tercapai dan 14 indikator akan tercapai, dan 1 indikator memerlukan upaya keras untuk dapat tercapai yaitu Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat ditunjukkan oleh capaian 28 indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7.
**Capaian Kinerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum
dan Pelindungan Masyarakat**

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	75	75	55	0	0		SATPOL PP
2.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	%	100	100	100	25	25		SATPOL PP
3.	Indeks Demokrasi		86,00	86,00	77,83	0	0		BAKES- HANG
4.	Informasi peta rawan bencana	%	100	100	100	100	100		BPBD
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan Perkada	%	100	100	100	25	25		SATPOL PP

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
6.	Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	%	100	100	18.52	0	0	▼	BPBD
7.	Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat	%	100	100	100	100	100	●	BPBD
8.	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100	100	0	0	▼	BAKES- BANG
9.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	●	BPBD
10.	Persentase lembaga keagamaan aktif	%	70	70	55	0	0	▼	BAKES- BANG
11.	Persentase Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	2	2	▼	SATPOL PP
12.	Persentase Pemenuhan Sarpras Kelengkapan Satpol PP	%	100	100	100	25	25	▼	SATPOL PP
13.	Persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu /pemilukada	%	75	75	75	0	0	▼	BAKES- BANG
14.	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	25	25	▼	SATPOL PP
15.	Persentase penanganan pelanggaran PERDA	%	100	100	100	25	25	▼	SATPOL PP
16.	Persentase penegakan perda	%	100	100	100	25	25	▼	SATPOL PP
17.	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	%	100	100	100	25	25	▼	SATPOL PP
18.	Persentase penurunan angka konflik IPOLEKSOSBUDHAN KAM	%	25	25	5	0	0	▼	BAKES- BANG
19.	Persentase penurunan konflik SARA	%	25	25	5	0	0	▼	BAKES- BANG
20.	Persentase penurunan konflik sosial	%	25	25	5	0	0	▼	BAKES- BANG
21.	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	%	26	26	15	13	86.67	●	BPBD
22.	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	%	66.7	66.7	40.0	0	0	▼	BPBD

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
23.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	25	25	▼	BPBD
24.	Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	%	45	45	25	0	0	▼	BAKES- BANG
25.	Rasio pengurangan resiko bencana		50	50	30	30	100	●	BPBD
26.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik	%	75	75	75	0	0	▼	BAKES- BANG
27.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	100	100	25	25	▼	SATPOL PP
28.	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100	100	100	25	25	▼	SATPOL PP

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 28 indikator, sebanyak 4 target indikator telah tercapai, 1 target indikator akan tercapai, dan 23 indikator berstatus perlu upaya keras.

6. Sosial

Kinerja penyelenggaran bidang sosial ditunjukkan oleh capaian 12 indikator kinerja.

Tabel 2.8.
Capaian Kinerja Bidang Sosial

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	NA	100	0	0	▼	DINSOS PERMAS DES
2	Persentase gelandangan dan pengemis yang	%	100	NA	100	0	0	▼	DINSOS PERMAS DES

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti								
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	NA	100	0	0	▼	DINSOS PERMAS DES
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	0	0	▼	DINSOS PERMAS DES
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	0	0	▼	DINSOS PERMAS DES
6	Persentase lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	NA	100	0	0	▼	DINSOS PERMAS DES
7	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	21.74	0	21.74	0	0	▼	DINSOS PERMAS DES
8	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	8.33	NA	8.33	0	0	▼	DINSOS PERMAS DES
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	60.18	9.44	39.58	0	0		DINSOS PERMAS DES
10	Persentase penyandang disabilitas terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	NA	100	0	0	▼	DINSOS PERMAS DES
11	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	51.67	43.19	51.51	0	0	▼	DINSOS PERMAS DES
12	Persentase PMKS yang tertangani	%	52.33	43.49	52.15	0	0	▼	DINSOS PERMAS DES

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja bidang sosial sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 12 target indikator semuanya berstatus perlu upaya keras.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kinerja bidang tenaga kerja sampai dengan triwulan II tahun 2020, ditunjukkan dengan 3 target indikator yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.9.
Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun		6.16	NA	6.16	7.66	79,81		DINAHER KOP UKM
2	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	63	49,58	57,00	36,74	64,46		DINAHER KOP UKM
3	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100	NA	80	100	125		DINAHER KOP UKM

Keterangan :

 : Telah Tercapai  : Akan Tercapai  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020 dari 3 target indikator, 1 target indikator telah tercapai, 1 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 target indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Triwulan II tahun 2020 ditunjukkan dengan 15 target indikator pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10.
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100		DPPKBP3A
2	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100		DPPKBP3A

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
3	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	●	DPPKBP3A
4	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	●	DPPKBP3A
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	●	DPPKBP3A
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	●	DPPKBP3A
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	●	DPPKBP3A
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87.67	87.62	87.64	0	0	▼	DPPKBP3A
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67.6	67.32	67.50	0	0	▼	DPPKBP3A
10	Nilai Kabupaten Layak Anak		750	426	600	0	0	▼	DPPKBP3A
11	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49	49	49	0	0	▼	DPPKBP3A
12	Preferensi kekerasan pada anak perempuan	%	29.32	36.89	33.11	0	0	▼	DPPKBP3A
13	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Orang	24	18	24	0	0	▼	DPPKBP3A
14	Rasio anak korban kekerasan	%	0.006	0.011	0.009	0	200	●	DPPKBP3A
15	Rasio KDRT	%	0.0013	0.0019	0.0016	0	200	●	DPPKBP3A

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sampai dengan triwulan II tahun 2020 dari 15 target indikator, terdapat 9 target indikator berstatus telah tercapai, dan 6 target indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras.

3. Pangan

Kinerja penyelenggaraan bidang pangan sampai dengan triwulan II tahun 2020 dengan 7 target indikator capaiannya tergambarkan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Capaian Kinerja Bidang Pangan

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Indeks Ketahanan Pangan		74.04	NA	74.01	0	0	▼	DINPER TAN KP
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	97	90	95	0	0	▼	DINPER TAN KP
3	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	97.43	70.00	94.43	98.39	104.19	●	DINPER TAN KP
4	Persentase Penguatan cadangan pangan	%	86	70	80	93.94	117.43	●	DINPER TAN KP
5	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	95	97	0	0	▼	DINPER TAN KP
6	Tingkat ketersediaan energi	%	96	91	93	0	0	▼	DINPER TAN KP
7	Tingkat ketersediaan protein (%)	%	96	91	93	0	0	▼	DINPER TAN KP

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020 dari 7 target indikator, 2 target indikator berstatus telah tercapai yaitu persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan persentase penguatan cadangan pangan, dan 5 target indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras.

4. Lingkungan Hidup

Kinerja bidang lingkungan hidup ditunjukkan oleh 12 indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.12.
Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Doku men	1	0	1	0	0	▼	DLH
2	Indeks Kualitas Air (IKA)		55	46.94	54.40	NA	NA	▼	DLH
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		64.15	NA	63.88	NA	NA	▼	DLH
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		56.5	NA	56.50	NA	NA	▼	DLH
5	Indeks Kualitas Udara (IKU)		83.5	85.72	83.20	NA	NA	▼	DLH
6	Integrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Doku men	0	NA	0	NA	NA	▼	DLH
7	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		72	74	72	72	100	●	DLH
8	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	%	100	NA	100	100	100	●	DLH
9	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	%	58	NA	52	52	100	●	DLH
10	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	27	NA	22	22	100	●	DLH
11	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	99	54	97	60	61.86	▼	DLH
12	Timbulan sampah yang ditangani	%	99	54	97	60	61.86	▼	DLH

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja bidang lingkungan hidup, sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebanyak 4 target indikator telah tercapai, dan 8 indikator dengan status perlu perhatian dan upaya keras.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan dengan 15 target indikator yang tertuang dalam Tabel 2.13.

Tabel 2.13.
Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100	80	97	96.5	99.48		DINDUK-CAPIL
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100	94	97	96.5	99.48		DINDUK-CAPIL
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		89.12	81.83	87.89	0	0		DINDUK-CAPIL
4	Persentase instansi pengguna data kependudukan yang melakukan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100		DINDUK-CAPIL
5	Persentase kecamatan yang update database kependudukan	%	100	100	100	100	100		DINDUK-CAPIL
6	Persentase ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	%	100	100	100	100	100		DINDUK-CAPIL
7	Persentase pemohon akta kelahiran yang terlayani	%	100	100	100	100	100		DINDUK-CAPIL
8	Persentase pemohon akta kematian yang terlayani	%	100	100	100	100	100		DINDUK-CAPIL
9	Persentase pemohon akta perkawinan yang terlayani	%	100	100	100	100	100		DINDUK-CAPIL
10	Persentase pemohon Kartu Identitas Anak yang terlayani	%	100	100	100	100	100		DINDUK-CAPIL
11	Persentase pemohon Kartu Keluarga yang terlayani	%	100	100	100	100	100		DINDUK-CAPIL
12	Persentase pemohon KTP-Elektronik yang terlayani	%	100	100	100	100	100		DINDUK-CAPIL
13	Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100	100	100		DINDUK-CAPIL
14	Rasio bayi berakte kelahiran	%	98.7	86.0	93.0	91	97.85		DINDUK-CAPIL

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
15	Rasio pasangan berakta nikah	%	100	100	100	100	100		DINDUK- CAPIL

Keterangan :

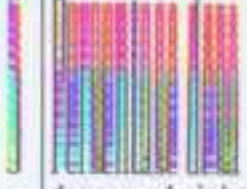
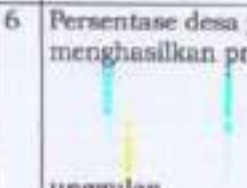
 : Telah Tercapai  : Akan Tercapai  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 15 target indikator, capaian terhadap target RKPD tahun 2020 sebanyak 11 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, 1 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan 10 target indikator pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14.
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Indeks Desa Membangun		0.694	0.560	0.674	0	0		DINSOS PERMAS DES
2	Kelembagaan Kawasan Perdesaan (PKP) yang terbentuk	lembaga	2	0	2	0	0		DINSOS PERMAS DES
3	Kelulusan sarjana per desa	Orang	1	NA	0	0	NAN		DINSOS PERMAS DES
4	Persentase Bumdes yg meningkat stratanya	%	8	NA	7.00	0	0		DINSOS PERMAS DES
5	 dengan administrasi baik	%							 DINSOS PERMAS DES
6	 Persentase desa yang menghasilkan produk unggulan	%	50	NA	60	0	0		 DINSOS PERMAS DES
7	Persentase desa yang meningkat prasarananya	%	2.66	NA	2.66	0	0		DINSOS PERMAS DES
8	Persentase desa yg telah mengembangkan/me manfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk usaha perdesaan	%	0.66	NA	0.66	0	0		DINSOS PERMAS DES
9	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	NA	100	0	0		DINSOS PERMAS DES

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
	sesuai dengan ketentuan UU No.6 Tahun 2014								
10	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	0	0	▼	DINSOS PERMAS DES

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 10 indikator kinerja semuanya berstatus perlu perhatian/upaya keras.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan dalam 18 indikator sebagai berikut:

Tabel 2.15.

Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19 tahun) per 1000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun)	%	0.24	0.41	0.28	0	200	●	DPPKBP3A
2	Angka Kelahiran Total TFR	Orang	2.25	2.31	2.26	0	200	●	DPPKBP3A
3	Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	%	76.89	75.25	76.39	0	0	▼	DPPKBP3A
4	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	70	57	69	0	0	▼	DPPKBP3A
5	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	%	82.81	78.81	81.31	0	0	▼	DPPKBP3A
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	60	57	59	0	0	▼	DPPKBP3A
7	Cakupan Pusangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Orang	5550	5770	5606	0	200	●	DPPKBP3A
8	Jumlah kebijakan (Perda /Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	aturan	1	NA	1	0	0	▼	DPPKBP3A

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
9	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.82	0.87	0.85	0	0	▼	DPPKBP3A
10	Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	%	46.5	47.00	46.8	0	0	▼	DPPKBP3A
11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	42	36.75	39	0	0	▼	DPPKBP3A
12	Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	35	17	25	25	100	●	DPPKBP3A
13	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	10	6	8	4	50	▼	DPPKBP3A
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	74	70	70	0	0	▼	DPPKBP3A
15	Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB	%	100	100	100	100	100	●	DPPKBP3A
16	Rasio Akseptor KB	%	74	73	70	0	0	▼	DPPKBP3A
17	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	●	DPPKBP3A
18	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	anak	2.3	2.80	2.5	0	0	▼	DPPKBP3A

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 18 indikator kinerja, sebanyak 6 target indikator telah tercapai, dan 12 target indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras.

8. Perhubungan

Kinerja bidang perhubungan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 ditunjukkan 4 indikator kinerja.

Tabel 2.16.
Capaian Kinerja Bidang Perhubungan

No.	Aspek/Program/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Persentase ketersediaan terminal	%	62.5	37.5	50.0	37	74	▼	DINHUB
2	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	48	36	43	41	95.35	▶	DINHUB
3	Persentase ketersediaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan	%	60	39	52	51.5	99.04	▶	DINHUB
4	Rasio ijin trayek		0.077	0.064	0.071	0.066	92.96	▶	DINHUB

Keterangan :

● : Telah Tercapai ▶ : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja bidang perhubungan, sampai dengan triwulan II tahun 2020 dari 4 target indikator, sebanyak 3 target indikator berstatus akan tercapai dan 1 target indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras.

9. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian 5 indikator kinerja yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.17.
Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Aspek/Program/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3.5	NA	2.90	2.65	91.38	▶	DINKOM INFO
2	Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		2	8	4	5	75	▶	DINKOM INFO
3	Persentase aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	%	100	10	40	0	0	▼	DINKOM INFO
4	Persentase SDM yang melek IT	%	100	10	40	0	0	▼	DINKOM INFO

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
5	Rasio Lapak aduan publik berbasis IT	%	100	100	100	0	0	▼	DINKOM INFO

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja bidang komunikasi dan informatika, sampai dengan triwulan II tahun 2020, 2 target indikator berstatus akan tercapai dan 3 target indikator dengan status perlu upaya keras.

10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja penyelenggaraan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sampai dengan triwulan II tahun 2020 tertuang dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18.

Capaian Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Persentase koperasi aktif	%	77.25	76.00	76.50	80.50	105.23	●	DINAHER KOP UKM
2	Persentase koperasi sehat	%	31	29.12	30.25	7.76	25.65	▼	DINAHER KOP UKM
3	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	1.98	0.39	1.34	1.69	126.12	●	DINAHER KOP UKM
4	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	0.47	0.34	0.47	0.064	13.62	▼	DINAHER KOP UKM
5	Persentase Pertumbuhan UMKM dan IKM	%	0.46	0.34	0.46	0	0	▼	DINAHER KOP UKM

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020 dari 5 target indikator, 2 target indikator berstatus akan tercapai dan 3 target indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras.

11. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan bidang penanaman modal sampai dengan triwulan II tahun 2020 mempunyai 7 target indikator yang dapat dilihat dalam Tabel 2.19.

Tabel 2.19.

Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		90	77.23	87.00	89.85	103.28		DPMPTSP
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Publik-MPP)		83	NA	80	0	0		DPMPTSP
3	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	275	583	260	625	240.38		DPMPTSP
4	Nilai investasi di kawasan industri	Milyar Rupiah	100	NA	0	0	NA	NA	DPMPTSP
5	Persentase penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100		DPMPTSP
6	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	%	2	2	2	0	0		DPMPTSP
7	Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	40	100	100	100		DPMPTSP

Keterangan :

 : Telah Tercapai  : Akan Tercapai  : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020 dari 7 target indikator, 4 target indikator berstatus telah tercapai dan 2 target indikator perlu upaya keras untuk pencapaiannya. Sedangkan untuk nilai investasi di kawasan industri baru ada targetnya pada tahun 2022.

12. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja bidang kepemudaan dan olah raga sampai dengan triwulan II tahun 2020 ditunjukkan oleh 2 indikator kinerja yang tersaji dalam Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Capaian Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	71	NA	56	0	0	▼	
2	Persentase pertumbuhan pemuda berprestasi	%	3,27	NA	1,31	0,437	33,36	▼	

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020 dari 2 target indikator, 2 indikator keduanya perlu perhatian/upaya keras.

13. Statistik

Kinerja penyelenggaraan bidang statistik sampai dengan triwulan II tahun 2020, ditunjukkan oleh capaian kinerja 1 indikator yang perlu upaya keras dalam pencapaiannya.

Tabel 2.21.
Capaian Kinerja Bidang Statistik

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Persentase Data Informasi dan Statistik Yang Terpublikasi dengan baik	%	100	100	100	0	0	▼	DINKOM INFO

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

14. Persandian

Kinerja penyelenggaraan bidang persandian sampai dengan triwulan II tahun 2020, ditunjukkan oleh capaian kinerja 3 indikator.

Tabel 2.22.
Capaian Kinerja Bidang Persandian

No.	Program Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 sd TW II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Realisasi sd TW II			
1	Persentase OPD yang menggunakan layanan keamanan informasi	%	100		43	43	100	●	DINKOM-INFO
2	Standarisasi pusat data/data center	aneK	17	17	17	0	0	▼	DINKOM-INFO
3	Standarisasi pusat data/data center	aneK	17	17	17	17	100	●	DINKOM-INFO

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan semester II tahun 2020 dari 3 target indikator 2 indikator telah tercapai dan 1 indikator perlu perhatian/upaya keras.

15. Kebudayaan

Kinerja pembangunan bidang kebudayaan memiliki 4 indikator yaitu jumlah grup kesenian, jumlah gedung kesenian, sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel 2.23.
Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan

No.	Aspek/Program/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Persentase jenis kesenian yang dilestarikan	%	100	NA	50.94	43.4	85.2	►	DINPORA BUDPAR
2	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	100	NA	72.73	0	0	▼	DINPORA BUDPAR
3	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	100	NA	47.47	0	0	▼	DINPORA BUDPAR
4	Persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati	%	100	NA	44	0	0	▼	DINPORA BUDPAR

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan semester II tahun 2020 dari 4 target indikator 3 berstatus akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian/upaya keras.

16. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan bidang perpustakaan sampai dengan triwulan II tahun 2020, ditunjukkan oleh capaian kinerja 6 target indikator.

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	36540	27636	36390	36740	100.96	●	DINARPUS DA
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	61344	59313	56250	56407	100.28	●	DINARPUS DA
3	Persentase jumlah perpustakaan terbina	%	47.22	5.55	26.38	20.43	77.45	●	DINARPUS DA
4	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat	%	2.93	2.80	2.88	0	0	▼	DINARPUS DA
5	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah	%	7.89	4.80	5.93	0	0	▼	DINARPUS DA
6	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	0.053	NA	0.053	0.48	905.66	●	DINARPUS DA
7	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan		1365		1083				DINARPUS DA

Keterangan :

● : Telah Tercapai ● : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja bidang perpustakaan sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 7 indikator kinerja, 3 Indikator berstatus sudah tercapai, 1 Indikator berstatus akan tercapai dan 2 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras.

17. Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan bidang kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2020, ditunjukkan oleh capaian 5 indikator kinerja yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Bidang Kearsipan

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Nilai penyelenggaraan Kearsipan	Nilai	77	52	72	0	0	▼	DINARPUS DA
2	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	Orang	257	100	185	25	13.51	▼	DINARPUS DA
3	Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas	%	90	NA	40	20.54	51.35	▼	DINARPUS DA
4	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	36.4	NA	14.5	3.64	25.1	▼	DINARPUS DA
5	Persentase unit kerja/ OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar	%	36.4	NA	14.5	14.55	100.34	●	DINARPUS DA

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja bidang kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 5 indikator kinerja, 1 target indikator telah tercapai 4 indikator perlu perhatian/upaya keras.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2020, digambarkan oleh capaian kinerja 8 target indikator.

Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	14.83	13.85	14.53	0	0	▼	DINKAN NAK
2	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	2	NA	2	0	0	▼	DINKAN NAK
3	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1.5	1.38	1.5	0	0	▼	DINKAN NAK
4	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1.5	NA	1.5	0	0	▼	DINKAN NAK
5	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1.5	NA	1.5	0	0	▼	DINKAN NAK
6	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	187.9	170.2	177.1	89.14	50.33	▼	DINKAN NAK
7	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11041	10162	10559	6071.85	57.5	▼	DINKAN NAK
8	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	939	839	898	492.1	54.8	▼	DINKAN NAK

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020, 8 indikator berstatus perlu perhatian/upaya keras.

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan bidang pariwisata sampai dengan triwulan II tahun 2020 ditunjukkan oleh 3 indikator pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Bidang Pariwisata

No.	Aspek/Program/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Jumlah kunjungan wisatawan	wisatawan	3708792	1233595	3134193	755056	24.09	▼	
2	Persentase pertumbuhan desa wisata	%	100	NA	64.29	200	311.09	●	
3	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)	%	6.35	NA	5.86	14.07	240.1	●	

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020 dari 3 target indikator, 2 target indikator telah tercapai, dan 1 target indikator perlu perhatian/upaya keras.

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaraan bidang pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2020, ditunjukkan oleh capaian 24 target indikator yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.28.
Capaian Kinerja Bidang Pertanian

No.	Aspek/Program/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Peternakan	%	2	NA	2	0	0	▼	DINPER TAN KP
2	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	6.19	3.00	0	0	▼	DINPER TAN KP
3	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	%	1	NA	1	0	0	▼	DINPER TAN KP
4	Produksi Daging	Ton	24431	19471	22357	13414.37	60	▼	DINPER TAN KP

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
5	Produksi olahan hasil peternakan	Ton	552.04	NA	520.21	268.8	51.67	▼	DINPER TAN KP
6	Produksi Susu	Liter	4218000	5594500	3860000	1941811	50.31	▼	DINPER TAN KP
7	Produksi tanaman Cabai	Ton	1881.5	1570.00	1832.50	978.5	53.4	▼	DINPER TAN KP
8	Produksi tanaman cengkeh	Ton	499.66	310.00	489.97	238.6	48.7	▼	DINPER TAN KP
9	Produksi tanaman Durian	Ton	10030.82	4862.40	9879.02	4813	48.72	▼	DINPER TAN KP
10	Produksi tanaman Jagung	Ton	13806	13006	13400	13035.17	97.28	▶	DINPER TAN KP
11	Produksi tanaman Kedelai	Ton	1658.11	1562.01	1609.34	0	0	▼	DINPER TAN KP
12	Produksi tanaman kelapa dalam	Ton	14589.24	13284.00	14174.53	8897.96	62.77	▼	DINPER TAN KP
13	Produksi tanaman kelapa deres	Ton	57097.53	54731.00	55388.89	28142.49	50.81	▼	DINPER TAN KP
14	Produksi tanaman kopi	Ton	150.78	142.00	146.34	44.56	30.45	▼	DINPER TAN KP
15	Produksi tanaman lada	Ton	62.39	58.77	60.55	38.14	62.99	▼	DINPER TAN KP
16	Produksi tanaman Padi	Ton	500000	375000	425000	186659.6	43.92	▼	DINPER TAN KP
17	Produksi tanaman pala	Ton	49.73	25.97	41.62	22.4	53.82	▼	DINPER TAN KP
18	Produksi tanaman Pisang	Ton	28240.12	20510.80	27599.79	15063.1	54.58	▼	DINPER TAN KP
19	Produksi tanaman tembakau	Ton	15	14.00	14.56	0	0	▼	DINPER TAN KP
20	Produksi Telur	Ton	19368	16910.4	17724	8896.47	50.19	▼	DINPER TAN KP
21	Produktivitas tanaman Jagung	ton / ha	6.6	5.92	6.46	6.1	94.43	▶	DINPER TAN KP
22	Produktivitas tanaman Kedelai	ton / ha	1.43	1.53	1.38	0	0	▼	DINPER TAN KP
23	Produktivitas tanaman Padi	ton / ha	6.25	5.57	5.89	5.8	98.47	▶	DINPER TAN KP
24	Rasio jumlah petani pengguna safety belt	%	0.25	NA	0.25	0.25	100	●	DINPER TAN KP

Keterangan :

● : Telah Tercapai ▶ : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020 dari 24 target indikator, 1 target indikator telah tercapai, 3 target indikator akan tercapai dan 20 target indikator berstatus belum perlu perhatian/upaya keras.

4. Perdagangan

Kinerja bidang perdagangan ditunjukkan oleh capaian 4 indikator kinerja dalam Tabel 2.29.

Tabel 2.29.
Capaian Kinerja Bidang Perdagangan

No.	Aspek/Program/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d Triwulan II			
1	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	Kelompok	54	1118	54	7	12,96	▼	DINPERIND AGKOP
2	Jumlah Gula Kelapa Tereksport	Ton	30000	6000	12000	490	4,08	▼	DINPERIND AGKOP
3	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	\$ USD	20000000	22691050	20000000	7807843,5	39,04	▼	DINPERIND AGKOP
4	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	4,52	4,44	4,48	8,11	181,03	●	DINPERIND AGKOP

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020 dari 4 target indikator 1 telah tercapai dan 3 berstatus perlu perhatian/upaya keras.

5. Perindustrian

Kinerja pembangunan bidang perindustrian sampai dengan triwulan II tahun 2020 sampai ditunjukkan oleh 3 indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.30.
Capaian Kinerja Bidang Industri

No.	Aspek/Program/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d Triwulan II			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	69	662	66	6	9,09	▼	DINPERIND AGKOP
2	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	1,98	0,39	1,34	1,69	126,12	●	DINPERIND AGKOP
3	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,86	5,78	5,82	7,99	137,29	●	DINPERIND AGKOP

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020 3 target indikator 2 telah tercapai dan 1 perlu perhatian/usaha keras.

6. Transmigrasi

Kinerja bidang ketransmigrasian sampai dengan triwulan II tahun 2020 dengan 1 indikator kinerja yang perlu perhatian/upaya keras sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.31.
Capaian Kinerja Bidang Ketransmigrasian

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	100	100	100	0	0	▼	DINAHER KOP UKM

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020 1 target indikator perlu perhatian/usaha keras.

D. Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan

1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaraan fungsi perencanaan sampai dengan triwulan II tahun 2020, digambarkan oleh capaian kinerja 12 target indikator.

Tabel 2.32.
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100	1	1	▼	BAPPEDA LITBANG
2	Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD	%	85	61.51	70.00	0	0	▼	BAPPEDA LITBANG
3	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan KTRW	%	95	NA	91	1	1.1	▼	BAPPEDA LITBANG
4	Persentase terpenuhinya aspek kualitas perencanaan	%	95	NA	91	91.67	100.74	●	BAPPEDA LITBANG

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan table tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020 terlihat bahwa dari 4 indikator, 1 indikator berstatus telah tercapai dan 3 indikator berstatus perlu perhatian/usaha keras.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaraan fungsi keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2020, ditunjukkan oleh capaian kinerja 8 target indikator.

Tabel 2.33.
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	8.06	5.79	6.86	1	14.58	▼	BKAD
2	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	18	15	15	0	0	▼	BAPENDA
3	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	0	0	▼	BKAD

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
4	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		0.41	0.37	0.37	0.1	27.03	▼	BKAD
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	12	12	12	0	0	▼	BKAD
6	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	29	29	29	0	0	▼	BKAD
7	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	100	100	25	25	▼	BKAD
8	Persentase SILPA	%	3.94	11.94	6.60	0	0	▼	BKAD

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020, seluruh target indikator berstatus belum tercapai dan perlu perhatian/ usaha keras.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaraan fungsi kepegawaian sampai dengan triwulan II tahun 2020, menunjukkan capaian kinerja 4 target indikator sebagai berikut:

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Indeks Profesionalitas ASN		83.7	82.79	83.40	0	0	▼	BKPSDM
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	jabata n	189	189	189	45	23.81	▼	BKPSDM
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabata n	31	31	31	10	32.26	▼	BKPSDM
4	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	%	95	40	91	0	0	▼	BKPSDM

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020, seluruh target indikator perlu perhatian/upaya keras.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pelatihan sampai dengan triwulan II tahun 2020, ditunjukkan oleh capaian kinerja 1 target indikator yang belum tercapai dan perlu perhatian sebagaimana Tabel 2.35.

Tabel 2.35.

Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No.	Aspek/Program/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0.087	0.083	0.064	0	0	▼	BKPSDM

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

5. Administrasi Pemerintahan

Kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan sampai dengan tahun 2020, ditunjukkan oleh capaian kinerja 7 target indikator. Capaian kinerja indikator tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020 tersaji dalam Tabel 2.36.

Tabel 2.36.

Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

No.	Aspek/Program/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya	%	100	NA	70	75	0	▼	SETDA
2	Indeks Kepuasan DPRD	%	84	80	81	80	0	▼	SETWAN
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		85.81	38.50	82.88	73.95	106.41	●	SETDA
4	Indeks Reformasi Birokrasi		75	63.79	68.00	0	0	▼	SETDA
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		80	60.22	74.00	0	0	▼	SETDA
6	Nilai Evaluasi LKJIP Sekretariat Daerah		73.95	73.92	73.92	0	0	▼	SETDA
7	Tersedianya Rencana Kerja	Doku men	5	NA	5	5	100	●	SETWAN

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
	Tahunan pada setiapb Alat-Alat Kelengkapan DPRD								

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 7 indikator 2 target indikator berstatus telah tercapai, dan 5 indikator perlu upaya keras.

6. Pengawasan

Kinerja penyelenggaraan fungsi pengawasan penunjang bidang pemerintahan sampai dengan tahun 2020, ditunjukkan oleh capaian kinerja 3 target indikator.

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Indeks Persepsi Korupsi		3.75	3.38	3.50	0	0	▼	INSPEKTORAT
2	Persentase tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan	%	85	NA	78	40	51.28	▼	INSPEKTORAT
3	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan	%	78	60	72	38	52.78	▼	INSPEKTORAT

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020, seluruh target indikator berstatus belum tercapai dan perlu perhatian /upaya keras.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Banyumas memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi di perekonomian global, nasional dan provinsi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
	Tahunan pada setiapb Alat-Alat Kelengkapan DPRD								

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020, dari 7 indikator 2 target indikator berstatus telah tercapai, dan 5 indikator perlu upaya keras.

6. Pengawasan

Kinerja penyelenggaraan fungsi pengawasan penunjang bidang pemerintahan sampai dengan tahun 2020, ditunjukkan oleh capaian kinerja 3 target indikator.

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan

No.	Aspek/Program/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD	Realisasi 2019	2020		Tingkat Capaian RKPD 2020 s.d Triwulan II (%)	Status	OPD
					Target 2020	Capaian 2020 s.d. Triwulan II			
1	Indeks Persepsi Korupsi		3.75	3.38	3.50	0	0	▼	INSPEKTORAT
2	Persentase tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan	%	85	NA	78	40	51.28	▼	INSPEKTORAT
3	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan	%	78	60	72	38	52.78	▼	INSPEKTORAT

Keterangan :

● : Telah Tercapai ► : Akan Tercapai ▼ : Perlu Perhatian/Upaya Keras

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2020, seluruh target indikator berstatus belum tercapai dan perlu perhatian /upaya keras.

Selain itu, kebijakan ekonomi daerah juga ditujukan untuk menekan pengangguran dan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mencerminkan keberhasilannya dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kebijakan ini menjadi pedoman dan direpresentasikan dalam berbagai kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Faktor yang tak kalah pentingnya adalah bahwa kebijakan ekonomi daerah saat ini tidak dapat dilepaskan dari isu degradasi lingkungan. Pembangunan di satu sisi membawa kemanfaatan yang banyak bagi kesejahteraan masyarakat, namun pembangunan juga berpotensi memberi dampak yang merugikan apabila tidak dikelola dengan baik. Kemajuan ekonomi menjadi tidak bermanfaat ketika kemajuan tersebut harus harus dibiayai dengan dampak kerusakan lingkungan yang terus menerus sampai kepada generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi tidak hanya ditujukan pada keberhasilan mencapai kuantitas angka pertumbuhan yang tinggi, namun kualitas yang tetap terjaga dengan meletakkan pembangunan pada perspektif kelestarian lingkungan.

Pemerintah Daerah meyakini bahwa upaya pembangunan daerah hanya akan memberi dampak optimal jika melibatkan berbagai pihak yang melakukan tugas dan perannya masing-masing. Untuk itu perlu optimalisasi kemitraan yang didukung dengan komunikasi yang baik dan lancar di antara pihak-pihak yang bermitra. Jalinan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau dunia usaha menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Jalinan kemitraan tersebut saling bekerjasama dalam mengelola sumber daya yang tersedia demi terciptanya lapangan kerja. Adapun cakupan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sangatlah luas, seperti pengembangan kapasitas institusional kelompok atau pengembangan industri pada sektor tertentu, pengembangan klaster produk unggulan daerah, memajukan peran koperasi pada sektor UMKM, pembentukan institusi baru dan sebagainya. Dalam rangka mengimplementasikan pola pembangunan, pemerintah daerah selalu mengupayakan pembangunan yang berwawasan karakteristik serta kekhasan Kabupaten Banyumas.

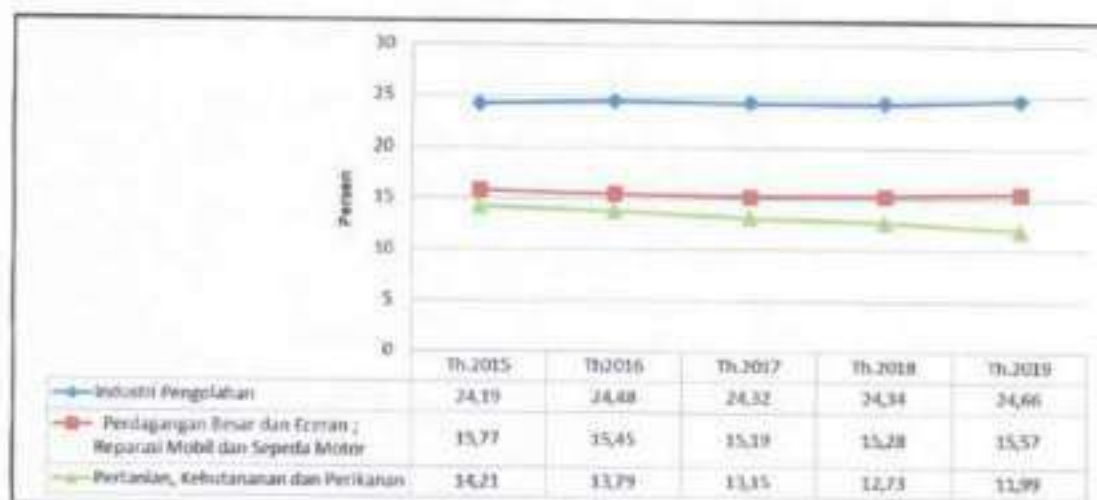
Arah kebijakan ekonomi daerah juga akan lebih memperhatikan faktor fundamental struktural setelah beberapa tahun sebelumnya titik berat pembangunan lebih diarahkan pada dimensi infrastruktur. Secara fundamental, faktor sumberdaya manusia merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas.

Arah kebijakan ekonomi juga memberi perhatian atas upaya peningkatan akses masyarakat dunia usaha terhadap lembaga keuangan, selain itu kebijakan untuk mendorong digitalisasi transaksi juga perlu dikembangkan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas utamanya didorong oleh tiga sektor, yaitu ; sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada tahun 2019 sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi yaitu sebesar 24,46 persen, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 15,57 persen dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan sumbangan sebesar 11,99 persen. Sebagai sektor dengan kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB sektor industri pengolahan telah menggeser sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor andalan di Kabupaten Banyumas, di mana pada tahun-tahun sebelumnya sektor pertanian adalah merupakan sektor andalan. Perkembangan kontribusi tertinggi lapangan usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 3.1.
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
dengan kontribusi tertinggi Kabupaten Banyumas
Tahun 2015 - 2019
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2015-2019

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Banyumas menunjukkan perekonomian di Kabupaten Banyumas meningkat dalam lima tahun terakhir, sebagaimana tampak dalam Gambar 3.2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas pada tahun 2019 lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Selama rentang waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas berfluktuatif dari 6,12% pada tahun 2015, menurun menjadi 6,05% pada tahun 2016, meningkat kembali menjadi 6,34% pada tahun 2017, naik kembali menjadi 6,45% pada tahun 2018, dan menurun menjadi 6,32% pada tahun 2019. Namun demikian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2015 s.d 2019 masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Dengan adanya pertumbuhan tersebut berarti terdapat perbaikan di sektor ekonomi. Dengan meningkatnya perekonomian Kabupaten Banyumas, diharapkan ada penyerapan tenaga kerja karena dengan pertumbuhan maka di sektor riil melakukan penyerapan tenaga kerja baru. Meskipun meningkat, namun perekonomian di Banyumas masih sangat tergantung konsumsi rumah tangga. Karena konsumsi rumah tangga perannya sangat dominan hingga 66,72 persen pada tahun 2019. Dengan demikian aktivitas konsumsi rumah tangga, sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Di sisi lain inflasi Kabupaten Banyumas selama dua tahun terakhir masih di bawah target. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang dapat diartikan pertambahan pendapatan perkapita dengan Inflasi yang dapat dikendalikan maka masyarakat secara umum mampu memenuhi kebutuhan dasar.



Gambar 3.2.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**
Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2015-2019

2. Produk Domestik Bruto

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dari Rp.38.798.789.350.000,00 pada tahun 2015 menjadi Rp.53.948.860,050.000,00 pada tahun 2019. Nilai PDRB ADHK 2010 Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 juga mengalami peningkatan dari Rp. 31.164.876,400.000,00 pada tahun 2014 menjadi Rp.39.779.320.860.000,00 pada tahun 2019. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.1.

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	5.514.200,36	5.794.066,28	5.993.758,00	6.351.391,20	6.470.099,73
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	2.219.751,28	2.351.204,04	2.533.397,38	2.854.729,86	2.983.607,47
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	9.385.315,40	10.285.883,65	11.084.841,53	12.143.970,93	13.301.268,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	32.906,92	37.921,15	42.799,97	47.242,35	49.744,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	30.280,04	31.522,72	35.074,70	37.158,97	39.372,80
F	Konstruksi/ Construction	4.674.249,11	5.212.691,45	5.844.848,41	6.613.480,83	7.123.206,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6.118.040,09	6.489.919,45	6.924.280,52	7.624.997,48	8.398.408,70
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	1.411.764,12	1.506.968,59	1.621.047,87	1.743.295,09	1.922.951,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1.256.063,81	1.403.713,04	1.540.436,22	1.645.170,25	1.795.055,12
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1.618.350,79	1.769.827,28	2.127.324,24	2.325.242,06	2.638.368,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	1.217.463,38	1.370.844,41	1.507.591,82	1.609.030,80	1.700.083,23
L	Real Estate/ Real Estate Activities	851.097,64	918.743,59	1.015.790,04	1.099.535,56	1.176.503,05
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	111.968,85	125.237,53	139.479,03	154.803,08	175.034,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1.300.430,47	1.379.667,96	1.453.272,85	1.527.189,02	1.609.657,23
P	Jasa Pendidikan/ Education	2.030.067,55	2.200.312,16	2.461.068,76	2.750.600,83	3.043.166,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	370.498,81	405.415,47	448.149,50	496.947,46	541.672,73
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	656.340,74	733.001,73	812.818,89	871.340,98	980.659,86
PDRB		38.798.789,35	42.016.940,50	45.585.979,73	49.896.126,75	53.948.860,05

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2019.

Tabel 3.2.

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	4.131.290,79	4.249.221,61	4.383.847,66	4.514.242,53	4.528.294,16
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	1.634.698,29	1.701.017,83	1.778.430,41	1.854.405,97	1.916.343,13
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	7.192.718,61	7.580.823,83	7.969.582,50	8.477.596,24	9.155.016,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	33.474,99	35.872,59	37.435,88	39.964,92	42.027,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	27.824,60	28.402,85	31.395,65	33.100,71	34.479,69
F	Konstruksi/ Construction	3.739.023,76	4.160.014,82	4.569.343,17	4.963.729,47	5.177.000,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	5.257.473,89	5.502.259,40	5.754.684,79	6.194.509,83	6.670.471,15
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	1.208.358,52	1.280.498,64	1.360.426,78	1.448.388,74	1.563.880,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1.064.036,79	1.163.809,71	1.264.317,67	1.334.789,23	1.438.319,47
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1.790.319,78	1.955.854,89	2.250.915,63	2.453.356,89	2.754.120,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	928.774,94	1.015.906,79	1.071.348,40	1.114.073,38	1.161.890,55
L	Real Estate/ Real Estate Activities	762.958,76	812.542,90	880.336,81	929.392,62	980.323,34
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	89.818,27	96.142,12	103.368,55	112.039,50	123.335,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	1.013.086,86	1.026.711,75	1.051.214,69	1.086.571,00	1.126.122,18
P	Jasa Pendidikan/ Education	1.451.892,19	1.536.364,41	1.651.943,21	1.791.427,92	1.936.533,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	283.774,73	308.792,32	336.288,23	368.285,43	395.096,61
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	555.350,63	595.810,19	652.433,27	698.626,20	776.066,89
PDRB		31.164.876,40	33.051.046,65	35.147.313,30	37.414.500,58	39.779.320,86

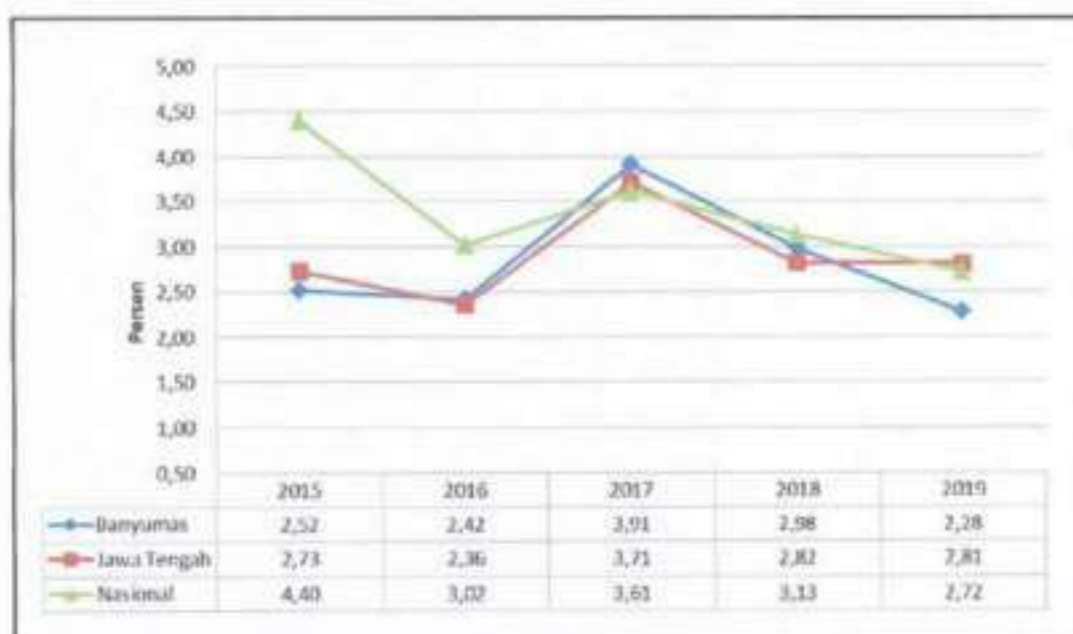
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2019.

Apabila dilihat dari nilai nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK 2010 selama 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Banyumas dalam kondisi semakin baik. Namun apabila dilihat dari pertumbuhannya, perekonomian Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 mengalami perlambatan Tahun 2015-2016 dan Tahun 2017-2019 mengalami percepatan kembali.

Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Tahun 2019 tertinggi dicapai kategori Informasi dan Komunikasi/Information and Communication sebesar 11,74%, kategori Jasa Perusahaan/Business Activities sebesar 10,08% dan Jasa lainnya/ Other Services Activities sebesar 9,05%.

3. Laju Inflasi

Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejala harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Laju inflasi di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan trend mengalami penurunan dan searah dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Inflasi yang terjadi pada tahun 2019 di Kabupaten Banyumas 2,28% lebih rendah dari Inflasi di Jawa Tengah sebesar 2,81% dan lebih rendah dari Inflasi Nasional sebesar 2,72%. Perbandingan laju inflasi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.3.

Laju Inflasi Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2015-2019

4. PDRB Perkapita

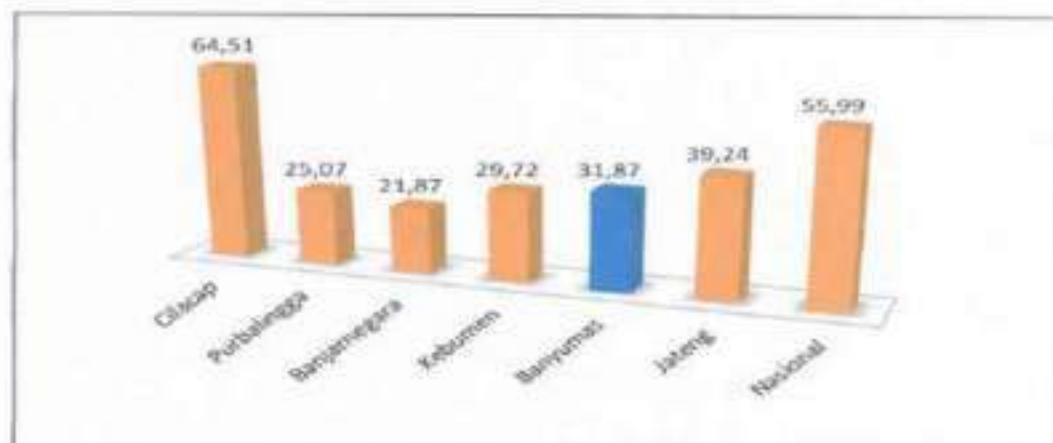
Besarnya pendapatan rata-rata penduduk atau PDRB per Kapita Kabupaten Banyumas ditunjukkan dari pendapatan Kabupaten Banyumas dibagi jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas. PDRB per kapita Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, Pada tahun 2015, PDRB per kapita sebesar Rp. 19,050 juta, meningkat menjadi Rp. 23,49 juta di tahun 2019.



Gambar 3.4.

PDRB per Kapita ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Banyumas Tahun 2015-2019 (juta)

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2015-2019



Gambar 3.5.

Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

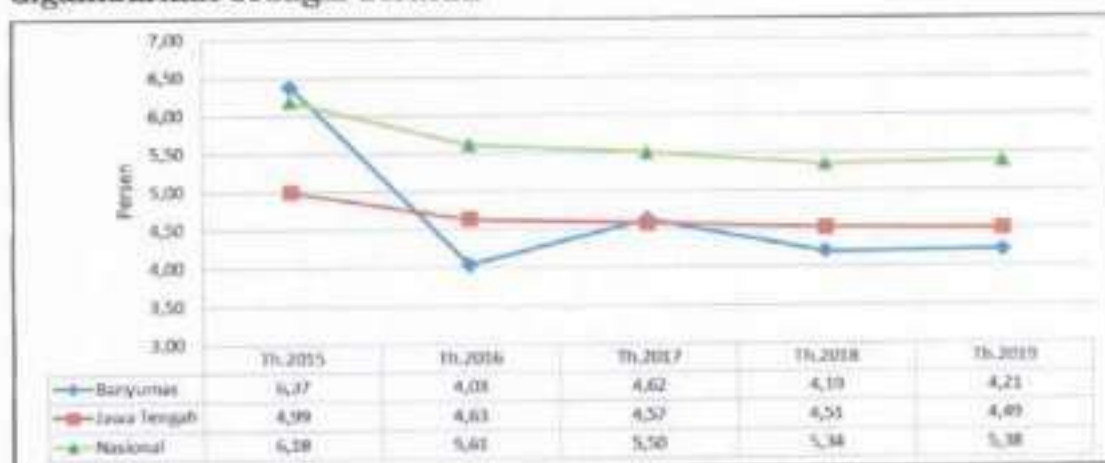
Dibandingkan PDRB per Kapita Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional PDRB per Kapita di Kabupaten Banyumas tahun 2019 masih lebih rendah. Namun demikian masih lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per Kapita Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen.

5. Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas. Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan baik dalam hal pengentasan kemiskinan dari sisi pangan, kesehatan, akses pendidikan, hingga peningkatan taraf hidup masyarakat. Tantangan lain yang juga perlu dicermati adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja di wilayah Kabupaten Banyumas.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banyumas mengalami perkembangan fluktuatif, dengan kecenderungan lebih tinggi dibanding TPT Jawa Tengah dan nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Untuk menekan tingkat pengangguran tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengupayakan penciptaan berbagai lapangan kerja, mendorong pengembangan UMKM, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2015 – 2019 berfluktuatif pada tahun 2015 sebesar 6,37%, menurun menjadi 4,03 pada tahun 2016, meingkat kembali pada tahun 2017 sebesar 4,62% dan menurun kembali lagi pada tahun 2018 menjadi 4,19%, dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi sebesar 4,21%. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan TPT Nasional, maka TPT Kabupaten Banyumas masih lebih rendah.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.6.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyuas,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi di kabupaten Banyumas sebesar 71,96 pada tahun 2019, maka tingkat pengangguran yang menurun disertai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dapat menjadi petunjuk bahwa pembangunan ekonomi berhasil dalam berbagai segi.



Gambar 3.7.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Banyumas tahun 2019 tumbuh sebesar 6,32% menurun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 6,35%, dengan kontribusi tertinggi pada lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Adapun inflasi tahun 2019 sebesar 2,28 menurun dibanding tahun 2018 sebesar 2,98%.

Tabel 3.3.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Banyumas
Tahun 2016-2019 dan Proyeksi Tahun 2020

No.	Komponen	Realisasi				Proyeksi Th.2020
		Th.2016	Th.2017	Th.2018	Th.2019	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,05	6,34	6,35	6,32	4,80
2.	Inflasi	2,42	3,91	2,98	2,28	2,5-3
3.	Tingkat Penduduk Miskin	17,23	17,05	13,50	12,53	11,53-12,53
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,03	4,62	4,19	4,21	4,23
5.	Nilai Tukar Petani	100,08	100,30	104,05	104,05	101,33

No.	Komponen	Realisasi				Proyeksi Th.2020
		Th.2016	Th.201 7	Th.201 8	Th.201 9	
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,50	70,75	71,30	71,96	72,55
7.	Indeks Gini	0,3100	0,3139	0,3132	0,2667	0,2366
8.	Indeks Ketimpangan Williamson	0,0107	0,3456	0,3456	0,3416	0,3376

Sumber : BPS Kab. Banyumas, 2018 dan Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2019.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan provinsi Jawa Tengah, maka pembangunan Kabuptaen Banyumas Tahun 2020 dititikberatkan pada peningkatan ekonomi didukung pelayanan dasar yang berkaulitas. Kondisi ini akan dicapai dengan upaya sebagai berikut :

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan pariwisata.
2. Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industry barang maupun jasa termasuk ekonomi kreatif.
3. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur dsb).
5. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam rangka peningkatan pendapatan.
6. Mengembangkan ketenagakerjaan inklusi.
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Gouvernance);
8. Antisipasi cuaca ekstrem.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD 2018-2023, tahun kedua, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Perencanaan Pendapatan daerah pada RKPD Perubahan tahun 2020 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Pada masa Pandemi COVID-19, pendapatan daerah diasumsikan turun sebesar 7,03% dari APBD Induk tahun 2020 dengan penurunan terjadi pada PAD dan Dana Perimbangan. Dari komponen PAD terjadi penurunan pada Pajak Daerah sebesar 26,62 %, hal ini dikarenakan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 070/1567/2020 tentang pembebasan Pembayaran Pajak Hotel Selama Masa Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) dan Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 970/1568/2020 tentang Pembebasan Pembayaran

Pajak Restoran Selama Masa Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (COVID-19) dan dengan adanya pandemi COVID 19 juga berdampak pada pendapatan pajak daerah lainnya seperti pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak parkir dan lainnya.

3. Dana perimbangan yang bersumber dari bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak, meningkat sebesar 8,08%. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan turun, DAU turun sebesar 9,81% dan DAK turun sebesar 12,41%.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar 4,97%. sumber-Untuk sumber pendapatan lain-lain, yaitu bersumber dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Banyumas, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi informasi;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan asset daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
5. Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

Pendapatan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.3.317.781.580.874,00 menurun sebesar Rp.250.787.182.870,00 dari pendapatan daerah pada APBD Induk tahun 2020 sebesar Rp. 3.568.568.763.744,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah menurun sebesar Rp.101.894.850.201,00 dari Rp. 729.892.819.015,00 menjadi Rp.627.997.968.814,00 terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah menurun sebesar Rp.73.341.674.540,00 dari Rp.275.500.000.000,00 menjadi Rp.202.158.325.460,00.
 - b. Retribusi Daerah menurun sebesar Rp.11.692.326.070,00 dari Rp.31.982.177.000,00 menjadi Rp.20.289.850.930,00.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp.2.179.855.319,00 dari Rp.13.498.113.685,00 menjadi sebesar Rp.15.667.969.004,00,00.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurun sebesar Rp.19,040.704.910,00 dari Rp.408.912.528.330,00 menjadi sebesar Rp.389.871.823.420,00.
2. Dana Perimbangan turun sebesar Rp.188.249.619.669,00 dari Rp.2.046.987.459.669,00 Anggaran APBD Induk Tahun 2020 menjadi sebesar Rp.1.8858.737.840.000,00 terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/ bagi Hasil Bukan Pajak meningkat sebesar Rp.4.404.165.331,00 dari Rp.42.143.125.669,00 menjadi sebesar Rp.45.547.291.000,00.
 - b. Dana Alokasi Umum turun sebesar Rp. 143.316.248.000,00 dari Rp.1.461.114.316.000,00 menjadi sebesar Rp.1.3117.798.068.000,00.
 - c. Dana Alokasi Khusus turun sebesar Rp.48.337.537.000,00 dari sebesar Rp.543.730.018.000,00 menjadi sebesar Rp.495.392.481.000,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar Rp.39.357.287.000,00 dari Rp.791.688.485.060,00 menjadi Rp.831.045.772.060,00 terdiri dari :
 - a. Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp.18.599.000.000,00 dari Rp.171.141.807.000,00 menjadi Rp.189.749.807.000,00.
 - b. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya tetap Rp.198.568.100.060,00.
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus turun sebesar Rp.3.855.713.000,00 dari Rp.421.978.578.000,00 menjadi sebesar Rp.418.122.865.000,00.

- d. Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar dianggarka. pada APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp.24.614.000.000,00.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pada tahun 2020 ini Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan terkait dengan dana transfer untuk daerah dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19, antara lain:

1. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 Tentang Refocusing Anggaran Kegiatan, Realokasi Anggaran serta pengadaan Barang dan jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan penggunaan DBH, DAU dan DID Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6/KM.7/2020 tentang penyaluran DAK fisik bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional dalam rangka pencegahan dan atau penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemda.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan DAK bidang Kesehatan untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).
6. Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan barang / jasa Nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1692020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan penyakit infeksi *emerging* tertentu.
8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA. 2020.
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dengan adanya kebijakan tersebut diatas, disamping berdampak terhadap pendapatan daerah juga berdampak terhadap penurunan belanja daerah, semula besarnya belanja pada APBD Induk tahun 2020 dari sebesar Rp.3.743.918.763.744,00 turun menjadi Rp.3.534.336.704.355,00 atau berkurang sebesar Rp.209.582.059.389,00 atau sebesar 5,60%.

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
6. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
7. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung diutamakan untuk membiayai 9 (sembilan) program prioritas pembangunan Tahun 2020.
8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Anggaran Belanja Daerah pada perubahan tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp.3.743.918.763.744,00 menurun sebesar Rp.209.582.059.389,00 dibanding rencana belanja pada APBD Induk tahun 2020 sebesar Rp.3.743.918.763.744,00. Anggaran tersebut rencana akan digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.2.153.983.046.380,00 dan belanja langsung sebesar Rp.1.380.353.657.975,00 sehingga pada perubahan Tahun Anggaran

2020 terjadi defisit anggaran sebesar Rp.216.555.123.481,00 dari pendapatan. Anggaran belanja tidak langsung tersebut dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Anggaran belanja langsung dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan fungsi dan urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan.

3.2.3.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

1. Belanja Pegawai

- a. Penganggaran belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perencanaan belanja pegawai memperhitungkan accres gaji 1% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai
- c. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- d. Belanja pegawai turun sebesar Rp.25.655.231.850,00 menjadi sebesar Rp.1.430.360.799.153,00 dari belanja awal sebesar Rp.1.456.016.031.003,00 yang digunakan untuk melaksanakan adanya kebijakan Pemerintah terkait pembayaran iuran BPJS yang semula 3:2 tapi sekarang 4:1, dimana iuran BPJS 4% itu menjadi tanggungan Pemerintah, 1% ditanggung oleh PNS, termasuk adanya kenaikan iuran BPJS

2. Hibah

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/ atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Belanja hibah mengalami penurunan sebesar Rp.1.557.700.000,00 dari Rp.41.345.850.000,00 pada belanja awal tahun 2020 menjadi

Rp.39.788.150.000,00 pada belanja perubahan tahun 2020, penurunan terjadi digunakan untuk kegiatan pencegahan dan atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

3. Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok anggota masyarakat secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya. Bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp.13.190.000.000,00 dari Rp.24.740.470.600,00 pada belanja awal tahun 2020 menjadi Rp.11.550.470.600,00 pada belanja perubahan tahun 2020.

4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa menurun sebesar Rp.8.503.400.061,00 dari belanja awal sebesar Rp.30.748.217.700,00 menjadi sebesar Rp.22.244.817.639,00.

5. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Desa dan Partai Politik menurun sebesar Rp.114.212.894.850,00 dari belanja awal sebesar Rp.651.499.237.017,00 menjadi sebesar Rp.537.286.342.167,00 pada belanja perubahan tahun 2020, penurunan terjadi digunakan untuk kegiatan pencegahan dan atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa. Bantuan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa penerima bantuan keuangan, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa.

6. Belanja tidak terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial). Belanja tidak terduga dalam rangka pencegahan dan atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, pada perubahan tahun 2020 meningkat sebesar Rp.107.752.466.821,00 dari belanja awal Rp.5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.112.752.466.821,00.

3.2.3.2. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Anggaran Belanja Langsung untuk perubahan Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.1.381.353.657.975,00 menurun sebesar Rp.153.215.299.449,00 dari anggaran induk Rp.1.534.568.957.424,00. Penurunan terjadi digunakan untuk kegiatan pencegahan dan atau penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA, untuk besarnya Anggaran SiLPA untuk perubahan Tahun 2020 sebesar Rp.242.705.123.481,00 naik sebesar Rp. 42.705.123.481,00 dari anggaran induk 2020 sebesar Rp.200.000.000.000,00. Disamping dari SiLPA penerimaan pembiayaan juga diperoleh dari penerimaan kembali pemberian pinjaman dana bergulir untuk besarnya sama baik pada APBD Induk 2020 maupun APBD Perubahan 2020 yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah tetap tidak ada penambahan pada APBD Perubahan 2020 yaitu sebesar Rp. 28.150.000.000,00. Untuk pemberian pinjaman

daerah dalam bentuk dana bergulir kepada usaha mikro-kecil pada APBD Perubahan 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 naik sebesar Rp.1.500.000.000,00 dari anggaran induk 2020 sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan

Pembiayaan neto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan APBD 2020 sebesar Rp. 216.555.123.481,00 naik sebesar Rp. 41.205.123.481,00 dari anggaran induk 2020 sebesar Rp.175.350.000.000,00. Pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

Tabel 3.4.

Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

No.	Uraian	APBD Induk Th. 2020 (Rp)	RKPD-Perubahan Th. 2020 (Rp)	+/- (Rp)	%
1.	PENDAPATAN	3.568.568.763.744,00	3.317.781.580.874,00	(250.787.182.870,00)	(7,03)
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	729.892.819.015,00	627.997.968.814,00	(101.894.850.201,00)	(13,96)
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	275.500.000.000,00	202.158.325.480,00	(73.341.674.540,00)	(26,62)
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	31.982.177.000,00	20.289.850.930,00	(11.692.326.070,00)	(36,56)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.498.113.685,00	15.667.969.004,00	2.179.855.319,00	16,15
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	408.912.528.330,00	389.871.823.420,00	(19.040.704.910,00)	(4,66)
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.046.987.459.669,00	1.858.737.840.000,00	(188.249.619.669,00)	(9,20)
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.143.125.669,00	45.547.291.000,00	3.404.165.331,00	8,08
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.461.114.316.000,00	1.317.798.068.000,00	(143.316.248.000,00)	(9,81)
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	543.730.018.000,00	495.392.481.000,00	(48.337.537.000,00)	(12,41)
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	791.688.485.060,00	831.045.772.060,00	39.357.287.000,00	4,97
1.3.1.	Pendapatan Hibah	171.141.807.000,00	189.749.807.000,00	18.599.000.000,00	10,87
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	198.568.100.060,00	198.568.100.060,00	-	0,00
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	421.978.578.000,00	418.122.865.000,00	(3.855.713.000,00)	(0,91)
1.3.4.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	24.614.000.000,00	24.614.000.000,00	-
2.	BELANJA	3.743.918.763.744,00	3.534.336.704.355,00	(209.582.059.389,00)	(5,60)
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.209.349.806.320,00	2.153.983.046.380,00	(55.366.759.940,00)	(2,51)
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.456.016.031.003,00	1.430.360.799.153,00	(25.655.231.850,00)	(1,76)
2.1.2.	Belanja Hibah	41.345.850.000,00	39.788.150.000,00	(1.557.700.000,00)	(3,77)
2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	24.740.470.600,00	11.550.470.600,00	(13.190.000.000,00)	(53,31)
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	30.748.217.700,00	22.244.817.639,00	(8.503.400.061,00)	(27,65)

No.	Uraian	APBD Induk Th. 2020 (Rp)	RKPD-Perubahan Th. 2020 (Rp)	+/- (Rp)	%
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan	651.499.237.017,00	537.286.342.167,00	(114.212.894.850,00)	(17,53)
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	112.752.466.821,00	107.752.466.821,00	2.155,05
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.534.568.957.424,00	1.381.353.657.975,00	(153.215.299.449,00)	(9,98)
2.2.01	Belanja Pegawai	29.680.815.508,00	26.633.049.008,00	(3.047.766.500,00)	(10,27)
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.007.543.934.515,00	967.683.915.299,00	(89.560.718.026,00)	(3,96)
2.2.03	Belanja Modal	497.344.207.401,00	387.036.693.668,00	(110.307.513.733,00)	(22,18)
SURPLUS/(DEFISIT)		(175.350.000.000,00)	(216.555.123.481,00)	(41.205.123.481,00)	23,50
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	205.000.000.000,00	247.705.123.481,00	42.705.123.481,00	20,83
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.000.000.000,00	242.705.123.481,00	42.705.123.481,00	21,35
3.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	29.650.000.000,00	31.150.000.000,00	1.500.000.000	5,06
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.150.000.000,00	28.150.000.000,00	-	0,00
3.2.2.	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	100
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		175.350.000.000,00	216.555.123.481,00	41.205.123.481,00	23,50
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		-	-	-	-

Sumber : Dappeda, BAPENDA dan BPKAD Kabupaten Banyumas, 2020.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Penyusunan dokumen RKPD 2020 berpedoman pada RPJMD 2018-2023, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Visi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Pencapaian perwujudan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Dalam implementasi rencana pembangunan tahun 2020, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 dituangkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2020 beserta target kinerja yang akan dicapai di tahun 2020.

Pandemi Covid-19 yang diikuti dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melakukan *refocussing* program/kegiatan dan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Hal ini berdampak pada target kinerja yang telah direncanakan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 serta penyesuaian proyeksi target kinerja tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2020	Target Perubahan RKPD
1	Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi				68	68
				Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN		83.4	83.4
				Meningkatnya integritas pemerintahan Daerah	Indeks Persepsi Korupsi		3.50	3.50
				Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		74	74
					Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2.90	2.90
2	Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat			72.55	72.55
					Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.55	7.55
					Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.08	13.08

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2020	Target Perubahan RKPD
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)		73.63	73.63
					Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup		67.50	67.50
					Prevalensi Gizi Buruk	%	0.07	0.07
		Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	Persentase penduduk miskin			%	11.53	11,53-12,53
				Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin	Persentase penurunan penduduk miskin	%	0.98	0,98
				Meningkatnya penanganan bencana	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	%	42.3	42.3
			Indeks Gini				0.307	0,2366
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67.50	67.50
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87.64	87.64
					Nilai Kabupaten Layak Anak		600	600
			Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)				0.3376	0,3376
				Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Indeks Desa Membangun		0.674	0,674
			PDRB per kapita			juta rupiah	33.000	33.000
				Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.85	0.85
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	6.45	2,5-3,5
					Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	%	4.48	
			Nilai Tukar Petani (NTP)				101.33	
				Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan	Persentase Pertumbuhan PDRB-sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan	%	3.58	

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2020	Target Perubahan RKPD
				perlindungan kepada petani				
4	Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agribisnis untuk ketersediaan pangan utama	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Persentase Penguatan cadangan pangan	% %	74.01 95 80	
5	Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	Pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya	Nilai investasi di kawasan industri	% Milyar Rupiah	2 0	0
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	63.88 99.982	63.88 99.982
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Daya Saing Infrastruktur	% %	54.40 80.01 80.01	54.40 80.01
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)	Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	Persentase pertumbuhan desa wisata	% %	5.86 64.29	
			Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	Meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM dan IKM melalui pemanfaatan IPTEK	Persentase Pertumbuhan UMKM dan IKM	% %	5 0.46	
			Tingkat			%	4.23	4,5-5,5

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2020	Target Perubahan RKPD
			Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya kesempatan berusaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66.49	
8.	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara	Persentase penurunan konflik sosial	%	56	
			Angka Kriminalitas			Kasus	792	
				Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram	Angka Kriminalitas	Kasus	792	
			Indeks Demokrasi				79.30	79.30
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Indeks Demokrasi		79.30	79.30
			Persentase Pelestarian Budaya Banyumas			%	47.47	47.47
				Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	47.47	47.47

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 merupakan keberlanjutan dari fokus tahun sebelumnya. Selain merupakan penjabaran RPJMD, pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

Rencana pembangunan nasional tahun 2020 diprioritaskan pada 5 (lima) prioritas dan program prioritas yaitu:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan arah kebijakan meliputi:
 - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan;

- b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk;
- d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan;
- e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Pengentasan kemiskinan;
 - f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan arah kebijakan meliputi;
- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau;
 - b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju;
 - c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan;
 - d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik;
 - e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan;
 - f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar;
 - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana;
 - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan;
 - e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, dengan arah kebijakan meliputi:
- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM;
 - b. Mempercepat transformasi struktural;
 - c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing;
 - d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi;
 - e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM;
 - b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil;
 - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
 - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan arah kebijakan meliputi:
- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi;
 - b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas;
 - c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air;

- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim;
- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air;
 - c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT);
 - d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan;
 - e. Penguatan ketahanan bencana.
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, dengan arah kebijakan meliputi:
- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan;
 - b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional;
 - c. Menegakkan hukum dan anti korupsi;
 - d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas;
 - e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2020, maka dalam RKP Tahun 2020 ditetapkan target sasaran makro pembangunan Nasional tahun 2020 yaitu:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,51 (Retargeting 2021: 72,78-72,90)
- Tingkat Kemiskinan 8,5 -9,0 % (Retargeting 2021: 9,2-9,7)
- Pertumbuhan Ekonomi 5,3 -5,5 % (Retargeting 2021: 4,1-5,0)
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,8-5,1 % (Retargeting 2021: 7,5-8,2)
- Indeks Gini Rasio 0,375 -0,380 (Retargeting 2021: 0,33-0,35)

b. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada:
 - a. Pengurangan Kemiskinan:
 - 1) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya antara lain melalui akses pendidikan (Beasiswa Siswa Miskin, penyelenggaraan SMK Negeri *Boarding School*, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK, vokasi bidik miskin); cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; Kartu Jateng Sejahtera; stimulan lumbung pangan pada daerah rawan pangan; bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik; pemenuhan kebutuhan dasar PMKS; kemudahan akses memperoleh dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin.
 - 2) Penguatan *sustainable livelihood* melalui: fasilitasi akses terhadap modal, manajemen dan pasar; Pengembangan *start up* wirausaha baru; Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya dengan peningkatan peran dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes); peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia).

- 3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui Program "Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan" dengan gotong-royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan.
- 4) Penguatan SDM pengelola BDT dalam verifikasi dan validasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, program/kegiatan maupun lokasi intervensi serta pengintegrasian penanganan kemiskinan

b. Menurunkan angka pengangguran:

- 1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program *link and match*.
 - 2) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan *friendly* bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum.
 - 3) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah, fokus pada:
- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui: peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis *skill knowledge/attitude* dan *learning culture*, penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; peningkatan literasi masyarakat; pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat diantaranya dengan pemanfaatan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk kegiatan kebudayaan masyarakat.

- b. Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, melalui: Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanganan stunting, penuntasan ODF, peran Posyandu); Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan; Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan; Pembudayaan/pemassalan olahraga kepada masyarakat didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
 - c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; peningkatan akses politik untuk perempuan; serta pencegahan perdagangan manusia.
 - d. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun non potensial antara lain melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, pelayanan penyakit ketuaan (senescent diseases) dan degeneratif, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, prasarana dan sarana umum serta bantuan hukum, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta pemberian literasi tentang pentingnya tabungan (savings) sebagai bentuk jaminan perlindungan hari tua;
 - e. Keterpaduan antar daerah dan sektor dalam upaya pengendalian kependudukan melalui penyusunan kebijakan pembangunan kualitas kependudukan.
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana, fokus pada:
 - a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian, melalui peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian; penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani; pengembangan pertanian terintegrasi melalui agriculture estate yaitu integrasi hulu-hilir dan kerjasama antara kelompok tani dengan BUMD pangan dalam bentuk korporasi, dengan konsolidasi lahan dan usaha pada petani dengan lahan sempit, didukung

pinjaman kredit dari perbankan dan jaminan kredit dari BUMD penjamin kredit; perbaikan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi di 28 Daerah Irigasi kewenangan Provinsi, waduk/embung dan tampungan air lainnya serta upaya menjaga ketersediaan air melalui revitalisasi embung di 8 lokasi (Embung Sempu, Empung Bendungan, Embung Turi Sundang, Embung Kembang Kabupaten Wonogiri; Embung Sokoagung, Embung Bagelen (Lanjutan) Kabupaten Purworejo; Embung Siandong, Embung Tembelang Kabupaten Brebes);

- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan kapasitas usaha perikanan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan/asuransi nelayan termasuk di dalamnya akses teknologi dan permodalan; peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap; peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolahan ikan; serta perbaikan tata niaga perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 m3 dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah untuk menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok dengan cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar.
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja; peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri (standarisasi produk dan inovasi produk); pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri kecil dan menengah (modal, pemasaran dan standarisasi produk); pengembangan

bahan baku industri *substitusi imper*, penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi; integrasi antar sektor pendukung.

- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah. Implementasinya dilakukan dengan Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata; Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi; Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata; Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui: Perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka; Pengembangan *digital investment promotion*; Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usaha
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan, melalui peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah perdesaan, dan wilayah kemiskinan dengan fasilitasi pengembangan bandara berupa pengadaan tanah Pembangunan Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga (Tahap II), Ngloram Cepu (Tahap I) dan Dewadaru Karimunjawa (Tahap II); peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan Nasional dan Kabupaten/Kota; fasilitasi reaktivasi jalur kereta api Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang; KedungjatiTuntang-Ambarawa-Magelang dan Purwokerto-Wonosobo (Tahap II); konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur,

Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan Purwomanggung, sertapeningkatan Terminal Tipe B utamanya untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan dan peningkatan PKL ke PKW; perbaikan sarpras perdesaan, peningkatan jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY serta menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakeb, Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor;

- i. Peningkatan kualitas lingkungan melalui penerapan PerencanaanPembangunan Rendah Karbon (PPRK) dimulai pada sektor energi danlimbah; pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan; konservasi lingkungan; serta pemulihan kembali lingkungan;.
 - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana melalupengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistemperingatan dini (*early warning system*) berbasis masyarakat, pengembangan kurikulum pendidikan kebencanaan, pengurangan risiko bencana lintas sektor, dan inventarisasi daerah terdampak bencana.
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada :
- a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik antara lain melalui kunjungan lapangan (*roadshow*) dalam rangka menuju nilai IKM 82;
 - b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasidalam birokrasi (*digitalisasi tata kelola pemerintahan*) dalam rangka menuju nilai SPBE 2,88.
 - c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabelmelalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (*penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi*

pembangunan daerah secara terpadu dan responsif) dalam rangka mendukung pencapaian nilai SAKIP 82 (A) dan "menuju AA"; penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah melalui perkuatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menuju level 3,2, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi *quality assurance* dan *consulting partner* dalam rangka mencapai tingkat kapabilitas APIP sampai pada level 3, serta pengendalian dan penegakan produk hukum.

- d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui manajemen pengelolaan ASN berdasarkan sistem merit secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan, penilaian, penataan, pengembangan kompetensi, pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan, promosi terbuka/talent scouting, analisis jabatan, penegakan disiplin, pengembangan jabatan fungsional tertentu) dalam rangka mencapai nilai indeks sistem merit 0,68 (Baik); perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur sampai dengan dampak (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA.
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal melalui pemberdayaan 300 Kader Siaga Trantibum (KST).

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2020 yang meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,4 - 5,7 %. (Retargeting 2021: 4,1-5,0)
- b. PDRB per kapita sebesar Rp. 39,25 juta. (Retargeting 2021: Rp. 41,15 juta)
- c. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$.

- d. Kemiskinan turun menjadi 9,81- 8,81% (Retargeting 2021: 10,96-11,80)
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33%. (Retargeting 2021: 4,80%-5,80%)
- f. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,00. (Retargeting 2021: 72,77)
- g. Indeks Gini sebesar 0,34. (Retargeting 2021: 0,33-0,35)
- h. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,06. (Retargeting 2021: 87,65)
- i. Indeks Williamson sebesar 0,59. (Retargeting 2021: 0,58).

c. Pokok – Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan **hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat** dan/atau pemerintah daerah digunakan sebagai salah satu landasan penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2020. Pokok- pokok pikiran dimaksud yang harus mendapat perhatian dari eksekutif guna mengakomodir dalam RKPD tahun 2020, mencakup:

1). Bidang Infrastruktur

Peningkatan kualitas jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses dan aktivitas perekonomian, pendidikan dan kesehatan, penataan saluran drainase untuk menangani permasalahan genangan, revitalisasi jaringan irigasi dan embung untuk peningkatan produksi pertanian.

2). Bidang Pemerintahan

- Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik;
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi.

3). Bidang Perekonomian

Peningkatan produksi pertanian dengan penyediaan saprodi, penggunaan teknologi pertanian; Peningkatan sinergitas sektor pertanian, perikanan dan peternakan dalam penyediaan bahan pangan; Peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat; Pengembangan koperasi dan UMKM serta produk-produk unggulan daerah.

4). Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- Pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin berupa rumah layak huni, air bersih, sanitasi, penanganan kawasan permukiman kumuh, akses pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan;
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja;

5). Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara; Pengelolaan limbah berbasis masyarakat;

6). Bantuan Keuangan

Pemerataan pembangunan desa untuk mengurangi kesenjangan pembangunan perkotaan dan perdesaan.

d. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Misi / Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan Tahun 2020
Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat				Tema: Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal, dan Penguatan Kemandirian Pangan
1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
		2	Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah	
		3	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	
		4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu	
Misi 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan				
2	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	5	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
		6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
3	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	7	Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	4. Pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
		8	Meningkatnya penanganan bencana	

Misi / Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan Tahun 2020
		9	Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
		10	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	3. Pengurangan disparitas pendapatan masyarakat
		11	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	
Misi 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan				
4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	12	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa	
		13	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	5. Peningkatan produktivitas pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan
Misi 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan				
5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	14	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama	
Misi 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan				
6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	15	Pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya	6. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
		16	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	
Misi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan				2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur

Misi / Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan Tahun 2020
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	17	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	
Misi 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal				
8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.	18	Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	
		19	Meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM dan IKM melalui pemanfaatan IPTEK	
		20	Meningkatnya kesempatan berusaha	
Misi 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious				
9	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	21	Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara	
		22	Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram	
		23	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	
		24	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	

Tabel 4.3.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas, Prioritas Pembangunan Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020		RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
	<i>Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas</i>	<i>"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia", dengan prioritas :</i>	<i>Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal, dan Penguatan Kemandirian Pangan</i>
1	1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan; b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk;	2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah, fokus pada : b. Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, melalui : Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanganan stunting, penuntasan ODF, peran Posyandu); Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan; Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, fokus pada : a. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan akses pelayanan kesehatan; b. Peningkatan kualitas dan pemerataan prasarana, sarana serta SDM kesehatan; c. Peningkatan kesadaran hidup sehat masyarakat;

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020		RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
d.	Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan;	sumberdaya kesehatan; Pembudayaan/ pemassalan olahraga kepada masyarakat didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.	d. Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial;
e.	Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.	c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui: Pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah. a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill knowledge/ attitude dan learning culture,	e. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. f. Peningkatan pelayanan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun; g. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan; h. Peningkatan kualitas kurikulum dan tenaga pengajar;

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020		RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
		penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; peningkatan literasi masyarakat; pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat diantaranya dengan pemanfaatan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk kegiatan kebudayaan masyarakat.	i. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi setempat dalam peningkatan kualitas SDM.
		1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada : a. Pengurangan Kemiskinan : 1) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya antara lain melalui akses pendidikan (Beasiswa Siswa Miskin, penyelenggaraan SMK Negeri Boarding School, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK, vokasi bidik miskin); cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin; Kartu Jateng Sejahtera; stimulan lumbung pangan pada daerah rawan pangan; bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya	4. Pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, fokus pada : a. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin berupa rumah layak huni, air bersih, sanitasi, penanganan kawasan permukiman kumuh, akses pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan;

PRIORITAS NASIONAL			PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020			RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
			3) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.	
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, dengan arah kebijakan meliputi: a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan; b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional;		4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, fokus pada : a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui : kunjungan lapangan (road shoW) dan "jemput bola", serta membangun pemerintahan yang terbuka "open government (dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik). b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan).	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik a. Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan pembangunan.

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020		RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
c.	Menegakkan hukum dan anti korupsi;	c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan consulting partner, serta pengendalian dan penegakan produk hukum.	c. Pembangunan sarana prasarana tersentral dan terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik.

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020		RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
d.	Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas;	d. Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui: Manajemen pengelolaan ASN berdasarkan merit system secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan, penilaian, penataan, pengembangan kompetensi, pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan, promosi terbuka/ talent scouting, analisis jabatan, penegakan disiplin, pengembangan jabatan fungsional tertentu); perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur sampai dengan dampak (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.	
e.	Meningkatkan keamanan siber.	e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA. f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.	

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020		RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
3	Nilai Tambah Sektor Rill, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, dengan arah kebijakan meliputi: a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM; b. Mempercepat transformasi struktural; c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing; d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi; e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan, fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan upaya diantaranya: g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui: Perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka; Pengembangan digital investment promotion; Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usaha	3. Pengurangan disparitas pendapatan masyarakat, fokus pada : a. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah; b. Peningkatan pemerataan penyediaan sarana prasarana yang mendukung ekonomi kerakyatan; c. Peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat; d. Pengembangan pusat-pusat perdagangan baik lokal maupun regional; e. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan tenaga kerja;

PRIORITAS NASIONAL			PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020			RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
			f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah. Implementasinya dilakukan dengan : Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata; Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi; Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.	f. Pemberian kemudahan ijin investasi, perbaikan layanan dan sistem perijinan; g. Pengembangan investasi yang mengakomodir produk-produk unggulan serta mendorong perwujudan investasi hijau; h. Pengembangan promosi investasi; i. Peningkatan sarana dan prasarana ke destinasi wisata; j. Peningkatan daya saing produk wisata; k. Pengembangan citra dan promosi wisata; l. Pengembangan kelembagaan pariwisata.

PRIORITAS NASIONAL			PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020			RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
			3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui Program "Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan" dengan gotong-royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan. b. Menurunkan angka pengangguran : 1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program link and match. 2) perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan friendly bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum.	

PRIORITAS NASIONAL			PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020			RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
			air bersih, sanitasi, dan listrik; pemenuhan kebutuhan dasar PMKS; kemudahan akses memperoleh dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin. 2) Penguatan sustainable livelihood melalui : fasilitasi akses terhadap modal, manajemen dan pasar; Pengembangan start up wirausaha baru; Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya dengan peningkatan peran dan produktivitas Sadan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes); peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia).	b. Perkuatan basis data terpadu kemiskinan.

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020		RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
		e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui : pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja; peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri (standarisasi produk dan inovasi produk); pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri kecil dan menengah (modal, pemasaran dan standarisasi produk); pengembangan bahan baku industri substitusi impor; penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi; integrasi antar sektor pendukung.	m. Peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM (KUMKM) melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk UMKM sesuai dengan potensi lokal didukung dengan penerapan inovasi, kreativitas dan teknologi tepat guna; n. Perluasan akses terhadap modal dan jangkauan pemasaran, perlindungan terhadap produk KUMKM, peningkatan kapasitas SDM KUMKM, dan penguatan kelembagaan KUMKM; o. Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pengembangan klaster industri dan kemitraan; p. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UMK) melalui pengembangan peran UMKM terutama yang berorientasi ekspor, dan penguatan kelembagaan dalam rangka mendorong daya saing UMKM;

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020		RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan arah kebijakan meliputi: a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi; b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas; c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air; d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim;	a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian, melalui : Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian; Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani; Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep 'agriculture estate' (integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai potensi lokal kawasan); Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya serta upaya menjaga ketersediaan airnya. b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: Peningkatan kapasitas, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan/asuransi nelayan termasuk di dalamnya akses teknologi dan permodalan; Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap; Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolahan ikan; Perbaikan tata niaga perikanan.	5. Peningkatan produktivitas pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan, fokus pada : a. Penerapan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian; b. Pengembangan kawasan budidaya perikanan ; c. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani. d. Peningkatan kuantitas, kualitas dan nilai tambah serta pengembangan jejaring pemasaran produk pertanian dan perikanan;

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020		RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
e.	Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.	d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah untuk menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok dengan cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar. c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 m3 dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.	c. Peningkatan akses dan sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan; f. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
		i. Peningkatan kualitas air, udara, serta tutupan lahan melalui : pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan (pendidikan lingkungan mulai usia dini, pengembangan budaya hemat	6. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, fokus pada :

PRIORITAS NASIONAL			PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020			RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
			energi dan hemat air); konservasi lingkungan (rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir, konservasi energy, pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan serta audit energi); pemulihan kembali lingkungan (penanganan limbah, perijinan pemanfaatan lingkungan, penegakan hukum). j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana melalui pengembangan masyarakat tangguh	a. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. Pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara; c. Pengelolaan limbah berbasis masyarakat; d. Peningkatan konservasi mata air, situ dan embung untuk meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air; e. Peningkatan penanggulangan bencana berbasis mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana;

PRIORITAS NASIONAL			PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020			RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
			bencana, pengembangan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) berbasis masyarakat, pengembangan kurikulum pendidikan kebencanaan, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana, dan inventarisasi daerah terdampak bencana.	f. Penguatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana; g. Pengembangan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; h. Peningkatan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana.
2	1. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan arah kebijakan meliputi;		h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan, melalui : peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan dan terminal; peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan Nasional dan Kabupaten/Kota; konektivitas antar daerah dan wilayah	2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, fokus pada :
	a Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau;			a. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana transportasi ke pusat-pusat kegiatan masyarakat melalui pengembangan system transportasi masal dan antar moda, transportasi perdesaan dan perintis;

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020		RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
b	Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju;	pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur, Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan Purwomanggung, serta pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe B; peningkatan jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY serta menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakeb, Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor.	b. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan antar pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi budaya, jalur alternatif, akses kawasan wisata, perbatasan kabupaten Banyumas dengan Kabupaten tetangga, serta infrastruktur telekomunikasi.
c	Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan;		c. Peningkatan keselamatan jalan serta peningkatan sarana prasarana keselamatan perhubungan ;
d	Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik;		d. Peningkatan infrastruktur sosial dan infrastruktur dasar melalui pembangunan rumah layak huni, sanitasi (air limbah, persampahan , drainase) dan air minum, sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang aktivitas perekonomian;
e	Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan;		e. Peningkatan dan pengembangan LPJU;

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
RKP Tahun 2020		RKPD 2020 Provinsi Jawa Tengah	RKPD 2020 Kabupaten Banyumas
f	Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.		f. Peningkatan infrastruktur irigasi untuk mendukung ketahanan pangan; g. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis (terminal, sarana prasarana sumber daya air, kebinamargaan, kereta api, bandara udara), dan dukungan pengembangan infrastruktur lintas desa; h. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam rangka menjaga kualitas lingkungan dan peningkatan kuantitas RTH; i. Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait alih fungsi lahan produktif; j. Penguatan regulasi penataan ruang

Tabel 4.4.
Rekapitulasi Jumlah Anggaran Prioritas Pembangunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
1	1.a. Kualitas Sumberdaya Manusia : pemerataan keterjangkauan dan mutu pendidikan serta penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	4	4	4	950.000.000	810.000.000	181.113.460
		Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	26	26	26	4.040.000.000	4.471.109.840	623.182.802
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	5	5	39.683.000.000	38.650.000.000	37.668.863.000
			Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	46	55	55	13.620.000.000	9.043.199.000	7.219.515.590
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1	1	1	50.000.000	-	-
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	116	135	137	70.820.000.000	59.327.299.000	56.494.036.450

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat						
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat	137	221	221	138.502.000.000	142.532.730.588	139.309.873.536
		Perpustakaan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	4	4	4	790.000.000	640.000.000	286.134.960
			SUBTOTAL	339	451	453	268.455.000.000	255.474.338.428	241.782.719.798
	1.b. Kualitas Sumberdaya Manusia : Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan;	Administrasi Pemerintahan	Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian	1	1	1	135.000.000	150.000.000	161.440.331
		Kesehatan	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	2	2	2	252.300.000.000	259.300.000.000	259.300.000.000
			Program Pelayanan Kesehatan	64	64	64	149.231.297.000	162.210.023.000	168.327.746.000
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	6	6	6	6.070.000.000	6.501.993.000	6.191.295.040
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah	9	9	9	23.310.000.000	36.158.386.000	34.780.971.000

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Sakit Mata						
			Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat	1	1	1	650.000.000	187.500.000	95.476.000
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	2	2	2	8.867.474.000	9.145.061.000	9.042.751.000
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	9	9	2.440.000.000	2.471.150.000	2.433.900.000
			Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	4	4	4	4.060.000.000	350.000.000	148.906.800
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3	3	3	2.330.000.000	4.312.130.000	4.149.240.000
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	2	2	2	1.200.000.000	337.500.000	201.880.500
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	45	47	47	31.185.364.000	25.862.848.000	25.862.848.000
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	175.000.000	200.000.000	66.130.250
			Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan	1	1	1	300.000.000	200.000.000	194.000.000
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5	6	6	7.623.974.000	5.064.318.000	4.951.231.350

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
		Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	4	3	3	650.000.000	430.000.000	108.227.920
			Program Penguatan Pengarusutamaan Gender	2	2	2	230.000.000	162.500.000	61.144.089
			Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	2	2	2	500.000.000	150.000.000	48.049.000
		Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat			10			200.000.000
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			1			106.000.000
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	5	5	5	7.972.800.000	7.768.118.000	7.627.505.000
			Program Pelayanan Keluarga Berencana	5	5	5	1.310.000.000	902.102.000	779.686.000
			SUBTOTAL	173	175	186	500.540.909.000	521.863.629.000	524.838.428.280
	1.c. Kualitas Sumberdaya Manusia : Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan	Kesehatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	17	18	18	37.806.000.000	23.689.561.000	16.650.789.937

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat		1	1		150.000.000	150.000.000
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1	1	1	7.000.000.000	6.247.486.000	6.247.486.000
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	2	2	2	7.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	1	1	1	600.000.000	100.000.000	98.288.000
		Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1	1	1		382.315.000	382.314.000
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat	10	10	10			400.000.000
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah	1	1	1	50.000.000	45.000.000	45.000.000

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Menengah Pertama dan Sederajat						
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Keluarga Berencana	1	1	1	40.000.000	75.000.000	4.980.000
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2	2	2	350.000.000	100.000.000	3.331.890
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	1	1	1	100.000.000	-	-
			SUBTOTAL	37	29	29	12.206.000.000	10.813.756.000	6.015.085.352
2	2.a. Ketersediaan Infrastruktur : Peningkatan kualitas jalan dan jembatan serta penataan saluran drainase, revitalisasi jaringan irigasi dan embung	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	180.000.000	210.000.000	30.932.500
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase	2	5	5	1.500.000.000	1.095.000.000	650.000.000
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	23	35	35	29.736.000.000	28.284.776.000	21.886.725.752

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	3	8	8	1.300.000.000	1.620.000.000	776.450.000
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	2	2	625.000.000	275.000.000	76.331.200
			Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	1	1	1	2.200.000.000	750.000.000	450.000.000
			Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	3	3	3	1.800.000.000	635.000.000	-
			Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan	21	40	40	15.250.000.000	14.930.000.000	14.730.000.000
			Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	19	49	49	2.750.000.000	12.910.000.000	1.400.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	22	23	23	8.150.000.000	7.317.000.000	4.972.863.615
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	68	90	90	14.150.000.000	4.024.000.000	2.782.489.049

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Program Pengembangan Kawasan Permukiman	112	154	154	21.570.000.000	8.130.070.000	5.625.661.229
			SUBTOTAL	277	411	411	99.211.000.000	80.180.846.000	53.381.453.345
	2.b. Ketersediaan Infrastruktur : Pembangunan pusat kantor pemerintahan terpadu	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2	2	2	1.525.000.000	425.000.000	111.422.000
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung	2	2	2	640.000.000	500.000.000	183.688.794
			SUBTOTAL	4	4	4	2.165.000.000	925.000.000	295.110.794
	2.c. Ketersediaan Infrastruktur : Peningkatan penataan lingkungan permukiman kumuh dan penyediaan sarana sanitasi dan air minum	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	218	235	237	28.150.000.000	32.518.896.000	32.604.406.247
			Program Pengembangan Kawasan Permukiman	15	24	24	5.000.000.000	3.354.550.000	1.694.980.000
			SUBTOTAL	233	259	261	33.150.000.000	35.873.446.000	34.299.386.247
	2.d. Ketersediaan Infrastruktur : Peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	1	1	1	150.000.000	150.000.000	191.570.795
			Program Pengembangan Perumahan	4	4	4	4.035.000.000	620.000.000	282.397.443
			SUBTOTAL	5	5	5	4.185.000.000	770.000.000	473.968.238
	2.e. Ketersediaan Infrastruktur : Peningkatan	Administrasi Pemerintahan	Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang	1	1	1	135.000.000	112.500.000	12.424.150

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Aggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
	pemenuhan prasarana dan sarana, SDM dan manajemen transportasi umum yang terintegrasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perekonomian						
			Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1	1	1	875.000.000	500.000.000	38.589.160
		Perhubungan	Program Peningkatan Perencanaan Teknis	6	13	13	3.000.000.000	3.233.000.000	2.020.248.431
			Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	5	5	5	1.400.000.000	1.325.000.000	1.246.501.000
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	74	87	87	9.500.000.000	8.452.225.000	7.086.494.180
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	14	14	14	3.425.000.000	2.582.000.000	1.337.895.754
			Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	4	4	4	6.700.000.000	6.175.000.000	1.087.284.280
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	225.000.000	150.000.000	190.748.730
			Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	9	9	9	1.000.000.000	1.100.000.000	509.499.630
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	10	10	3.700.000.000	3.475.500.000	2.867.619.000
			Program Rehabilitasi	7	7	7	2.550.000.000	2.535.000.000	1.506.136.450

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	175.000.000	118.000.000	56.098.590
			SUBTOTAL	133	153	153	32.685.000.000	29.758.225.000	17.959.539.355
3	3.a. Pengembangan potensi daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat : Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	2	5	5	600.000.000	600.000.000	545.000
			Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	42	44	44	21.450.000.000	8.632.825.000	6.093.359.879
			Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan	9	9	9	10.000.000.000	2.990.000.000	1.852.994.547
			Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung	1	1	1	220.000.000	100.000.000	-
			Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	1	5	5	2.200.000.000	350.000.000	800.000
			Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong	11	27	27	5.625.000.000	2.200.000.000	1.585.000.000
			Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan	293	363	363	209.029.000.000	138.651.557.150	109.194.553.122
			Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan	1	2	2	5.000.000.000	1.300.000.000	-

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	1	4	4	5.000.000.000	2.850.000.000	1.050.000.000
			Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	11	34	34	14.850.000.000	9.840.000.000	3.966.544.000
			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	2	2	1.125.000.000	55.000.000	9.737.286
			SUBTOTAL	374	496	496	275.099.000.000	167.569.382.150	123.753.533.834
	3.b. Pengembangan potensi daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat : Peningkatan pemerataan penyediaan sarana prasarana yang mendukung ekonomi kerakyatan	Administrasi Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa	1	1	1	45.000.000	-	-
		Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2	2	2	1.250.000.000	845.000.000	752.734.000
			Program Pengembangan Nilai Budaya	1	1	1	350.000.000	65.000.000	-
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1	1	1	200.000.000	200.000.000	1.500.000
		Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2	2	2	1.050.000.000	2.914.066.000	1.143.000.000
		Pariwisata	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1	1	1	250.000.000	152.500.000	32.689.000
		Pekerjaan Umum dan Penataan	Program Pembangunan dan	4	62	62	83.500.000.000	34.058.600.000	9.565.266.804

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
		Ruang	Pemeliharaan Bangunan Gedung						
		Pertanahan	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	4	4	4	6.000.000.000	-	-
			SUBTOTAL	16	74	74	92.645.000.000	38.235.166.000	11.495.189.804
	3.c. Pengembangan potensi daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat : Peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat	Administrasi Pemerintahan	Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian	1	1	1	135.000.000	56.250.000	24.503.000
		Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	2	2	800.000.000	710.000.000	678.856.582
		Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1	1	1	50.000.000		
		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3	3	3	350.000.000	595.500.000	495.594.701
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan	7	7	7	1.300.000.000	1.032.500.000	291.643.763

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
		Pariwisata	Menengah						
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2	2	2	1.892.331.000	2.130.000.000	1.870.614.000
			Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1	1	1	300.000.000	115.000.000	13.825.000
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	1	1	550.000.000	300.000.000	85.311.673
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	2	2	2	900.000.000	450.000.000	361.518.450
		Perdagangan	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur	1	1	1	395.075.000	460.000.000	460.000.000
			Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II	1	1	1	436.800.000	381.000.000	381.000.000
			Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	4	4	5	8.262.985.000	7.661.383.000	9.671.101.000
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	8	8	8	509.600.000	560.000.000	355.878.650
			Program Peningkatan Pelayanan Kemetrolagian	3	3	3	1.694.680.000	485.000.000	60.759.257
			Program Pengelolaan	1	1	1	442.000.000	470.000.000	470.000.000

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I						
			Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat	1	1	1	416.000.000	440.000.000	440.000.000
			Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1	1	1	640.515.000	86.400.000	78.529.650
		perindustrian	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	1	1	52.000.000	110.000.000	44.339.188
			Penataan Struktur Industri	2	2	2	312.000.000	545.000.000	509.045.370
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	9	9	4.862.838.000	6.981.828.000	6.648.204.261
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	2	2	182.000.000	150.000.000	14.323.888
			Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4	4	4	672.007.000	730.074.669	529.349.835
		Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan kerja	7	7	7	325.000.000	327.500.000	113.463.576
			Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3	3	3	200.000.000	97.500.000	72.656.457
			Program Perlindungan dan Pengembangan	5	5	5	400.000.000	161.025.000	15.750.876

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja						
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	9	9	3.401.192.000	3.997.975.000	3.368.915.543
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	2	2	100.000.000	100.000.000	53.649.000
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	11	12	12	1.772.638.000	1.427.500.000	1.100.802.000
			transmigrasi						
			Program Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi	2	2	2	250.000.000	147.500.000	-
			SUBTOTAL	97	98	9	31.604.661.000	30.708.935.669	28.209.635.720
	3.d. Pengembangan potensi daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat : Pengembangan koperasi dan UMKM serta produk-produk unggulan daerah	Administrasi Pemerintahan	Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian	1	1	1	225.000.000	75.000.000	33.599.420
			SUBTOTAL	1	1	1	225.000.000	75.000.000	33.599.420
4	4.a. Kemiskinan dan Pengangguran :	Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan	1	1	1	2.777.891.000	3.504.486.000	3.504.486.000

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin berupa rumah layak huni, air bersih, sanitasi, penanganan kawasan permukiman kumuh, akses pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan								
		Sosial	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1	1	1	200.000.000	250.000.000	250.000.000
			SUBTOTAL	2	2	2	2.977.891.000	3.754.486.000	3.754.486.000
	4.b. Kemiskinan dan Pengangguran : Peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	2	2	750.000.000	795.000.000	257.127.000
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2	2	2	800.000.000	560.000.000	335.722.307
		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan		1	1		175.000.000	-
		Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	1	1	700.000.000	800.000.000	180.000

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1	1	1	300.000.000	152.500.000	31.642.074
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2	2	2	981.311.331	1.196.804.000	391.481.620
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	6	6	6	1.450.000.000	1.212.500.000	492.887.600
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	2	2	2	750.000.000	625.000.000	151.326.400
			Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa		2	2		100.000.000	-
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1	1	1	100.000.000		
			Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa	6	6	6	225.000.000	180.644.000	4.880.500
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	4	4	4	500.000.000	200.000.000	55.934.000
			Program Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa	4	4	4	400.000.000	537.500.000	133.822.815

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	4	4	4	575.000.000	417.500.000	71.342.000
			Program Penguatan Pengarusutamaan Gender	1	1	1	120.000.000	18.750.000	17.772.000
		Sosial	Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	3	3	3	250.000.000	120.000.000	98.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	8	8	8	2.696.400.000	2.525.000.000	2.267.650.737
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	35.000.000	22.500.000	5.459.500
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	7	7	7	1.065.000.000	1.207.500.000	738.193.150
			Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil	8	8	8	1.700.000.000	1.156.250.000	483.311.024
			Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	26	26	26	2.092.000.000	2.886.250.000	1.173.359.262
			SUBTOTAL	89	92	2	15.489.711.331	14.888.698.000	6.710.091.989
4.c. Kemiskinan dan Pengangguran :		Penanaman Modal	Program Penyulapn Potensi Sumber Daya,	3	3	3	300.000.000	100.000.000	11.062.100

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
	Peningkatan investasi yang berbasis padat karya		Sarana dan Prasarana Daerah						
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	3	3	3	280.000.000	188.500.000	30.626.000
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1	1	1	100.000.000	75.000.000	36.570.000
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	2	2	100.000.000	28.500.000	5.174.400
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	9	9	3.910.000.000	4.085.000.000	3.836.355.176
			SUBTOTAL	18	18	18	4.690.000.000	4.477.000.000	3.919.787.676
5	5.a. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan : Peningkatan produksi padi dengan penyediaan saprodi, penggunaan teknologi pertanian dan pembinaan kelompok tani secara berkelanjutan	Pertanian	Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian	5	5	5	2.648.194.000	1.263.553.000	907.443.450
			Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian	1	1	1	550.000.000	300.000.000	77.399.130
			Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2	2	2	4.790.000.000	640.000.000	131.647.058

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKP	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKP	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	4	4	4	2.620.000.000	1.225.000.000	555.810.500
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	14	14	14	11.123.454.000	6.595.000.000	2.736.596.000
			Program Penyediaan Benih Pertanian	1	1	1	500.000.000	300.000.000	291.000.000
			Program Perlindungan Tanaman	1	1	1	385.000.000	123.750.000	93.523.900
			SUBTOTAL	28	28	8	22.616.648.000	10.447.303.000	4.793.420.038
	5.b. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan : Peningkatan sinergitas sektor pertanian, perikanan dan peternakan dalam penyediaan bahan pangan	Kelautan dan perikanan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	3	3	3	450.000.000	260.000.000	43.566.550
			SUBTOTAL	3	3	3	450.000.000	260.000.000	43.566.550
	5.b. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan : Peningkatan sinergitas sektor pertanian, perikanan dan peternakan dalam penyediaan bahan pangan	Kelautan dan perikanan	Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar	1	1	1	200.000.000	350.000.000	350.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1	1	1	225.000.000	216.500.000	269.500.000
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	100.000.000	75.000.000	30.305.500

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
		Pertanian	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	1	1	1	150.000.000	75.000.000	11.376.150
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	5	5	5	750.000.000	994.982.000	270.191.780
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1	1	1	100.000.000	100.000.000	215.500.000
			Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT	1	1	1	477.000.000	400.000.000	400.000.000
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	3	3	3	200.000.000	90.000.000	34.047.560
			Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan	2	2	2	330.000.000	200.000.000	44.993.000
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	1	1	1	200.000.000	286.000.000	233.000.000
			Program Penyediaan Daging Ternak ASUH	1	1	1	200.000.000	200.000.000	200.000.000
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3	3	3	1.900.000.000	2.016.580.000	959.922.300
			SUBTOTAL	21	21	21	4.832.000.000	5.004.062.000	3.018.836.290
	5.c. Pertanian mendukung Kedaulatan	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas	1	1	1	180.000.000	93.750.000	15.000.000

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
	Pangan : Optimalisasi kerjasama kerjasama dengan lembaga/pelaku usaha distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok	Pangan	Penyelenggaraan Pemerintahan						
			Program Penguatan Cadangan Pangan	4	4	4	990.000.000	595.000.000	505.331.825
			SUBTOTAL	5	5	5	1.170.000.000	688.750.000	520.331.825
	5.d. Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan : Peningkatan panganekaragaman pangan dengan memanfaatkan lahan untuk penyediaan bahan pangan lokal	Pangan	Program Peningkatan Pola Pangan Harapan	4	4	4	550.000.000	595.000.000	446.810.010
			SUBTOTAL	4	4	4	550.000.000	595.000.000	446.810.010
6	6.a. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		4	4		2.250.000.000	2.770.873.250
			Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		4	4		432.500.000	292.674.000
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	14	14	14	5.050.000.000	-	-
			Program Peningkatan	1	1	1	25.000.000	-	-

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	10	10	1.225.000.000	1.287.000.000	1.206.600.000
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	1	1	1	500.000.000	-	-
		Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	9	9	2.900.000.000	3.295.966.350	3.105.546.350
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	30.000.000	-	-
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	8	8	8	800.000.000	531.195.000	224.555.300
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	85	88	89	9.073.000.000	5.876.000.000	2.532.873.616
			SUBTOTAL	129	140	141	19.603.000.000	13.672.661.350	10.133.122.516
		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		2	2		206.250.000	700.000
			Program Penataan Sistem Dasar		1	1		56.250.000	-

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
	dan udara		Penanggulangan Bencana						
			Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		3	3		168.750.000	31.201.151
		Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	3	3	3	2.810.000.000	564.800.000	555.900.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	6	6	1.000.000.000	287.500.000	80.925.400
		Pertanahan	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1	1	1	300.000.000	200.000.000	101.286.600
			SUBTOTAL	10	16	16	4.110.000.000	1.483.550.000	770.013.151
6.c. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Pengelolaan limbah berbasis masyarakat	Lingkungan Hidup		Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA / TPST	1	1	1	1.200.000.000	1.616.850.000	1.616.850.000
			Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Ajibarang	1	1	1	990.000.000	1.078.965.000	1.078.965.000
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	63	63	66	32.384.500.000	10.894.137.000	6.121.995.783

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Sumpluh	1	1	1	990.000.000	877.880.000	877.880.000
			Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Wanggon	1	1	1	990.000.000	941.840.900	941.840.900
			Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Banyumas	1	1	1	900.000.000	777.013.250	777.013.250
			Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Kembaran	1	1	1	990.000.000	875.727.500	875.727.500
			Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Purwokerto	1	1	1	4.000.000.000	7.201.112.000	7.201.112.000
			SUBTOTAL	70	70	73	42.444.500.000	24.263.525.650	19.491.384.433
	6.d. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Peningkatan konservasi mata air, situ dan embung untuk meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air	Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	6	6	6	600.000.000	321.476.277	32.757.000

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			SUBTOTAL	6	6	6	600.000.000	321.476.277	32.757.000
7	7.a. Tata Kelola Pemerintahan : Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	2	2	2	375.000.000	345.000.000	229.809.800
			Program Penataan Administrasi Peristiwa Kependudukan	6	6	6	6.346.938.000	7.698.836.000	6.916.333.429
			Program Pengelolaan Informasi Adminduk	2	2	2	950.000.000	900.000.000	606.244.940
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	50.000.000	50.000.000	4.455.500
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	9	9	1.493.662.000	1.439.400.000	1.450.922.200
			Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	3	3	3	150.000.000	165.000.000	29.761.770
			Program Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD dan Sekretariat	1	1	1	4.700.000.000	5.313.200.000	3.763.200.000
			Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	2	2	2	6.100.000.000	8.978.800.000	6.778.800.000
			Program Fasilitasi Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum	4	4	4	9.550.000.000	9.572.600.000	6.922.600.000

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Program Informasi dan Layanan Hukum	4	4	4	432.000.000	280.000.000	44.751.900
			Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan	2	2	2	1.300.000.000	900.000.000	750.000.000
			Program Pembinaan Keagamaan	4	4	4	2.970.000.000	2.884.998.000	1.207.156.412
			Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	3	3	3	495.000.000	232.500.000	98.919.800
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	1	1	270.000.000	550.000.000	451.256.775
			Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	3	3	1.655.900.000	2.025.000.000	1.036.240.470
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	28	28	28	888.550.000	336.304.000	336.304.000
			Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	3	3	3	1.311.750.000	875.000.000	540.470.002
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	258	258	258	31.493.732.686	25.890.339.000	23.650.243.839
			Program Peningkatan Peran Kecamatan dan	651	672	672	64.007.588.000	45.359.982.100	45.359.982.100

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			kelurahan						
			Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa	1	1	1	90.000.000	-	-
			Kearsipan		2	2		252.500.000	64.996.500
			Program perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan						
			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	3	3	3	415.000.000	97.500.000	82.798.670
		Kepegawaian	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	10.000.000	-	-
		Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3	3	3	1.200.000.000	1.200.000.000	776.385.371
			Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	2	2	2	150.000.000	75.000.000	-
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	80.000.000	50.000.000	4.140.000
			Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	3	3	3	3.700.000.000	1.815.000.000	1.347.433.729

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	9	9	2.150.000.000	2.885.000.000	2.694.184.413
		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	6	6	6	1.371.700.000	1.976.028.000	1.213.218.294
			Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	3	3	3	2.000.000.000	1.435.050.000	1.383.998.141
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	11	11	11	2.805.000.000	2.988.987.000	2.881.124.681
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	40.000.000	15.000.000	1.915.000
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3	3	3	948.000.000	976.460.000	751.666.093
			Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum	4	4	4	360.000.000	280.100.000	232.883.709
			Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	2	2	330.000.000	-	-
		Keuangan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan		1	1		50.000.000	28.800.000

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
		Komunikasi dan Informatika	dan Pelaporan Perangkat Daerah						
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	3	10	10	1.100.000.000	1.879.228.000	1.830.612.832
			Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	9	9	9	1.750.000.000	2.812.500.000	2.946.277.000
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3	3	3	425.000.000	200.000.000	46.401.250
			Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	3	3	3	2.650.000.000	6.596.500.000	6.542.045.708
			Program Pengembangan E Government	4	4	4	1.375.000.000	1.400.000.000	911.303.559
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	9	9	1.850.000.000	1.938.000.000	1.656.061.000
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	100.000.000	49.500.000	14.758.570
		Pangan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1	1	1	954.920.000	1.008.020.000	1.008.020.000
		Parwisata	Program Pengembangan	1	1	1	120.000.000		

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Destinasi Pariwisata						
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	1	1	1	350.000.000	150.000.000	16.322.700
		Penanaman Modal	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	1	1	125.000.000	55.000.000	40.000.000
			Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan	2	2	2	400.000.000	110.000.000	31.713.150
		Pendidikan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1	1	1	300.000.000	449.000.000	449.000.000
			Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan	27	27	27	3.510.000.000	2.241.250.000	2.241.250.000
		Persandian	Program Peningkatan Keamanan Informasi	4	4	4	450.000.000	348.500.000	299.385.380
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	4	4	4	900.000.000	857.900.000	857.900.000
		Statistik	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	3	3	3	250.000.000	75.000.000	13.810.000
			SUBTOTAL	1.117	1.148	1.148	166.799.740.686	148.063.982.100	130.545.858.687
	7.b.Tata Kelola Pemerintahan; Peningkatan kualitas	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	2	2	2	30.000.000	15.000.000	-

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
	penyelenggaraan pemerintahan melalui sinergitas, keterpaduan, inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan pembangunan dan pencegahan KKN	Administrasi Pemerintahan	Perangkat Daerah						
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	10	10	2.350.000.000	2.141.000.000	1.861.222.532
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2	2	2	525.600.000	350.000.000	87.151.926
			Program Pelayanan Keprotokolan	1	1	1	594.000.000	225.000.000	144.682.500
			Program Kesra	2	2	2	655.000.000	1.150.000.000	753.141.084
			Program Informasi dan Layanan Hukum	2	2	2	540.000.000	795.000.000	373.362.000
			Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	2	2	2	292.500.000	116.250.000	46.746.767
			Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian	2	2	2	335.250.000	125.000.000	16.452.450
			Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	1	1	135.000.000	225.000.000	50.560.968
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	6	6	6	6.220.000.000	6.354.800.000	5.659.325.538
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	90.000.000	90.000.000	20.350.475

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	2	2	2	472.500.000	600.000.000	476.690.200
		Kearsipan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	40.000.000	30.000.000	4.719.345
		Kearsipan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	9	9	3.851.000.000	3.230.000.000	2.990.100.000
		Kelautan dan perikanan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	8	8	8	2.367.840.000	2.213.685.000	1.995.842.212
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	345.000.000	350.000.000	228.616.000
		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	7	7	7	850.000.000	533.500.000	188.037.000
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	2	2	2	230.000.000	180.000.000	87.160.000
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	4	4	4	908.200.000	1.206.250.000	964.899.000
			Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum	1	1	1	950.000.000	180.000.000	28.117.000

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
		Keuangan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	20.000.000	15.000.000	-
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	10	10	1.065.000.000	1.045.000.000	970.099.100
			Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	2	2	247.500.000	-	-
			Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah		5	5		1.583.459.150	312.083.000
			Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah	4	4	4	850.000.000	-	-
			Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		4	4		10.443.399.500	796.917.675
			Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah	5	8	8	5.472.600.000	8.390.859.250	7.198.914.594
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3	3	3	780.000.000	-	-
			Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keuangan Daerah	3	3	3	29.154.000.000	28.115.000.000	28.893.000.000

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran	5	6	6	1.220.000.000	964.702.000	777.973.055
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	2	2	55.000.000	125.000.000	67.993.000
			Program Peningkatan Pajak Non PBB dan Non BPHTB		3	3		1.182.079.250	464.040.000
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	6	7	7	1.540.000.000	1.330.758.000	1.249.529.956
			Program Peningkatan Pendapatan Daerah	5	5	5	1.507.000.000	-	-
			Program Peningkatan Pendapatan Pajak PBB dan BPHTB		3	3		2.286.476.850	950.652.920
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	8	8	8	2.423.400.000	2.007.900.000	1.533.674.200
		Pangan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	2	2	275.032.000	150.000.000	19.652.600
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	9	9	5.350.000.000	5.096.700.000	4.727.163.142
		Penelitian dan Pengembangan	Program Kajian Strategis Daerah	1	1	1	350.000.000	500.000.000	227.102.169
			Program Pengembangan Sistem	2	2	2	250.000.000	146.330.000	34.020.000

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
		Pengawasan	Inovasi, Kreativitas dan Litbang						
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	5	5	5	3.050.000.000	3.211.200.000	2.736.461.990
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	9	9	1.495.000.000	1.863.800.000	1.639.098.000
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1	1	17.480.000	15.000.000	9.330.000
		Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3	3	3	450.000.000	425.000.000	156.004.700
			Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	7	7	7	1.425.000.000	1.350.000.000	820.328.000
			Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	1	1	100.000.000	100.000.000	67.544.500
			Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan	3	3	3	500.000.000	824.927.800	158.137.500

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial						
			Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	1	1	1	400.000.000	550.000.000	354.762.720
			Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Perencanaan	2	2	2	150.000.000	150.000.000	24.300.000
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3	3	3	860.000.000	318.000.000	500.910.000
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	9	9	2.423.540.000	2.767.000.000	2.163.436.000
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	2	2	2	300.000.000	75.000.000	75.000.000
			SUBTOTAL	179	200	200	83.512.442.000	95.143.076.800	72.905.305.818
	7.c. Tata Kelola Pemerintahan : Pembangunan sarana prasarana tersentral dan terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan	Administrasi Pemerintahan	Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	1	1	1	8.000.000.000	2.515.000.000	1.515.000.000
			Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1	1	1	585.000.000	400.000.000	400.000.000
			Program Peningkatan	1	1	1	15.000.000	15.000.000	15.000.000

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
	publik		Peran Kecamatan dan kelurahan						
		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1	1	1	400.000.000	800.000.000	310.500.000
		Keuangan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran		1	1		38.300.000	38.300.000
		Penanaman Modal	Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan	1	1	1	50.000.000	37.500.000	8.030.000
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2	2	2	237.400.000	92.500.000	73.600.000
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	2	2	2	400.000.000	410.000.000	271.848.000
			SUBTOTAL	9	10	10	9.687.400.000	4.308.300.000	2.632.278.000
	7.d. Tata Kelola Pemerintahan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi ASN melalui berbagai diklat dan pelatihan	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	1	1	67.500.000	-	-
		Kepegawaian	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	10	10	2.473.500.000	2.286.255.340	2.097.116.487
			Program Penataan	5	5	5	720.000.000	890.246.760	733.652.801

No.	Prioritas	Bidang	Program	Jumlah Kegiatan RKPD	Jumlah Kegiatan APBD	Jumlah Kegiatan Perubahan	Anggaran RKPD	Anggaran APBD	Anggaran Perubahan
0	1	2	3	4	5	6	10=7+8+9	11	12
			Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN						
			Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	4	4	4	780.000.000	217.750.000	143.660.000
			Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN	4	4	4	980.000.000	2.428.788.900	2.106.737.500
		Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Kompetensi ASN	3	3	3	6.460.000.000	4.197.215.000	365.976.659
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	2	2	2	725.000.000	793.500.000	567.941.905
			SUBTOTAL	43	44	44	22.580.800.000	15.662.056.000	9.000.841.352
			TOTAL	3397	3948	3978	1.784.650.903.017	1.534.408.957.424	1.330.237.889.997

e. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2020.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Banyumas Tahun 2020 bertema **Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal, dan Penguatan Kemandirian Pangan** Prioritas pembangunan daerah kabupaten Banyumas tahun 2020 dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yang tidak hanya mengarah pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020, namun sekaligus fokus pada upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 terutama pada sektor kesehatan, pemulihan ekonomi, dan sosial. Prioritas pembangunan daerah kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. **Prioritas Daerah Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia** dengan berfokus pada (a) Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan akses pelayanan kesehatan; (b) Peningkatan kualitas dan pemerataan prasarana, sarana serta SDM kesehatan; (c) Peningkatan kesadaran hidup sehat masyarakat; (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan sosial; (e) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan perempuan dan perlindungan anak; (f) Peningkatan pelayanan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun; (g) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan; (h) Peningkatan kualitas kurikulum dan tenaga pengajar; (i) Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi setempat dalam peningkatan kualitas SDM, dan (j) peningkatan pencegahan dan pelayanan penanganan, serta penyediaan logistik untuk penanganan Covid-19;

2. **Prioritas Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur** dengan berfokus pada (a) Peningkatan kondisi sarana dan prasarana transportasi ke pusat-pusat kegiatan masyarakat melalui pengembangan sistem transportasi masal dan antar moda, transportasi perdesaan dan perintis; (b) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan antar pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi budaya, jalur alternatif, akses kawasan wisata, perbatasan kabupaten Banyumas dengan kabupaten tetangga, serta infrastruktur telekomunikasi; (c) Peningkatan keselamatan jalan serta peningkatan sarana prasarana keselamatan perhubungan; (d) Peningkatan infrastruktur sosial dan infrastruktur dasar melalui

pembangunan rumah layak huni, sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) dan air minum, sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana penunjang aktivitas perekonomian; (e) Peningkatan dan pengembangan LPJU; (f) Peningkatan infrastruktur irigasi untuk mendukung ketahanan pangan; (g) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis (terminal, sarana prasarana sumber daya air, kebinamargaan, kereta api, bandara udara), dan dukungan pengembangan infrastruktur lintas desa; (h) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam rangka menjaga kualitas lingkungan dan peningkatan kuantitas RTH; (i) Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait alih fungsi lahan produktif; (j) Penguatan regulasi penataan ruang

3. **Prioritas Pengurangan disparitas pendapatan masyarakat** dengan berfokus kepada (a) Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah; (b) Peningkatan pemerataan penyediaan sarana prasarana yang mendukung ekonomi kerakyatan; (c) Peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat; (d) Pengembangan pusat-pusat perdagangan baik lokal maupun regional; (e) Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan tenaga kerja; (f) Pemberian kemudahan izin investasi, perbaikan layanan dan sistem perijinan; (g) Pengembangan investasi yang mengakomodir produk-produk unggulan serta mendorong perwujudan investasi hijau; (h) Pengembangan promosi investasi; (i) Peningkatan sarana dan prasarana ke destinasi wisata; (j) Peningkatan daya saing produk wisata; (k) Pengembangan citra dan promosi wisata; (l) Pengembangan kelembagaan pariwisata; (m) Peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM (KUMKM) melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk UMKM sesuai dengan potensi lokal didukung dengan penerapan inovasi, kreativitas dan teknologi tepat guna; (n) Perluasan akses terhadap modal dan jangkauan pemasaran, perlindungan terhadap produk KUMKM, peningkatan kapasitas SDM KUMKM, dan penguatan kelembagaan KUMKM; (o) Pembinaan industri kecil dan menengah melalui pengembangan klaster industri dan kemitraan; (p) Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UMK) melalui pengembangan peran UMKM terutama yang berorientasi ekspor, dan penguatan kelembagaan dalam rangka mendorong daya saing UMKM;

4. **Pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran**, dengan berfokus kepada (a) Pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin berupa rumah layak huni, air bersih, sanitasi, penanganan kawasan permukiman kumuh, akses pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan; (b) Peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja; (c) Perkuatan basis data terpadu kemiskinan; (d) penguatan pengaman sosial melalui bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan terdampak Covid-19;
5. **Peningkatan produktivitas pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan**, berfokus pada (a) Penerapan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian; (b) Pengembangan kawasan budidaya perikanan; (c) Peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani; (d) Peningkatan kuantitas, kualitas dan nilai tambah serta pengembangan jejaring pemasaran produk pertanian dan perikanan; (e) Peningkatan akses dan sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan; (f) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
6. **Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan**, dengan fokus pada (a) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (b) Pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara; (c) Pengelolaan limbah berbasis masyarakat; (d) Peningkatan konservasi mata air, situ dan embung untuk meningkatkan ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya air; (e) Peningkatan penanggulangan bencana berbasis mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana; (f) Penguatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana; (g) Pengembangan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; (h) Peningkatan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana;
7. **Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik**, dengan fokus pada : (a) Peningkatan pelayanan publik melalui upaya pendekatan pelayanan, perkuatan keterbukaan informasi, transparansi dan partisipasi publik; (b) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

akuntabel melalui peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan pembangunan; (c) Pembangunan sarana prasarana tersentral dan terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020 merupakan upaya guna mencapai target sasaran pembangunan daerah tahun 2020 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas pada Tahun 2020 ditarget sebesar 6,45 % (Tahun Dasar 2010) melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra-sentra produksi, kemudahan ijin usaha, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pro investasi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta perluasan inovasi daerah dan penerapan teknologi tepat guna;
2. Inflasi diprediksi pada kisaran $\pm 4,00$ % melalui upaya menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi, stabilitas harga serta ekspektasi masyarakat;
3. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 11,75 % pada tahun 2020, melalui strategi 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. 2) peningkatan pendapatan masyarakat. 3) Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (pengembangan *One Village One Product* melalui penerapan pola Desa Usaha Mandiri). 4) membangun sinergitas program dan pendanaan melalui : Pola *Sharing* program dan pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) dan pengembangan kegiatan-kegiatan tematik (TMMD Tematik; Kuliah Kerja Nyata Tematik/Kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta CSR Tematik) dengan fokus prioritas lokasi pada daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi. 5) Keterpaduan dan perluasan intervensi program/kegiatan sektoral berdimensi kewilayahan, mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas tingkat kemiskinan tinggi dengan pola *quick win*. 6) Penguatan Kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, Kecamatan dan Desa;

4. Penurunan Tingkat pengangguran Terbuka menjadi 4,23% pada tahun 2020 melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi tenaga kerja di sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi, perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi; perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial, serta perlindungan terhadap tenaga kerja.

Refocusing program/kegiatan dan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 merubah target sasaran prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020. Perubahan tersebut dilakukan dengan tetap menyelaraskan target sasaran pembangunan nasional dan target Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5
Perubahan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2020

No.	Indikator Sasaran	Target Sasaran Kabupaten Banyumas	Target Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Target Sasaran Nasional
1.	Pertumbuhan Ekonomi	2,5-3,5 %	2,60 %.	-0,4-2,3 %
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-5,5%	5,88-6,76%.	7,8-8,5 %
3.	Angka Kemiskinan	11,53-12,53 %	12,30- 13,40%	9,7 -10,2 %
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,55	71,90	72,11-72,16
5.	Inflasi	3,0±1,0 %	3,0±1,0 %	3,0±1,0 %
6.	Indeks Gini	0,2366	0,365	0,379-0,381

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020

Program dan kegiatan prioritas pembangunan berisi program dan kegiatan baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang tahap III maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas diuraikan dalam kelompok urusan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab IV Urusan Pemerintahan Bagian Kesatu Klaifikasi Urusan pemerintahan. Pasal 9 (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Kunkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.

RKPD Tahun 2020 berjumlah 1880 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.820.572.935.117, sedangkan APBD Tahun 2020 berjumlah 1711 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.534.568.957.424. Dengan adanya Pandemi Covid 19 di Tahun 2020 maka sesuai PMK 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam rangka penanganan pandemic Covid 19 dan atau menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional, maka RKPD Perubahan 2020 diperlukan Penyesuaian anggaran menjadi sebesar 1.381.353.657.975 dengan Program Kegiatan difokuskan untuk penanggulangan dampak Covid 19. Sedangkan Program Kegiatan yang masih dapat dilaksanakan di Tahun 2020 antara lain : 1. Kegiatan yang sudah realisasi sampai dengan 30 April sebesar Rp.137.337.806.662; 2. Kebutuhan honor Non ASN yang belum terbayarkan sebesar Rp.7.426.840.701; Kegiatan yang sudah melaksanakan kontrak terikat dan belum terbayarkan sebesar Rp.12.105.323.400; 4. Kegiatan Operasional, kegiatan terikat (DAK, DID, DBHCHT, BLUD, Bangub); dan kegiatan strategis daerah sebesar Rp.1.121351.209.013.

5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan perubahan untuk tahun 2020 sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Kerangka Pendanaan Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 (Rp)

No.	Uraian	RKPD (Rp.)	APBD Induk 2020 (Rp)	RKPD Perubahan 2020 (Rp)	+/- (Rp)	%
1.	PENDAPATAN	3.712.866.081.605,85	3.568.568.763.744,00	3.317.781.580.874,00	-250.787.182.870,00	-7,03
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	715.379.486.239,62	729.892.819.015,00	627.997.968.814,00	-101.894.850.201,00	-13,96
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	212.181.051.591,32	275.500.000.000,00	202.158.325.480,00	-73.341.674.540,00	-26,62
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	32.166.513.904,06	31.982.177.000,00	20.289.850.930,00	(11.692.326.070,00)	-36,56
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.424.572.198,27	13.498.113.686,00	15.667.989.004,00	2.179.855.319,00	16,15
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	455.607.348.545,97	408.912.528.330,00	389.871.823.420,00	-19.040.704.910,00	-4,66
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.119.765.795.474,36	2.046.987.459.689,00	1.858.737.840.000,00	-188.249.619.689,00	-9,20
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	60.925.001.793,32	42.143.125.668,00	45.547.291.000,00	3.404.165.331,00	8,08
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.528.739.442.244,24	1.461.114.316.000,00	1.317.798.068.000,00	-143.316.248.000,00	-9,81
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	530.101.351.436,80	543.730.018.000,00	495.392.481.000,00	-48.337.537.000,00	-12,41
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	877.720.799.891,87	791.688.485.060,00	831.045.772.060,00	39.357.287.000,00	4,97
1.3.1.	Pendapatan Hibah	194.712.553.898,69	171.141.807.000,00	189.749.807.000,00	18.599.000.000,00	10,87
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	262.429.129.572,00	196.568.100.060,00	196.568.100.060,00	-	0,00
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	47.843.656.100,82	421.976.576.000,00	418.122.865.000,00	-3.855.713.000,00	-0,91
1.3.4.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	372.735.460.320,36	0	24.614.000.000	24.614.000.000	-
2.	BELANJA	3.974.507.606.571,09	3.743.918.763.744,00	3.534.336.704.355,00	-209.582.059.389,00	-5,60
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.189.856.703.554,09	2.209.349.806.320,00	2.153.983.046.380,00	-55.366.759.940,00	-2,51
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.767.864.880.852,21	1.456.016.031.000,00	1.430.360.799.153,00	-25.655.231.850,00	-1,76
2.1.2.	Belanja Hibah	73.500.000.000,00	41.345.850.000,00	39.768.150.000,00	-1.567.700.000,00	-3,77
2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	18.720.000.000,00	24.740.470.600,00	11.550.470.600,00	-13.190.000.000,00	-53,31
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	25.240.170.401,28	30.748.217.700,00	22.244.817.639,00	-8.503.400.061,00	-27,65
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan	300.000.000.000,00	651.499.237.017,00	537.286.342.167,00	-114.212.894.850,00	-17,53
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	4.531.652.300,60	5.000.000.000,00	112.752.466.821,00	107.752.466.821,00	2.155,05
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.784.650.903.017,00	1.534.568.957.424,00	1.381.353.657.975,00	-153.215.299.449,00	-9,98
2.2.01	Belanja Pegawai		29.660.815.508,00	26.833.049.008,00	-3.047.766.500,00	-10,27
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		1.007.543.934.515,00	967.683.915.299,00	-89.560.718.026,00	-3,96
2.2.03	Belanja Modal		497.344.207.401,00	387.036.693.668,00	-110.307.513.733,00	-22,18
	SURPLUS/(DEFISIT)	-261.641.524.965,24	-175.350.000.000,00	-216.555.123.481,00	-41.205.123.481,00	23,50
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	258.862.342.330,49	205.000.000.000,00	247.705.123.481,00	42.705.123.481,00	20,83
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	258.862.342.330,49	200.000.000.000,00	242.705.123.481,00	42.705.123.481,00	21,35
3.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	42.485.348.571,43	29.650.000.000,00	31.158.000.000	1.500.000.000	5,06
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	39.744.423.415,88	28.150.000.000,00	28.150.000.000,00	-	0,00
3.2.2.	Pemberian Pinjaman Daerah	2.740.925.155,55	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	216.376.993.759,06	175.350.000.000,00	216.655.123.481,00	41.205.123.481,00	23,50
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		-	-	-	-

Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan akan disesuaikan terbagi kedalam 4 urusan dan 37 urusan bidang/sub bidang, dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan 209 Program, sebagaimana berikut ini :

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (6 Urusan Bidang)

Tahun 2020 selain merupakan tahun ketiga dari tahun pencapaian target capaian RPJMD Kabupaten Banyumas, juga merupakan masa pemulihan ekonomi akibat dampak pandemic Covid 19 di tahun 2020, untuk dapat mencapai kinerja tahun 2020 sesuai target RPJMD dan untuk dapat tercapai pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid 19 maka rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan (6 Program)

Dari 7 Program dan 45 kegiatan yang akan dilaksanakan, yang menjadi Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (25 Kegiatan)

Untuk mencapai Untuk mencapai target indikator program pada tahun tahun 2020 yaitu: 1. APK PAUD/RA/ Sederajat 77,75 %; 2. Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi 18 %; 3. Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alat mewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru tiap semester 100 %; 4. Persentase siswa PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap semester 100%; 5. Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun 100%; 6. Rasio Guru terhadap murid PAUD 18;

Maka Fokus kegiatan pada: 1. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Kalibagor; 2. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Purwokerto; 3. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Ajibarang; 4. Operasional Tim Manajemen BOP Kabupaten; 5. Bantuan Biaya Operasional

PAUD (BOP); 6. Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Purwokerto; 7. Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Ajibarang; 8. Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Kalibagor; 9. Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan; 10. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Kalibagor; 11. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Purwokerto; 12. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Ajibarang; 13. Operasional SKB Purwokerto; 14. Operasional SKB Ajibarang; 15. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Ajibarang; 16. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Purwokerto; 17. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Kalibagor; 18. Workshop Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas; 19. Pengadaan Sarana Prasarana SKB (DAK); 20. Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK); 21. Fasilitasi Program dan Kegiatan PAUD dan Bindikel; 22. Fasilitasi Kegiatan Dikmas dan Kursus; 23. Fasilitasi Program dan Kegiatan PAUD dan Bindikel; 24. Pendampingan Pelaksanaan DAK Bidang PAUD dan Dikmas; 25. Operasional Tim Manajemen BOP Kesetaraan.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat (11 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD 99,85%; 2. Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI / Paket A 0,00032%; 3. Angka rata-rata Nilai UASBN SD 72; 4. APK SD/MI/Paket A 103%; 5. Persentase Peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi 13%; 6. Persentase Peningkatan Siswa SD Berprestasi 9%; 7. Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi 100%; 8. Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 86,50%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional Tim Manajemen BOS SD; 2. Pembangunan Prasarana SD; 3. Rehabilitasi

Prasarana SD; 4. Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB; 5. Penyelenggaraan Lomba-Lomba Siswa dan Sekolah SD/SDLB; 6. Penyelenggaraan Kurikulum 2013 SD; 7. Pembangunan Ruang Kantor, Ruang Belajar, dan Ruang Penunjang Lain SD; 8. Pembangunan/Rehabilitasi Talud/Pagar Keliling SD; 9. Pengadaan Sarana Pendidikan SD; 10. BOS SD; 11. Pengadaan Sarana Prasarana SD (DAK).

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat (81 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu : 1. Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (13-15 tahun) 95,29%; 2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B 0,0025%; 3. Angka rata-rata Nilai UN SMP 59; 4. APK SMP/MTs/Paket B 93%; 5. APM SMP/MTs/Paket B 81,60%; 6. Persentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi 14%; 7. Persentase peningkatan Siswa SMP Berprestasi 12,50%; 8. Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi 95%; 9. Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik 89%; 10. Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK); 2-72. Operasional SMPN (71 SMPN); 73. Penyusunan Perencanaan, DED, dan Pengawasan Kegiatan Jenjang SMP; 74. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SMP; 75. Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP; 76. Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional SMP/MTs; 77. Penyelenggaraan Lomba-lomba Siswa dan Sekolah SMP; 78. Rehabilitasi Ruang Kantor, Ruang Belajar, dan Ruang Penunjang Lain SMP; 79. BOS SMP; 80. Operasional Penyaluran Beasiswa SMP; 81. Operasional Tim Manajemen BOS SMP.

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 100%; 2. Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 100%; 3. Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi 9,09%; 4. Persentase satuan pendidikan SD memiliki tenaga penunjang lainnya 100%; 5. Persentase tutor pendidikan kesetaraan memiliki jasah minimal S1/DIV 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti; 2. Pelaksanaan Sertifikasi, Penilaian Angka Kredit dan Pembinaan Ketenagaan; 3. Penyelenggaraan Lomba Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal; 4. Penilaian Kinerja dan Penyiapan Calon Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan.

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (8 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: Tingkat capaian nilai LKJIP 83 Angka;

Fokus kegiatan pada: 1. Penanganan Anak Putus Sekolah; 2. Bangun Pendidikan; 3. Gebyar Pendidikan Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus); 4. Manajemen Pendataan Pendidikan; 5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru; 6. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan; 7. Pengadaan Tanah Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas; 8. BinteK Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Satuan Pendidikan.

6. Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan (27 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun

2020 yaitu: Tingkat capaian koordinasi Koordinator Pendidikan Kecamatan 100%;
Fokus kegiatan pada 1-27. Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan (27 kecamatan).

2. Kesehatan (15 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Angka Kematian Bayi 8,01; 2. Angka Kematian Neonatal 5,25; 3. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%; 4. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 100%; 5. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 100%; 6. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100%; 7. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100%; 8. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Jaminan Persalinan (DAK); 2. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; 3. Penguatan Puskesmas PONE (DAK Penguatan).

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (45 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan 100%.

Fokus kegiatan pada: 1-3. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) BKMI, BKMM, BKPM (DAK); 4-45. Bantuan Operasional Kesehatan pada 41 Puskesmas (DAK).

3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100%; 2. Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 65%; 3. Persentase

sarana kefarmasian yang memenuhi standar 65%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pengadaan obat, perbekalan kesehatan dan reagen; 2. Bantuan Operasional Kesehatan Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Distribusi Obat dan E-Logistik); 3. Peningkatan Sarana Prasarana kefarmasian, obat dan perbekalan kesehatan serta operasional DAK Kefarmasian (DAK Farmasi); 4. Operasional Unit Perbekalan Kesehatan dan Kefarmasian (UPKF); 5. Pembinaan pengawasan obat, makanan dan minuman dan bahan berbahaya.

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri 11,5%; 2. Persentase kecamatan dengan Pokjanal Desa Siaga 22,5%; 3. Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS 70%; 4. Persentase Kecamatan yang mencapai PHBS Institusi Pendidikan sehat 10% 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pengembangan Media Promosi Kesehatan; 2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan Bidang Kesehatan.

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100%; 2. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100%; 3. Prevalensi balita stunting 17%; 4. Prevalensi gizi kurang 7,70%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Status Gizi Masyarakat; 2. Stunting (DAK); 3. BOK Stunting (DAK).

6. Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM 100%; 2. Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan

Olah Raga pada kelompok masyarakat 53%; 3.Persentase puskesmas melaksanakan STBM 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (6 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO 75%; 2.Angka Kejadian Malaria (API : kasus per 1000 penduduk) < 0.05; 3. Angka (notifikasi semua kasus TBC yang diobati (Case Notification Rate/ CNR) per seratus ribu penduduk 252; 4. Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi; 5. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%; 6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100%; 7.Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA 100%; 8.Cakupan pengobatan semua kasus TBC (% Case Detection Rate / CDR) yang diobati 97%; 9. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100%; 10.Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100%; 11. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC 100%; 12. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100%; 13.Persentase pasien TBC yang mengetahui status HIV 65%; 14. Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100%; 15. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100%; 16.Prevalensi tekanan darah tinggi 38,5%; 17.Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS 75%; 18. Tingkat Kematian karena Tuberculosis (Per 100.000 penduduk) 3; 19. Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) 164.

Fokus kegiatan pada: 1. Pengendalian Penyakit Bersumber

Binatang (P2B2); 2. Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML); 3. Peningkatan Imunisasi; 4. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah; 5. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; 6. Pengendalian Penyakit (DAK).

8. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Rasio dokter persatuan penduduk 0,2%; 2. Rasio tenaga medis persatuan penduduk 0,40%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kesehatan; 2. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan; 3. Penyelenggaraan pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan.

9. Program Pelayanan Kesehatan (64 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100%; 2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100%; 3. Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK 100%; 4. Indeks kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan 77,5 Indeks 5. Persentase Fasyankes primer/sekunder yang memberikan pelayanan sesuai standar 100%; 6. Persentase penduduk miskin non kuota terintegrasi JKN 95%; 7. Persentase Puskesmas Terakreditasi 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA); 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan; 3. Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional; 4. Akreditasi Puskesmas; 5. Peningkatan Mutu FKTP dan Akreditasi Labkesmas; 6-9. Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan puskesmas Kecamatan; 10. Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM); 11. Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai Kesehatan Penyakit Paru-paru Masyarakat (BKPM); 12. Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai

Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA); 13. Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Labkesmas; 14-24. Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan puskesmas Kecamatan; 25. Penambahan Operasional Labkesmas; 26. Penambahan Operasional Puskesmas Purwojati; 27. Penambahan Operasional Puskesmas Purwokerto Barat; 28. Penambahan Operasional BKMIA; 29-52. Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan puskesmas Kecamatan; 53-60. Penambahan Operasional Puskesmas; 61-62. Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan puskesmas Kecamatan; 63-64. Penambahan Operasional Puskesmas Kecamatan.

10. Program peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Cakupan Puskesmas 151%; 2. Cakupan Puskesmas Pembantu 11,78%; 3. Rasio Puskesmas persatuan penduduk 0,02%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya (DAK Kesehatan Dasar); 2. Pengadaan sarana dan prasarana Balai Kesehatan, Klinik dan Laboratorium kesehatan.

11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata (9 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit) 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pengadaan peralatan kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit di seluruh Instalasi (DAK Rujukan); 2. Pengadaan peralatan kesehatan di seluruh Instalasi dari Dana APBD; 3. Pengadaan Peralatan Kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit di seluruh instalasi dari dana APBD (Provinsi); 4. Rehabilitasi Gedung Thalasemia; 5. Pengadaan tanah untuk pengembangan Rumah Sakit; 6. Pembangunan Rumah Sakit Khusus

Mata/Indra; 7.Pembangunan Gedung rawat Jalan Tahap 2 dari APBD; 8.Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; 9. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Jantung dan Paru dari Dana DBHCHT.

12. Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan 100%; 2.Persentase SIK Fasyankes yang terintegrasi 35,11%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.

13. Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Nilai Evaluasi SAKIP 82 Nilai; Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan 83; 2.Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Bagian Administrasi 76; 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu 76; 4.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Penunjang 76; 5. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Medis 77,27%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pelayanan Kesehatan dan pendukung Pelayanan Kesehatan.

14. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

**15. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran
(9 Kegiatan)**

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: Persentase capaian fisik program 100%; dan Persentase capaian keuangan program 100%.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (16 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**1. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan
(11 Kegiatan)**

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Presentase panjang jalan ditingkatkan kondisinya 34,75%; 2. Presentase panjang jalan yang terbangun 0,03%.

Fokus kegiatan pada: 1-7. Pembangunan dan peningkatan jalan 7 Wilayah; 8. Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan/Jembatan; 9. Bantuan Keuangan Penanganan Infrastruktur Jalan/ Jembatan (Bantuan Gubernur); 10. Perencanaan Teknis Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan antara lain pembangunan Fly Over Tambaknegara dan Fly Over Veteran (Pra DED-DAK); 11. Pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan jalan.

2. Program Pembangunan turap/talud/brojong (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: Persentase Panjang bangunan pengaman di daerah kritis di badan sungai 0,74%.

Fokus kegiatan pada 1. Perkuatan Tebing SDA dan Irigasi.

3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (12 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020: Presentase panjang jalan yang dipelihara 51,48%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pemeliharaan Rutin Jalan; 2. Pemeliharaan Berkala Jalan; 3-9. Pemeliharaan Rutin Jalan 7 Wilayah; 10. Perencanaan Teknis Bidang

Pemeliharaan Jalan/Jembatan; 11.Inspeksi Jalan
12.Sosialisasi Sempadan Jalan.

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya (15 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020: 1. Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada 85%; 2. Persentase luas irigasi kabupaten yang dilakukan rehabilitasi 19,56%;

Fokus kegiatan pada: 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi; 2. Dana Alokasi Khusus Bidang SDA dan Irigasi; 3. Bantuan Keuangan Penanganan Infrastruktur SDA dan Irigasi (Bantuan Gubernur); 4.Pengadaan tanah untuk pembangunan irigasi; 5.Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; 6-12. Pemeliharaan ringan jaringan irigasi 7 Wilayah; 13. Pemberdayaan GP3A; 14. Perencanaan Teknis Bidang SDA dan Irigasi antara lain perencanaan pembangunan Waduk Kaliurip (Pra DED-DAK); 15.Pengelolaan IPDMIP Kabupaten Banyumas.

5. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: Persentase jumlah embung dalam kondisi baik 84,21%;

Fokus kegiatan pada: 1.Pembangunan embung/situ; 2. Rehabilitasi embung/situ/mata air; 3. Pengadaan tanah untuk pembangunan embung/situ.

6. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase jumlah kelompok masyarakat peduli sungai yang aktif 64,71%;

Fokus kegiatan pada: 1.Pembangunan/ Rehabilitasi/

Pemeliharaan Infrastruktur SDA dan Irigasi; 2. Pembinaan Masyarakat Peduli Sungai.

7. Program Pembinaan Jasa Konstruksi (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu : 1. Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina/Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina 20,58%.

Fokus kegiatan pada 1. Pembinaan Jasa Konstruksi.

8. Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase penambahan jumlah jembatan 99,46%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembangunan dan Penggantian Jembatan Kabupaten antara lain perencanaan pembanguna jalan akses jembatan Serayu desa Pegalongan-Mandirancang-2 ruas (DED-DAK).

9. Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jembatan (9 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase jembatan kabupaten yang dipelihara 79,21%.

Fokus kegiatan pada: 1. Rehabilitasi Jembatan; 2. Pengadaan bahan konstruksi Jembatan; 3-9. Pemeliharaan Rutin Jembatan di 7 Wilayah di Kabupaten Banyumas.

10. Program Pembangunan Bangunan pelengkap jalan/jembatan (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase penambahan panjang trotoar dan drainase 98,07%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembangunan Trotoar/ Saluran Drainase/Gorong-Gorong Jalan; 2. Pembangunan Bangunan pelengkap jalan/ jembatan; 3. Pemeliharaan

Trotoar/Drainase/ Gorong-gorong Jalan; 4.Pemeliharaan Bangunan pelengkap jalan/jembatan.

11. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang tertangani 66,70%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembangunan Gedung Milik Pemkab Banyumas 2.Pemeliharaan Gedung Milik Pemkab Banyumas; 3. Pembangunan/Rehabilitasi gedung dan sarpras kantor Kecamatan; 4.Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Sarpras Kantor Kelurahan; 5.Perencanaan Teknis Bidang Tata Bangunan antara lain DED pembangunan gedung DPRD, DED Pembangunan Gedung Pertemuan-Review DED Perkantoran Gerilya-Sudirman, DED Pembangunan Masjid Raya (DAK); DED pembangunan tempat expo center, landasan patung Bung Karno, alun-alun, tempat kuliner (DAK).

12. Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase bangunan pemerintah yang ber-IMB 70%.

Fokus kegiatan pada: 1.Pelayanan Operasional Rekomtek Bangunan.

13. Program Peningkatan Perencanaan Teknis (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu : 1. Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina / Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang; 2.Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Penataan Ruang; 3.Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase (2 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu : 1. Persentase panjang drainase yang dibangun 40%. Fokus kegiatan pada 1. Pemeliharaan Drainase; 2. Pembangunan Drainase.

15. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (2 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

16. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (22 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2. Persentase capaian keuangan program 100%.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (6 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Rasio rumah layak huni 78,34%; 2. Cakupan ketersediaan rumah layak huni 76,81%; 3. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 53,77%; 4. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 81,48%.

Fokus kegiatan pada: 1. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Perumahan; 2. Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Pengembangan Perumahan; 3. Fasilitasi Penyediaan/Pembangunan Perumahan dan PSU Perumahan; 4. Pendamping DAK Bidang Perumahan dan Permukiman.

2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan (9 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 73,37%; 2. Persentase rumah tinggal berakses sanitasi 86%; 3. Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik 11,48%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pendamping Operasional Program PAMSIMAS; 2. Perencanaan Teknis dan Operasional Bidang Penyehatan Lingkungan; 3. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Air Bersih; 4. Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Air Limbah; 5. Pembangunan dan Pengelolaan IPLT; 5. Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman; 6. DAK Bidang Sanitasi; 7. Pendamping DAK Bidang Sanitasi; 8. DAK Bidang Air Minum; 9. Pendamping DAK Bidang Air Minum.

3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase Asosiasi Pengelola Sarana Air Minum dan Sarana Air Limbah yang aktif 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembinaan dan Fasilitasi BP SPALD.

4. Program Pengembangan Kawasan Permukiman (6 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Rasio permukiman layak huni 79,82%; 2. Persentase lingkungan pemukiman kumuh kawasan perkotaan 8,16%; 3. Persentase penanganan permukiman kumuh 6,09%; 4. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan 1,34%; 5. Persentase areal kawasan kumuh 20,23%; 6. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 39,42%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum; 2. Penataan Kawasan Kumuh

Perkotaan; 3. Perencanaan Teknis, Pendataan dan Operasional Bidang Pengembangan Permukiman; 4. Pendamping Operasional KOTAKU; 5. Pembangunan Turap/ Talud / Bronjong Kawasan Permukiman; 6. Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman.

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

6. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (10 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase realisasi fisik program 100%; dan 2. Persentase realisasi keuangan program 100%.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (8 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase wilayah kecamatan/desa yang kondisi nyaman 100%; 2. Persentase konflik sosial yang terselesaikan 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional Crisis Centre (Tim terpadu); 2. Pembekalan dan Pemantapan Fungsi Jaring Deteksi Dini dan Pengawasan Orang Asing; 3. Silaturahmi Muspida dengan Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; 4. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.

2. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan (7 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 30%; 2. Persentase lembaga keagamaan aktif 60%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat; 2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa; 3. Orientasi ketahanan bangsa, nilai-nilai nasionalisme dan Bela Negara; 4. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan; 5. Fasilitasi Ormas dan LSM; 6. Fasilitasi FKUB; 7. Pembinaan Aliran Kepercayaan dan Umat Beragama.

3. Program Pendidikan Politik Masyarakat (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu / pilkada 75%.

Fokus kegiatan pada: 1. Fasilitasi Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik; 2. Sarasehan Demokrasi.

4. Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase penanganan pelanggaran PERDA 100%; 2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan kibat dari penegakan hukum PERDA dan Perkada 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penyuluhan peraturan-peraturan daerah yang mengandung sanksi hukum; 2. Pengawasan perijinan; 3. Pemantauan dan pengawasan cukai ilegal; 4. Penegakan Produk Hukum Daerah; 5. Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran produk hukum daerah.

5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (6 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020

yaitu: 1. Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 100%; 2. Persentase Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum 100%; 3. Persentase Pemenuhan Sarpras Kelengkapan Satpol PP 100%; 4. Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala missal; 3. Pengamanan terpadu; 4. Patroli ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; 5. Penjagaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Daerah; 6. Penegakan Disiplin PNS.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pemberdayaan anggota linmas dalam penanggulangan bencana dan ketertiban masyarakat; 2. Operasional dan Pembinaan SATLINMAS; 3. Penyelenggaraan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas.

7. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 60%; 2. Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 100%; 3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran; 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; 3. Operasional UPT Pemadam Kebakaran; 4. Pembangunan sarana dan

prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

8. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (11 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan; 2. Persentase capaian keuangan program 100%;

6. Sosial (6 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (19 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase PMKS non potensial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 9,31%; 2. Persentase PMKS potensial yang telah berusaha/ bekerja 25%; 3. Persentase PMKS yang berubah sikap perilakunya 25%; 4. Persentase PMKS yang mendapat perlindungan 100%; 5. Persentase anak yatim dan berkebutuhan khusus/difabel yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 26,95%; 6. Persentase penyandang disabilitas yang meningkat fungsi fisiknya 100%; 7. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 51,51%; 8. Persentase PMKS yang tertangani 52,15%; 9. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 51,50%; 10. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial 8,33%; 11. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 21,74%; 11. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100%; 12. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 100%; 13. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 39,58%; 14. Persentase penyandang

disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100%; 15.Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100%; 16.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luarpanti 100%; 17.Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100%; 18. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana; 2. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa; 3. Penyusunan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 4.Penertiban dan pengiriman hasil razia PGOT dan PSK ke panti rehab social; 5.Pengiriman anak nakal, remaja rawan narkoba dan anak terlantar ke panti rehab social; 6. Fasilitasi orang terlantar (PGOT) dan Fasilitasi penguburan jenazah terlantar; 7. Fasilitasi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migrant; 8.Fasilitasi kegiatan operasional dan sarana Tagana; 9.Penanganan Pasca Bencana dan Penyelesaian Permasalahan Sosial Lainnya; 10. Pelatihan satuan tugas kaji bencana/gladi lapang penanggulangan bencana dan sosialisasi dampak sosial dan penanganan bencana; 11. Pembinaan dan pelatihan advokasi anak nakal dan pelatihan keterampilan bagi remaja sekolah dari keluarga tidak mampu; 12.Pembinaan dan pelatihan lansia potensial bermasalah sosial ekonomi; 13.Fasilitasi Operasional dan Sarana Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyumas; 14.Pemenuhan sarana dan prasarana perawatan para penyandang disabilitas dan trauma; 15.Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma potensial; 16.Pembinaan dan Bimbingan Keterampilan bagi Anak dan Remaja di Panti Asuhan; 17.Pemenuhan sarana dan prasarana panti sosia; 18.Pemberdayaan eks

penyandang penyakit social; 19. Failitasi Pelayanan Publik Bidang Sosial.

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase lembaga masyarakat yang aktif berperan dalam pembangunan 83%; 2.Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana pelayanan kesejahteraan sosial 0%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembinaan Karang Taruna, PSM dan Saka Bina Sosial; 2. Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);

3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase Fakir Miskin (FM) yang telah berusaha bekerja 50%; 2. Persentase Lanjut Usia Miskin/terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 37,53%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional dan monitoring Program Keluarga Harapan (PKH); 2.Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat daerah kumuh; 3. Fasilitas Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

4. Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase masyarakat dan generasi muda yg sadar akan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan social 50%; 2.Nilai kondisi TMP terhadap standar nasional 85%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembinaan nilai-nilai kesetia kawatan sosial bagi generasi muda; 2.Perbaikan dan perawatan Taman Makam Pahlawan.

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat tdaerah 100%; 2.Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

6. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (9 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2. Persentase capaian keuangan program 100%.

5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (17 Urusan Bidang)

Untuk dapat mencapai kinerja tahun 2020 sesuai target RPJMD dan untuk dapat tercapai pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid 19 maka dari 17 bidang urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi prioritas di tahun 2020 adalah bidang Tenaga Kerja, Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik.

7. Tenaga Kerja (8 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja (6 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan 57,00%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Pelatihan Prosesing Hasil Pertanian; 2. Pelatihan Menjahit; 3. Pelatihan Las; 4.Pelatihan Tata Rias Pengantin; 5. Pelatihan Kejuruan Menjahit Garmen; 6.Operasional UPT BLK.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase lowongan kerja yang terpenuhi 57%.

Fokus Kegiatan Pada: 1. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan; 2. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja; 3. Identifikasi Lowongan Kerja; 4. Fasilitasi AKAD/AKL; 5. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja.

3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase perusahaan penempatan pekerja migrant indonesia (P3MI) yang procedural 80%.

Fokus Kegiatan Pada: 1. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja; 2. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan; 3. Fasilitasi AKAN dan penyelesaian CTKI/TKI.

4. Program Perlindungan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase perusahaan yang melaksanakan ketentuan UMK 72%; 2. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun 6,16%; 3. Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama 80%.

Fokus Kegiatan Pada: 1. Monitoring UMK dan THR, usulan dan sosialisasi UMK; 2. Pembinaan Struktur Skala Upah dan Fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja; 3. Pencegahan, Fasilitas dan Penyuluhan Tata cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 4. Pembinaan Sarana Industrial dan Outsourcing dan Kegiatan May Day; 5. Pelatihan Penguatan Organisasi Buruh.

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (2 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan

perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

6. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (9 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2. Persentase capaian keuangan program 100%.

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Presentase koperasi aktif 76,50%.

Fokus kegiatan pada: 1. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; 2. Pembinaan dan pengawasan koperasi; 3. Penilaian kesehatan koperasi.

8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (7 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase peningkatan omzet UMKM yang dibina 3%.

Fokus kegiatan pada: 1. Fasilitasi Pendampingan Pinjaman dana bergulir; 2. Perencanaan UMKM dan Pengembangan OVOP Kabupaten Banyumas; 3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah; 4. Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengawasan Usaha Kecil dan Menengah; 5. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis; 6. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; 7. Sosialisasi HALAL kepada Usaha Mikro Kecil Menengah;

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (3 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program tahun 2020 yaitu : 1. Jumlah kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan) 32 kelompok; 2. Rasio anak korban kekerasan 0,009%; 3. Preferensi kekerasan pada anak perempuan 33,11%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas perlindungan khusus anak; 2. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

2. Program Penguatan Pengarusutamaan Gender (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kelembagaan PUG yang aktif; 2. Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan; 3. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG.

Fokus kegiatan pada: 1. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan Gender (KKG); 2. Advokasi dan Evaluasi PUG;

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu : 1. Rasio perempuan korban kekerasan 0.48%; 2. Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani sesuai standar 100%; 3. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 49%; 4. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 24 Orang; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan

pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 100%; 5. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 100%; 6. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu 100%; 7. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 100%; 8. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 100%; 9. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan 100%; 10. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 100%; 11. Rasio KDRT 0,0016%.

Fokus kegiatan pada: 1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A); 2. Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu dan PP ASI; 3. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah; 4. Pembinaan Organisasi Perempuan.

9. Pangan (4 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Cadangan Pangan (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Stabilitas harga dan pasokan pangan 97%; 2. Tingkat ketersediaan energi 93%; 3. Tingkat ketersediaan protein 93%; 4. Persentase Penanganan daerah rawan pangan 64%.

Fokus Kegiatan Pada: 1. Penanganan daerah Rawan Pangan; 2. Pendukung Kegiatan TNI (TMMD) untuk Pertanian; 3. Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan; 4. Pengembangan cadangan pangan Daerah.

2. Program Peningkatan Pola Pangan Harapan (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Konsumsi protein 50,35%; 2. Konsumsi Energi 2,40%; 3. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 9,44%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan; 2. Penyusunan Pola Pangan Harapan; 3. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

4. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (9 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2. Persentase capaian keuangan program 100%.

10. Pertanahan (1 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu : 1. Persentase luas tanah milik Pemkab yang bersertifikat 38,51%.

Fokus kegiatan pada: 1. Fasilitasi Administrasi Pertanahan; 2. Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum.

11. Lingkungan Hidup (15 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (6 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase jumlah sampah yang tertangani 97%; 2. Persentase cakupan area pelayanan persampahan 52%; 3. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R 22%; 4. Timbulan sampah yang ditangani 97%.

Fokus kegiatan pada: 1. Perencanaan Teknis Bidang Kebersihan dan Persampahan; 2. Pembangunan Gedung UPT KP, TPS dan TPST di Kabupaten Banyumas; 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Persampahan; 4. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 5. Fasilitasi Program Kota Adipura; 6. Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Prasarana UPT TPST.

2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase RTH public 2,0024%; Persentase RTH layak anak 2,0024%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembangunan/Pengembangan RTH di Kabupaten Banyumas; 2. Perencanaan Teknis Pertamanan; 3. Pemeliharaan Taman se-Kabupaten Banyumas.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan 70%; 2. Persentase kegiatan monitoring/pengawasan kegiatan pelaku usaha dan/atau kegiatan 40%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembinaan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kepada Masyarakat; 2. Fasilitasi kegiatan dalam rangka memperingati Hari-hari Lingkungan Hidup; 3. Pembinaan

dan Evaluasi Sekolah Adiwiyata; 4. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase pembangunan sumur resapan dan pengadaan alat biopori 15%; 2. Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan biomassa 20%.

Fokus kegiatan pada: 1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air; 3. Pemetaan Sumber Mata Air.

5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase dokumen lingkungan yang diterbitkan 100%; 2. Persentase sengketa lingkungan hidup yang ditangani 100%; 3. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kota lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten kota 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan; 2. Fasilitasi/Sosialisasi pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); 4. Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD); 5. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

6. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Purwokerto (1 Kegiatan).

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase sejumlah sampah di wilayah Purwokerto yang ditangani 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPKP Wilayah Purwokerto.

7. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Banyumas (1 Kegiatan).

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase sejumlah sampah di wilayah Banyumas yang ditangani 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPKP Wilayah Banyumas.

8. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Ajibarang (1 Kegiatan).

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase sejumlah sampah di wilayah Ajibarang yang ditangani 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPKP Wilayah Ajibarang.

9. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Wangon (1 Kegiatan).

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase sejumlah sampah di wilayah Wangon yang ditangani 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPKP Wilayah Wangon.

10. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Sumpiuh (1 Kegiatan).

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase sejumlah sampah di wilayah Sumpiuh yang ditangani 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPKP Wilayah Sumpiuh.

11. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Kembaran (1 Kegiatan).

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase sejumlah sampah di wilayah

Kembaran yang ditangani 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPKP Wilayah Kembaran.

12. Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA/ TPST (1 Kegiatan).

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase realisasi fisik program 100%; Persentase realisasi keuangan program 100%; 2.Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota 72%. Fokus kegiatan pada: 1. Operasional Pemeliharaan Kebersihan / Persampahan UPT TPST.

13. Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup (1 Kegiatan).

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020: 1. Persentase realisasi fisik program 100%; 2.Persentase realisasi keuangan program 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.

14. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

15. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (9 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2.Persentase capaian keuangan program 100%.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (6 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Adminduk (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kecamatan yang update database kependudukan 100%; 2. Persentase ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional SIAK Secara Terpadu.

2. Program Penataan Administrasi Peristiwa Kependudukan (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase pemohon Kartu Keluarga yang terlayani 100%; 2. Persentase pemohon KTP-Elektronik yang terlayani 100%; 3. Persentase pemohon Kartu Identitas Anak yang terlayani 100%; 4. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 87%; 5. Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 100%; 6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 97%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan; 2. Peningkatan Pelayanan Peristiwa Kependudukan; 3. Pengadaan Ribbon Printer; 4. Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK); 5. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil.

3. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase instansi pengguna data kependudukan yang melakukan perjanjian kerjasama 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penataan arsip dan dokumen pencatatan sipil; 2. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; 3. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

4. Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun

2020 yaitu: 1. Persentase pemohon akta kelahiran yang terlayani 100%; 2. Persentase pemohon akta kematian yang terlayani 100%; 3. Persentase pemohon akta perkawinan yang terlayani 100%; 4. Rasio bayi berakte kelahiran 93%; 5. Rasio pasangan berakte nikah 100%; 6. Cakupan penerbitan akta kelahiran 97%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil; 2. Pelayanan Perkawinan Pencatatan Sipil.

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

6. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (10 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2. Persentase capaian keuangan program 100%.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (6 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase desa yang terpelihara kelestarian adatnya 5%; 2. Persentase desa yang menghasilkan produk unggulan 60%; 3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM 17,94%; 4. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 17,94%; 5. Persentase LPM aktif 100%; 6. Persentase LPM berprestasi 0,30%; Persentase PKK aktif 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Pedesaan; 2. Fasilitasi Kegiatan PKK; 3. Fasilitasi Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Banyumas.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 0,12%; 2. Kelembagaan Kawasan Perdesaan (PKP) yang terbentuk 2 lembaga; 3. Persentase kader pemberdayaan masyarakat desa yang meningkat kapasitasnya 90%; 4. Raperda kawasan perdesaan yang tersusun 0%; 5. Kelulusan sarjana per desa 0%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Desa; 2. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pendampingan Masyarakat Desa; 3. Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif dan pembangunan kawasan pedesaan; 4. Fasilitasi dan Pelatihan pembentukan BKD/ BKAD pengelola dan pengembang potensi desa pendukung pembentukan kawasan perdesaan.

3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase desa yang membentuk Bumdes 5%; 2. Persentase Bumdes yang meningkat strataanya 7%; 3. Persentase Pasar Desa yang terbangun 14%; 4. Persentase petani tembakau/cengkih yang dapat meningkatkan kuantitas/kualitas produksi 50%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Pedesaan.

4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase desa yang meningkat prasarananya 2,66%; 2.Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 5,06%.

Fokus kegiatan pada: 1. Fasilitasi Kegiatan TMMD dan Bhakti TNI; 2. Pendampingan Bantuan Keuangan Gubernur Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan.

5. Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase desa yang telah mengembangkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat desa 0,66%; 2. Persentase desa yang telah mengembangkan/memanfaatkan Teknologi Tepat Guna untuk usaha perdesaan 0,66%; 3.Persentase kecamatan yang telah membentuk posyantek antar desa 8,70%; Persentase desa yang telah membentuk Posyantek desa 0,66%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Pedesaan; 2. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat; 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

6. Program Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase aparatur desa yang terbina 100%; 2.Persentase desa dengan administrasibaik 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemdes; 2. Pembinaan Administrasi Desa; 3.Pembinaan Pengelolaan Aset Desa dan Penyelesaian Aset Desa; 4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (2 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini lapangan KB 100%; 2. Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 100%; 3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB 25%; 4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 8%; 5. Rata-rata jumlah anak perkeluarga 2,50%; 6. Rasio Ketergantungan 49,0%.

Fokus kegiatan pada: 1. Fasilitasi kelompok masyarakat peduli KB; 2. Pengadaan Sarana, Pengolahan dan Pelaporan data/Informasi Program KKBPK; 3. Pelayanan KIE Program KKBPK; 4. Bantuan Operasional KB.

2. Program Pelayanan Keluarga Berencana (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Rasio Akseptor KB 70%; 2. Angka Kelahiran Total TFR 2,28%; 3. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun 5606 orang; 4. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 39%; 5. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi 70%; 6. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 69%; 7. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 59%; 8. Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 46,80%; 9. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB 81,31%; 10. Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun 76,39%; 11. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) 0,28%;

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan KRR; 2. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB; 3. Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok kegiatan KKBPK di Kecamatan; 4. Pengadaan Sarana mobilitas tim KB Keliling (DAK).

15. Perhubungan (8 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase berfungsinya fasilitas kelengkapan jalan dengan baik 90%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perlengkapan Jalan; 2. Pemeliharaan Halte Bus; 3. Operasi dan Pemeliharaan/Perbaikan LPJU; 4. Pendataan LPJU; 5. Retrovit dan Meterisasi LPJU;

2. Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (7 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Rasio ijin trayek 0,071%.

Fokus kegiatan pada: 1. Perencanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas; 2. Fasilitas Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 3. Operasional Perizinan Angkutan; 4. Fasilitas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran; 5. Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Banyumas; 6. Pembinaan Jasa Usaha Angkutan Umum; 7. Operasional Bus Sekolah

3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan 50%; 2. Persentase ketersediaan terminal 50%; 3. Persentase pemasangan rambu-rambu 43%; 4. Presentase

berfungsinya APJ yang terpasang dengan baik 90%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas; 2. Pengadaan dan Penggelaran Marka Jalan; 3. Pembangunan Halte Bus; 4. Pengembangan LPJU;

4. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas (14 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas 97%; 2. Persentase Jumlah Angkutan Umum (angkot dan angkutdes) yang mempunyai standar keselamatan sesuai UU LLAJ 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembinaan Keselamatan LLAJ; 2. Operasional Pengawasan, Pengamanan, Pengaturan, Penertiban dan Pengendalian LL (P5LL); 3. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor; 4. Operasional dan Pemeliharaan/Perawatan ATCS; 5. Penertiban Parkir.

5. Program Peningkatan Kelaikan Pengeoperasian Kendaraan Motor (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor 94%.

Fokus kegiatan pada: 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor; 2. Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor; 3. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;

6. Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Terminal Bus Purwokerto; 2. Operasioanal Terminal Tipe C (Terminal Wangon dan Ajibarang); 3. Operasioanal Perparkiran; 4. Operasional

Terminal Angkutan Pedesaan dan Perkotaan Di Bulupitu;
5.Operasional UPTD Sarana dan Prasarana.

7. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (1 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%; 3. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 50%.

8. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (10 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2.Persentase capaian keuangan program 100%.

16. Komunikasi dan Informatika (6 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan E-Government (4 Kegiatan)

Target informasi program pada tahun 2020 yaitu: 1.Persentase Perangkat Daerah yang mengelola sistem informasi secara baik 80%.

Fokus kegiatan pada: 1. Fasilitasi Pengembangan Aplikasi; 2.Pengembangan Ekosistem E-Government 3.Penyelenggaraan Tata Kelola E-Government; 4.Pengembangan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

2. Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi Dan Informatika (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase OPD yang terhubung Fiber Optic 36%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data; 2. Pemeliharaan Jaringan Internet dan Intranet, Web

Hosting dan Updating Data Website; 3. Pengembangan Data Center, NOC dan Data Recovery Center.

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase KIM yang aktif di Kabupaten Banyumas 51%.

Fokus kegiatan pada: 1.Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat dan Diseminasi Informasi; 2.Kegiatan Non Fisik dalam rangka TMMD.

4. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik (7 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik 100%; 2. Rasio Lapak aduan publik berbasis IT 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pengelolaan Opini dan Aduan; 2.Penyebarnyaan Informasi Layanan Publik; 3.Penyelenggaraan PPID; 4. Informasi Layanan Cukai; 5.Operasional Videotron; 6.Penerbitan Tabloid Pemda; 7.Pembuatan Konten Media Informasi;

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

6. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (9 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2.Persentase capaian keuangan program 100%.

17. Penanaman Modal (6 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Jumlah Investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas 3%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan investasi pemerintah dan dunia usaha; 2. Penyelenggaraan Promosi Investasi; 3. Fasilitasi Penanaman Modal; 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanaman Modal.

2. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP) 90%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Ekonomi; 2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Pembangunan; 3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesra dan Lingkungan Hidup.

3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Jumlah sektor potensi investasi yang tergali potensi peluang investasi 2%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penyusunan Buku Profil/Peluang Investasi Daerah; 2. Kajian Rencana Umum Penanaman Modal.

4. Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase penanganan pengaduan 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Sosialisasi Penanaman Modal;

2. Penyelesaian Aduan Perizinan; 3. Peningkatan Pelayanan Perizinan.

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

6. Program Peningkatan Pelayanan Perkantora (9 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2. Persentase capaian keuangan program 100%.

18. Kepemudaan dan Olah Raga (8 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan peran serta kepemudaan (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase organisasi pemuda yang aktif 56%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan; 2. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan; 3. Fasilitasi Pemuda; 4. Penyusunan Peraturan Kepemudaan.

2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase pertumbuhan wirausaha muda 20%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda.

3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase sarana prasarana kepemudaan yang tersedia 74,07%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemuda; 2. Pembangunan Gedung Pemuda (APBN).

4. Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Cakupan pelatih bersertifikasi level dasar 63%; 2. Cakupan pelatih bersertifikasi level 20%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan; 2. Penyusunan Peraturan Keolahragaan.

5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Cakupan pembinaan atlet muda/pelajar 3,75%; 2. Persentase cabang olahraga yang berprestasi tingkat provinsi dan nasional 50%; 3. Persentase peningkatan perolehan medali tingkat Provinsi dan Nasional 19,35%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga; 2. Pemassalan Olah raga bagi Mahasiswa dan Masyarakat; 3. Pengembangan Olahraga Rekreasi.

6. Program Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga (3 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase jumlah venue olahraga yang sesuai standart 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga antara lain Perencanaan Pengembangan GOR Satria (DED) dan Perencanaan

Pengembangan Stadion Mini (DED-DAK); 2. Operasional GOR Satria; 3. Pembangunan Lapangan Indoor Tennis (APBN).

7. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (1 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

8. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (9 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2. Persentase capaian keuangan program 100%.

19. Statistik (1 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase keterisian Daftar Informasi Publik 100%; 2. Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penyusunan Data dan Informasi Kabupaten Banyumas.

20. Persandian (1 Program)

1. Program Peningkatan Keamanan Informasi (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Standarisasi Keamanan Data ISO 27001 17 anek.

Fokus Kegiatan pada: 1. Penanganan Keamanan Informasi Audit Tik; 2. Pemeliharaan Peralatan Sandi Dan Telekomunikasi; 3. Pembangunan Dan Pemeliharaan Repeater Telekomunikasi; 4. Optimalisasi Pemungutan

21. Kebudayaan (3 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 72,73%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati 44%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala dan Museum; 2. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesenian; 3. Penyusunan Peraturan Kebudayaan; 4. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK).

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase jenis kesenian yang dilestarikan 41,51%; 2. Persentase jenis kesenian yang dipentaskan 41,51%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah; 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah; 3. Pembuatan Karya Cetak dan Karya Rekam Budaya Daerah; 4. Gelar Budaya; 5. Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya

22. Perpustakaan (1 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Layanan Perpustakaan 82,00%; 2. Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah 5,93%; 3. Persentase sejumlah perpustakaan terbina 26,38%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan; 2. Penyediaan, Pengolahan, Pemeliharaan sarana dan prasarana pustaka; 3. Layanan Perpustakaan Keliling; 4. Pengembangan Budaya Literasi dan Minat Baca.

23. Kearsipan (3 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator pada: 1. Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kabupaten Banyumas 40%; 2. Persentase unit kerja/OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar 14,5%;

Fokus kegiatan pada: 1. Pembenahan Kearsipan.

2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

3. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (9 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2. Persentase capaian keuangan program 100%.

5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan (6 Urusan Bidang)

24. Kelautan dan Perikanan (6 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Produksi Perikanan Budidaya 10,559 ton; 2. Persentase Kelompok Budidaya bersertifikat 20%; 3. Peningkatan jumlah kelompok yang naik kelas 10 kelompok.

Fokus Kegiatan pada: 1. Pengembangan Perikanan Budidaya; 2. Pengembangan Sarpras dan kawasan Perikanan; 3. Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ikan; 4. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten); 5. Pengadaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kelompok pengolah dan pemasaran Poklaksar hasil perikanan yang terbina 20%; 2. Persentase Kelompok Usaha Perikanan bersertifikat 20%; 3. Peningkatan angka konsumsi ikan 0,10 kg; 4. Produksi olahan hasil perikanan 177,1 ton.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Daya Saing Hasil Produksi Perikanan; 2. Peningkatan Gemarikan.

3. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Produksi Perikanan Tangkap 898 Ton; 2. Jumlah Perairan Umum yang terRestocking ikan 20 lokasi.

Fokus kegiatan pada: 1. Kegiatan Pengembangan Perikanan Perairan Umum.

4. Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase peningkatan produksi benih ikan 10.00%; 2. Produksi calon induk gurame 400 ekor.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar.

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (2 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

6. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (9 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2. Persentase capaian keuangan program 100%.

25. Pariwisata (3 Program)

Rencana program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase peningkatan promosi pariwisata 40%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata; 2. Penyelenggaraan Festival Pariwisata.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (7 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase tingkat layanan destinasi wisata 16,70%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata antara lain Perencanaan pembangunan Andhang Pangrenan-RTH/Open Space (DED-DAK); 2. Pengamanan Gabungan Obyek-Obyek Wisata; 3. Pengembangan daya tarik wisata antara lain

Perencanaan pengembangan wisata alam dan TPST di desa Wlahar (DED-DAK); 4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan (DAK); 5. Dukungan Operasional Non Rutin Fasilitas Pariwisata (DAK); 6.Operasional UPT Purwomas; 7.Operasional UPT Lokawisata Baturraden.

3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase peningkatan SDM kepariwisataan yang bersertifikasi 40%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata; 2. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata; 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif.

26. Pertanian (14 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kelompok tani terlatih yang menerapkan teknologi 20%.

Fokus kegiatan pada: 1. DAK Pertanian.

2. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Jumlah Produksi Hasil olahan produk pertanian 122%.

Fokus kegiatan pada 1. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian.

3. Program Perlindungan Tanaman (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun

2020 yaitu: 1. Persentase penurunan serangan OPT 2%.

Fokus kegiatan pada: 1. Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

4. Program Pengembangan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Produksi tanaman kelapa deres 55.388.89 Ton; 2. Produksi tanaman kelapa dalam 14.174.53 Ton; 3. Produksi tanaman kopi 146,34 Ton; 4. Produksi tanaman pala 41,62 Ton; 5. Produksi tanaman lada 60,55 Ton; 6. Produksi tanaman cengkeh 489,97 Ton; 7. Produksi tanaman tembakau Ton; 8. Rasio jumlah petani pengguna safety belt 0,25%.

Fokus kegiatan pada 1. Pengembangan Perkebunan Tanaman Tahunan; 2. Pengembangan Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah; 3. Peningkatan Sarana Produksi Perkebunan; 4. Peningkatan Kualitas Bahan Baku Komoditas Tembakau.

5. Program Pengembangan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Produksi tanaman Durian 9.879.020 Ton; Produksi tanaman Pisang 27.599.790 Ton; 2. Produksi tanaman Cabai 1.832.500 Ton; 3. Produksi tanaman Padi 425.000 Ton; 4. Produksi tanaman Jagung 13.400 Ton; 5. Produksi tanaman Kedelai 1.609.340 Ton; 6. Produktivitas tanaman Padi 5,89 Ton/ha; 7. Produktivitas tanaman Jagung 6,46 Ton/ha; Produktivitas tanaman Kedelai 1,38 Ton/ha.

Fokus kegiatan pada 1. Pengembangan Pertanian Hortikultura; 2. Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan.

6. Program Penyediaan Benih Pertanian (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Jumlah komoditas pertanian yang dibuat

perbenihan 3 jenis.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPT Balai Benih Pertanian.

7. Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase penyuluh pertanian terlatih 0%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian; 2. Penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan; 3. Pengembangan balai penyuluhan kecamatan; 4. Pengembangan kemampuan petani dan lembaga petani; 5. Pengembangan kelembagaan petani IPDMIP.

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase penurunan Angka kesakitan Ternak Besar 0,1%; 2. Persentase penurunan Angka kesakitan ternak Kambing dan Domba 0,1%; 3. Persentase penurunan Angka kesakitan ternak ayam 0,1%; 4. Persentase penurunan Angka kematian ternak Ternak Besar 0,03%; 5. Persentase penurunan Angka kematian ternak Kambing dan Domba 0,01%; 6. Persentase penurunan Angka kematian ternak ayam 0,05 %.

Fokus kegiatan pada: 1. Penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Kesehatan Veteriner; 2. Pembangunan /Rehabilitasi Sarana prasarana PUSKESWAN; 3. Pembangunan Rehabilitasi sarana prasarana RPH.

9. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Populasi Sapi Potong 15.224 Ekor; Populasi Sapi Perah 2.418 Ekor; 2. Populasi Kambing 175.734 Ekor; 3. Populasi Domba 16.115 Ekor; 4. Populasi Ayam Buras

1.118.125 Ekor; 5. Populasi ayam Pedaging 8.707.867 Ekor; 6. Populasi Ayam Petelur 14.813.940 Ekor; 7. Populasi Itik 150.713 Ekor.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembinaan dan Pengembangan Peternakan; 2. Pembangunan Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak; 3. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Produksi Peternakan.

10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kelompok ternak terlatih yang menerapkan teknologi 10%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna.

11. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kelompok pengolah dan pemasaran (Poklahsar) hasil peternakan yang terlatih 16%; 2. Persentase kelompok usaha peternakan berijin 10 %; 3. Produksi olahan hasil peternakan 520.210 Ton.

Fokus kegiatan pada: 1. Pengembangan Agribisnis Peternakan; 2. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

12. Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kenaikan ketersediaan bibit hijauan pakan ternak yang unggul 100 %; 2. Persentase kenaikan ketersediaan bibit sapi perah 100 %.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPT Perbibitan Ternak dan HPT.

13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Pelayanan Kesehatan Hewan 77 Nilai.

Fokus kegiatan pada: 1. Oprasional UPT Puskesmas.

14. Program Penyediaan Daging Ternak ASUH (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase pengawasan pemotongan ternak di RPH 100%.

Fokus kegiatan pada 1. Operasional UPT Rumah Potong Hewan.

27. Perdagangan (8 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri (7 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang diikuti dalam pameran 0,25%; 2. Persentase usaha perdagangan yang dibina dan diawasi 23%.

Fokus kegiatan pada: 1. Promosi Dagang dan Industri; 2. Pasar Murah; 3. Monitoring Harga; 4. Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 5. Pengawasan dan Pengendalian Pendaftaran Perijinan di Bidang Usaha Dagang; 6. Fasilitasi Pameran Tingkat Lokal Maupun Nasional (DBHCHT); 7. Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan Impor (DBHCHT).

2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang diijinkan 48%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki lima dan Asongan.

3. Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian

(3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang 98,66%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pelayanan Tera / Tera Ulang; 2. Pengadaan sarana dalam mendukung pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK); 3. Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

4. Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase pasar yang sudah direvitalisasi 56%; 2. Persentase penerimaan PAD dari retribusi pelayanan pasar 100%;

Fokus kegiatan pada: 1. Revitalisasi Pasar Tradisional antara lain Pasar induk-belakang terminal Bulupitu (Masterplan/DED-DAK); 2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional yang dikelola pemerintah Daerah; 3. Intensifikasi Pemungutan PAD.

5. Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I 100%; 2. Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I.

6. Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II 100%; 2. Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II.

7. Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat 100%; 2. Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat.

8. Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur 100%; 2. Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Operasional UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur.

28. Perindustrian (5 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina 1,20%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri; 2. Peningkatan Keterampilan Pelaku Usaha Ekonomi Produktif (DBHCHT); 3. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan Swasta; 4. Pembinaan Pengendalian Usaha Industri.

2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menguasai teknologi industri 0,19%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.

3. Program Penataan Struktur Industri (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai daya saing 5,20%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri antara lain perencanaan Jalan masuk kawasan Industri blok Seti (DED-DAK); 2. Fasilitasi Industri Ramah Lingkungan bagi IKM Batik di Kabupaten Banyumas (DBHCHT).

4. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (2 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

5. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (9 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2. Persentase capaian keuangan program 100%.

5.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan (7 urusan sub bidang)

29. Administrasi Pemerintahan (18 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantora (12 Kegiatan) (Setda)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase realisasi fisik program 100%; 2. Persentase realisasi keuangan program 100%.

2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan

Pelaporan Perangkat Daerah

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu : 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah.

3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan sesuai SOP 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2. Kajian Peraturan Perundangan Daerah.

4. Program Informasi Dan Layanan Hukum (6 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase produk hukum daerah yang disampaikan kepada masyarakat 100%; 2. Persentase kasus-kasus hukum yang ditangani 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Publikasi produk hukum daerah, pengadaan literatur hukum dan Pengelolaan JDIH; 2. Penyuluhan hukum dan HAM; 3. Penanganan perkara-perkara hukum; 4. Forum Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM; 5. Fasilitasi pelayanan bantuan hukum non litigasi; 6. Pembinaan keluarga sadar hukum.

5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Perangkat Daerah (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dilaksanakan secara efektif 40%; 2. Persentase perangkat daerah yang mempunyai pelayanan publik berkualitas 45%; 3. Persentase Kinerja Setda yang berkinerja baik 90%; 4. Hasil evaluasi SAKIP pada komponen Nilai Pelaporan Kinerja indeks.

Fokus kegiatan pada: 1. Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah; 2. Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; 3. Peningkatan Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi; 4. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan

peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan setda.

6. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan(3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media spanduk sambutan Bupati dan media relasi lainnya 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Analisis Media Dan Informasi; 2. Pengelolaan Data Kehumasan; 3. Kemitraan Dengan Media Massa Dan Penyelenggaraan Press Room.

7. Program Pelayanan Keprotokolan (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase terlaksananya penyelenggaraan acara kedinasan dan pelayanan tamu Bupati/WaBupati/Sekretaris Daerah yang sesuai dengan SOP 100%.

Fokus kegiatan pada 1. Pelayanan Keprotokolan.

8. Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu 100%; 2. Persentase jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunannya 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah; 2. Pengendalian infrastruktur.

9. Program Perumusan Kebijakan Dan Pembinaan Bidang Perekonomian (6 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitable 100%; 2. Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang sesuai ketentuan yang berlaku 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penyelenggaraan posko terpadu

Lebaran, Natal dan Tahun Baru; 2. Fasilitasi dan Koordinasi di bidang pertanian, pangan, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup serta pengendalian pupuk bersubsidi; 3.Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan di Bidang perhubungan, pariwisata, perindustrian perdagangan Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM; 4.Fasilitasi tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan TPKAD Kabupaten Banyumas; 5. Pembinaan BUMD dan lembaga keuangan mikro dan KUR; 6. Fasilitasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

10. Program Pembinaan Keagamaan (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi 100%; 2. Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Amaliyah Ramadhan; 2.Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan; 3. Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji; 4. Fasilitasi STQ, MTQ, MHQ dan pengembangan tilawatil Quran.

11. Program Kesra (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase jumlah fasilitasi dan layanan kebijakan daerah di bidang kesra yang sesuai ketentuan yang berlaku 100%; 2. Persentase perumusan kebijakan di bidang ocialkan kepemudaan dan olah raga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang difasilitasi 100%; 3.Persentase Perumusan kebijakan di bidang social kesehatan keluarga berencana penanganan bencana alam dan kecelakaankerja yang difasilitasi 100%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Fasilitasi dan perumusan kebijakan bidang sosial, kesehatan, keluarga berencana, kejadian bencana alam dan kecelakaan kerja; 2. Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penyelenggaraan PHBN serta Hari Jadi Kabupaten Banyumas.

12. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil 85%; 2. Persentase Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik 17,8%; 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengadaan barang jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyumas 3,05%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Layanan pengadaan barang dan jasa; 2. Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 3. Layanan pengadaan secara elektronik.

13. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan (6 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindak lanjuti 100%; 2. Penyampaian LKPJ LPPD yang tepat waktu 100%; 3. Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100%; 4. Persentase jumlah titik topo nemi yang diusulkan pembakuan nama ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 100%; 5. Persentase jumlah fasilitasi kegiatan otonomi daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Fasilitasi Pemerintahan Umum; 2. Penyusunan LKPJ Bupati Banyumas Dan LPPD Kabupaten Banyumas; 3. Fasilitasi Penamaan Rupa Bumi; 4. Fasilitasi Dan Perumusan Kebijakan Kerjasama Daerah; 5. Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dan Kelurahan; 6. Fasilitasi Otonomi Daerah.

14. Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi 75%.

Fokus kegiatan pada: 1. Profil, Dokumentasi dan Publikasi

kegiatan DPRD; 2. Fasilitasi Kerja Pimpinan DPRD.

15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD dan Sekretariat (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase materi bintek yang di aplikasikan dalam tuisi anggota dewan 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD dan Kesekretariatan.

16. Program Fasilitasi Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda 75%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Perencanaan Produk Hukum; 2.Fasilitasi Rapat-rapat Paripurna dan Badan Musyawarah; 3.Dokumentasi Produk Hukum; 3.Penyusunan Konsep Produk hukum.

17. Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Capaian penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu 85%; 2. Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah 85%; 3. Persentase rapat-rapat Dewan yang tepat waktu 90%; 4.Persentase pengaduan yang di tindak lanjuti 60%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Fasilitasi Komisi dan Badan Kehormatan; 2. Fasilitasi Tenaga Ahli, Hearing dan Reses DPRD; 3. Penyusunan dan Evaluasi Penganggaran.

18. Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan (117 kegiatan yaitu 6 kegiatan di 27 Kecamatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik

100%; 2. Persentase pembayaran PBB di kecamatan 100%; 3. Persentase Linmasterbina 100%; 4. Pembangunan sarana prasarana yang terbangun 100%; 5. Desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik 90%; 6. Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif 95 %.

Fokus Kegiatan pada: 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan (27 kecamatan); 2. Fasilitasi Intensifikasi PBB (27 kecamatan); 3. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Tim Penganggulan Kemiskinan Kecamatan (27 kecamatan); 4. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan (27 kecamatan); 5-34. Penyelenggaraan pelayanan Pemrintahan Kelurahan (30 Kelurahan); 35-64. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (30 Kelurahan); 65-87. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes (23 Kecamatan); 88-117. Pembangunan Sarana dan Prasarana (30 Kelurahan).

30. Perencanaan (8 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang perencanaan umum pembangunan daerah 100%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Analisis dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;.

2. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Prasarana Wilayah (7 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 91%; 2. Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang infrastruktur dan prasarana wilayah 100%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Analisis Perencanaan Raperda RTR Di Kab Banyumas; 2. Analisis Perencanaan Kebijakan Prasarana Dan Pengembangan Wilayah; 3. Perencanaan Dan Pengelolaan Program IPDMIP Kabupaten Banyumas; 4. Pendukung Program Pembangunan AMPL Kabupaten Banyumas; 5. Analisis Perencanaan Kebijakan Permukiman Wilayah; 6. Analisis Perencanaan Dan Pengelolaan Pamsimas (Panitia Kemitraan); 7. Perencanaan teknis penataan ruang.

3. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang ekonomi 100%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Analisis Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dan Pengembangan Dunia Usaha/Lembaga; 2. Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

4. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang pemerintahan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial 100%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial; 2. Analisis Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dan Pemberdayaan; 3. Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyumas (TKPKD).

5. Program Peningkatan Kualitas Dan Penyebarluasan Informasi Perencanaan (2 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase ketersediaan system informasi profil

daerah yang lengkap 77%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Penyusunan Profil Daerah/SIPD;
2. Pengembangan Kebijakan Sistem Perencanaan,
Monitoring dan Evaluasi.

6. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (1 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD 70 %.

Fokus Kegiatan pada: 1. Monitoring, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

7. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (3 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antaradokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

8. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (9 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan
2. Persentase capaian keuangan program 100%.

31. Keuangan (8 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pendapatan Daerah (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase realisasi jumlah pendapatan daerah yang meliputi PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang sah 100%; 2. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa 6,86%.

Fokus Kegiatan Pada: 1. Intensifikasi Pajak Daerah;

2. Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Non Pajak;
3. Penyelesaian Piutang Pajak Daerah; 4. Penatausahaan Pendapatan; 5. Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak Daerah.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase Wajib Pajak yang memiliki NPWPD 100%; 2. Persentase obyek pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pajak Daerah 100%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak; 2. Optimalisasi Pelayanan Wajib Pajak; 3. Penilaian Penetapan Keberatan Dan Pengurangan Pajak Daerah.

3. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Realisasi anggaran kas OPD sesuai target 90%; 2. Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu 100%; Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung 0,37%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kas Daerah; 2. Optimalisasi Pelayanan Belanja Langsung; 3. Optimalisasi Pelayanan Belanja Tidak Langsung; 4. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah.

4. Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah (8 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase perangkat daerah yang administrasi asetnya baik 80%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 3. Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Aset; 4. Administrasi Barang Daerah; 5. Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang.

5. Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase ketepatan waktu penetapan APBD 100%; 2. Persentase DPA OPD yang sesuai ketentuan yang berlaku. 100%; 3. Persentase belanja pendidikan (20%) 29%; Persentase belanja kesehatan (10%) 12%.

Fokus Kegiatan Pada: 1. Pendampingan Bantuan Hibah, Sosial Dan Bantuan Keuangan; 2. Penyusunan Perubahan KUA/PPAS/APBD Tahun 2020 dan KUA/PPAS /APBD Tahun 2020; 3. Penyusunan Standar Satuan Harga dan ASB; 4. Monitoring Pelaksanaan APBD; 5. Optimalisasi Penerimaan dan Belanja Transfer.

6. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase laporan keuangan OPD tepat waktu 80%.

Fokus Kegiatan pada: 1. Pengembangan Sistem dan Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyelenggaraan Akutansi; 3. Pembinaan Keuangan BLUD; 4. Pengadaan dan Pemeliharaan Jaringan Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

7. Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keuangan Daerah (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase tingkat kepatuhan pembayaran tagihan LPJU imbal jasa PD BPR BKK 100%; 2. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian LPJ keuangan 95%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penyediaan Jasa Listrik dan Jasa Transaksi Keuangan Daerah; 2. Fasilitas MPTP-TGR; 3. Fasilitas Pengelolaan Keuangan.

8. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (9 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2. Persentase capaian keuangan program 100%.

32. Kepegawaian (5 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kinerja Dan Disiplin ASN (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase ASN yang berkinerja baik 93%; 2. Persentase ASN yang memperoleh hukuman disiplin tingkat berat 0,0022 %.

Fokus Kegiatan pada: 1. Pembinaan dan Penyelesaian masalah PNS; 2. Penghargaan ASN; 3. Penilaian Kinerja ASN; 4. Bintek penyelesaian permasalahan Kepegawaian.

2. Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN (4 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai informasi 50%; 2. Persentase data ASN yang akurat 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pemrosesan Pensiun dan Penataan PNSD; 2. Pengadaan Pegawai; 3. Pengelolaan arsip CPNS Dan PNS; 4. Akurasi Data Pegawai.

3. Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan 91%.

Fokus kegiatan pada: 1. Pemetaan PNS Potensial Untuk menduduki JPTP dan jabatan administrasi; 2. Perumusan Konsep Pola Karir PNS; 3. Pemrosesan jabatan tinggi pratama dan jabatan administrasi; 4. Pemrosesan kenaikan pangkat; 5. Pemrosesan Jabatan Fungsional.

4. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

5. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (10 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2. Persentase capaian keuangan program 100%.

33. Pendidikan dan Pelatihan (1 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kompetensi ASN (3 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 0,06%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penyelenggaraan Diklat Aparatur Sipil Negara; 2. Pengembangan dan Peningkatan Mutu Diklat; 3. Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

34. Penelitian dan Pengembangan (2 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sistem Inovasi, Kreativitas dan Litbang (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah 20%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penguatan Sistem Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Kabupaten Banyumas (SABERINA).

2. Program Kajian Strategis Daerah (1 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase realisasi pelaksanaan kajian strategis daerah 77%.

Fokus kegiatan pada 1. Pendukung Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK.

35. Pengawasan (3 Program)

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah (5 Kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. ersentase LHP terbit tepat waktu 85%; 2.Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan 72%; 3. Kapabilitas APIP 3,2%; 4.Persentase tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan 78%.

Fokus kegiatan pada: 1. Peningkatan Sumber daya APIP; 2.Pelaksanaan Pengawasan Internal; 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; 4. Saber Pungli; 5. Survei Penilaian Integritas.

2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (1 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; 2. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

3. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran (9 kegiatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Persentase capaian fisik program 100%; dan 2.Persentase capaian keuangan program 100%.

36. Program Semua SKPD

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Perkantoran (9 Kegiatan di 28 SKPD dan 27 Kecamatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: Persentase realisasi keuangan program 100%; Persentase realisasi fisik program 100%.

Fokus kegiatan pada: 1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah; 2. Penyediaan bahan logistic kantor Perangkat Daerah; 3. Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan Perangkat Daerah; 4. Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah; 5. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah; 6. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah; 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah; 8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah; 9. Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah.

2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah (3 kegiatan di 28 SKPD dan 27 Kecamatan)

Untuk mencapai target indikator program pada tahun 2020 yaitu: 1. Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%.

Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah 100%; Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah 100%; Fokus kegiatan pada 1. Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Perangkat Daerah.

5.2. Kerangka Pendanaan Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020

Rincian Perubahan pendanaan indikatif untuk tiap program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Tabel 5.2.
Rekapitulasi Jumlah Anggaran Per Program Prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
1	Pendidikan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	5.700.000.000	Pendidikan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	5.545.700.000	Pendidikan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	5.176.163.142	DINDIK
		Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	45	13.620.000.000	Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	52	9.425.514.000	Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	52	7.601.829.590	DINDIK
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat	15	138.502.000.000	Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat	15	142.532.730.588	Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat	19	140.149.873.536	DINDIK
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat	87	70.870.000.000	Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat	87	59.372.299.000	Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat	87	56.539.036.450	DINDIK
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	39.683.000.000	Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	38.650.000.000	Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	37.668.863.000	DINDIK
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	8	4.040.000.000	Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	8	4.471.109.840	Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	9	729.182.802	DINDIK

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan	27	3.510.000.000	Pendidikan	Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan	27	2.241.250.000	Pendidikan	Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan	27	2.241.250.000	DINDIK
		Sub Total	197	275.925.000.000			204	262.238.603.428			209	250.106.198.520	
2	Kesehatan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.440.000.000	Kesehatan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.471.150.000	Kesehatan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.433.900.000	DINKES
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	175.000.000	Kesehatan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	200.000.000	Kesehatan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	66.130.250	DINKES
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5	7.623.974.000	Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5	5.054.318.000	Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6	4.951.231.350	DINKES
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	45	31.185.364.000	Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	48	26.012.848.000	Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	48	26.012.848.000	DINKES
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	2	1.200.000.000	Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	2	337.500.000	Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	2	201.880.500	DINKES
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3	2.330.000.000	Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3	4.312.130.000	Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	3	4.149.240.000	DINKES
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	5	6.070.000.000	Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	5	6.501.993.000	Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	6	6.191.295.040	DINKES

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	4	37.806.000.000	Kesehatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	4	23.689.561.000	Kesehatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	4	16.650.789.937	DINKES
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	10	30.310.000.000	Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	10	40.158.386.000	Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	10	38.780.971.000	DINKES, RSUD AJIBARANG, RSUD BANYUMAS
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	3	15.867.474.000	Kesehatan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	3	15.392.547.000	Kesehatan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	3	15.290.237.000	DINKES
		Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat	1	650.000.000	Kesehatan	Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat	1	187.500.000	Kesehatan	Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat	1	95.476.000	DINKES
		Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	4	4.060.000.000	Kesehatan	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	4	350.000.000	Kesehatan	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	4	148.906.800	DINKES
		Program Pelayanan Kesehatan	65	152.009.188.000	Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan	65	165.714.509.000	Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan	65	171.832.232.000	DINKES
		Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan	1	300.000.000	Kesehatan	Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan	1	200.000.000	Kesehatan	Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan	1	194.000.000	DINKES

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	1	252.300.000.000	Kesehatan	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	1	259.300.000.000	Kesehatan	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD	1	259.300.000.000	RSUD AIRBARANG, RSUD BANYUMAS
		Sub Total	160	544.327.000.000			164	549.892.442.000			164	546.299.137.877	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	22	8.150.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	22	7.317.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	22	4.972.863.615	DPU
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	625.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	275.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	76.331.200	DPU
		Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan	11	209.029.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan	11	138.651.557.150	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan	11	109.194.553.122	DPU
		Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong	1	5.625.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong	1	2.200.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong	1	1.585.000.000	DPU
		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	13	21.450.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	13	8.632.825.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	13	6.093.359.879	DPU
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	16	30.336.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	16	28.384.776.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	16	21.985.013.752	DPU

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	3	2.400.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	3	1.235.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	3	545.000	DPU
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	3	1.300.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	3	1.620.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	3	776.450.000	DPU
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1	875.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1	500.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1	38.589.160	DPU
		Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan	3	20.250.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan	3	16.230.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan	3	14.730.000.000	DPU
		Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan	9	10.000.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan	9	2.990.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan	9	1.852.994.547	DPU
		Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	2	17.600.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	2	22.750.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	2	5.366.544.000	DPU
		Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	2	4.400.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	2	1.100.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	2	450.800.000	DPU
		Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung	3	860.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung	3	600.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung	3	183.688.794	DPU

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Unsur/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Unsur/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Unsur/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	5	88.500.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	5	36.908.600.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	5	10.615.266.804	DPU
		Program Peningkatan Perencanaan Teknis	1	3.000.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Perencanaan Teknis	1	3.233.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Perencanaan Teknis	1	2.020.248.431	DPU
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	3	1.250.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	3	500.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	3	377.841.150	DINPERKIM
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase	2	1.500.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase	2	1.095.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase	2	650.000.000	DPU
		Sub Total	102	427.150.000.000			102	274.322.758.150			102	180.970.089.454	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	2.325.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	2.136.400.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	1.772.689.905	DINPERKIM
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	175.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	118.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	56.098.590	DINPERKIM
		Program Pengembangan Perumahan	6	5.160.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	6	675.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	6	292.134.729	DINPERKIM
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	13	42.550.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	13	36.692.896.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	13	35.578.466.091	DINPERKIM

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Usuran/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Usuran/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Usuran/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2	350.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2	100.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	2	3.331.890	DINPERKIM
		Program Pengembangan Kawasan Permukiman	6	26.570.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	6	11.484.620.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	6	7.320.641.229	DINPERKIM
		Sub Total	38	77.130.000.000			38	51.206.916.000			38	45.023.362.434	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	11	5.095.000.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	11	5.320.987.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	11	5.057.823.781	BPBD, KESBANGPOL, SATPOL PP
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	85.000.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	30.000.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	1.915.000	BPBD, KESBANGPOL, SATPOL PP
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	4	908.200.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	4	1.206.250.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	4	954.899.000	KESBANGPOL
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	6	1.371.700.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	6	1.976.028.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	6	1.213.218.294	SATPOL PP
		Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	7	850.000.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	8	708.500.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	8	188.037.000	KESBANGPOL

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urutan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urutan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urutan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3	948.000.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3	976.460.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3	751.666.093	SATPOL PP
		Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum	5	1.310.000.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum	5	460.100.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum	5	261.000.709	SATPOL PP
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	2	230.000.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	2	180.000.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	2	87.160.000	KESBANGPOL
		Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	4	2.400.000.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	4	2.235.050.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	4	1.694.498.141	SATPOL PP
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	14	5.050.000.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	14	2.907.500.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	14	3.094.748.401	BPBD
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	1	500.000.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	1	206.250.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	1	700.000	BPBD
		Sub Total	58	18.747.900.000			73	16.207.125.000			73	13.315.666.419	
6	Sosial	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.896.400.000	Sosial	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.775.000.000	Sosial	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.517.650.737	DINSOSPERMASDES

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	35.000.000	Sosial	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	22.500.000	Sosial	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	5.459.500	DINSOSPERMASDES
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil	7	1.700.000.000	Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil	7	1.156.250.000	Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil	7	483.311.024	DINSOSPERMASDES
		Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	26	2.092.000.000	Sosial	Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	26	2.886.250.000	Sosial	Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial	26	1.173.359.262	DINSOSPERMASDES
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	7	1.065.000.000	Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	7	1.207.500.000	Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	7	738.193.150	DINSOSPERMASDES
		Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	3	250.000.000	Sosial	Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	3	120.000.000	Sosial	Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	3	98.000.000	DINSOSPERMASDES
		Sub Total	53	8.038.400.000			53	8.167.500.000			53	5.015.973.673	
7	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	3.401.192.000	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	3.997.975.000	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	3.368.915.543	DINAKERKOP UKM
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	100.000.000	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	100.000.000	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	53.649.000	DINAKERKOP UKM

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	10	1.772.638.000	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	10	1.427.500.000	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	10	1.100.803.000	DINAKERKOP UKM
		Program Peningkatan Kesempatan kerja	7	325.000.000	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan kerja	7	327.500.000	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan kerja	7	113.463.576	DINAKERKOP UKM
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3	200.000.000	Tenaga Kerja	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3	97.500.000	Tenaga Kerja	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3	72.656.457	DINAKERKOP UKM
		Program Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	5	400.000.000	Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	5	161.025.000	Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	5	15.750.876	DINAKERKOP UKM
		Sub Total	36	6.198.830.000			36	6.111.500.000			36	4.725.237.452	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender	3	350.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender	3	181.250.000	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender	3	78.916.089	DPPKBP3A
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	4	650.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	4	590.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	4	240.797.088	DPPKBP3A
		Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	2	500.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	2	150.000.000	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	2	48.049.000	DPPKBP3A

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Sub Total	9	1.500.000.000			9	921.250.000			9	367.762.177	
9	Pangan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	3.378.320.000	Pangan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	3.015.920.000	Pangan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.541.694.200	DINPERTAN KP
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	275.032.000	Pangan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	150.000.000	Pangan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	19.652.600	DINPERTAN KP
		Program Peningkatan Pola Pangan Harapan	3	550.000.000	Pangan	Program Peningkatan Pola Pangan Harapan	3	595.000.000	Pangan	Program Peningkatan Pola Pangan Harapan	3	446.810.010	DINPERTAN KP
		Program Penguatan Cadangan Pangan	4	990.000.000	Pangan	Program Penguatan Cadangan Pangan	4	595.000.000	Pangan	Program Penguatan Cadangan Pangan	4	505.331.825	DINPERTAN KP
		Sub Total	18	5.193.352.000			18	4.355.920.000			18	3.513.488.635	
10	Pertanahan	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2	6.300.000.000	Pertanahan	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2	200.000.000	Pertanahan	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2	101.286.600	DINPERKIM
		Sub Total	2	6.300.000.000			2	200.000.000			2	101.286.600	
11	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.900.000.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	3.295.966.350	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	3.105.546.350	DLH
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	30.000.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	-	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	-	DLH

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7	32.384.500.000	Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7	10.894.137.000	Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7	6.121.095.783	DLH
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	1.000.000.000	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	287.500.000	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	80.925.400	DLH
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	5	600.000.000	Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	5	321.476.277	Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	5	32.757.000	DLH
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	8	800.000.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	8	531.195.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	8	224.555.300	DLH
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3	9.073.000.000	Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3	3.876.000.000	Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3	2.532.873.616	DLH
		Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	1	2.810.000.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	1	564.800.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup	1	555.900.000	DLH
		Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA / TPST	1	1.200.000.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA / TPST	1	1.618.850.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA / TPST	1	1.616.850.000	DLH

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Purwokerto	1	4.000.000.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Purwokerto	1	7.201.112.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Purwokerto	1	7.201.112.000	DLH
		Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Banyumas	1	900.000.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Banyumas	1	777.013.250	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Banyumas	1	777.013.250	DLH
		Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Ajlbarang	1	990.000.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Ajlbarang	1	1.078.965.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Ajlbarang	1	1.078.965.000	DLH
		Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Wanggon	1	990.000.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Wanggon	1	941.840.900	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Wanggon	1	941.840.900	DLH
		Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Sumpuluh	1	990.000.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Sumpuluh	1	877.880.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Sumpuluh	1	877.880.000	DLH
		Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Kembaran	1	990.000.000	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Kembaran	1	875.727.500	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Kembaran	1	875.727.500	DLH
		Sub Total	47	59.657.500.000			47	35.140.463.277			47	26.023.942.099	

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	3.843.662.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	3.580.400.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	3.312.144.732	DINDUKCAPIL; DPPKBP3A
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	80.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	65.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	4.455.500	DINDUKCAPIL; DPPKBP3A
		Program Penataan Administrasi Peristiwa Kependudukan	6	6.346.938.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Peristiwa Kependudukan	6	7.698.836.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Peristiwa Kependudukan	6	6.916.333.429	DINDUKCAPIL
		Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	2	375.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	2	345.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	2	229.809.800	DINDUKCAPIL
		Program Pengelolaan Informasi Adminduk	2	950.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Adminduk	2	900.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Adminduk	2	606.244.940	DINDUKCAPIL
		Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	3	150.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	3	165.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	3	29.761.770	DINDUKCAPIL
		Sub Total	25	11.745.600.000			25	12.754.236.000			25	11.098.750.171	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5	1.450.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5	1.212.500.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	5	492.887.600	DINSOSPERMASDES

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	2	500.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	2	200.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	2	55.934.000	DINSOSPERMASDES
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	2	750.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	2	625.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	2	151.326.400	DINSOSPERMASDES
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1		DINSOSPERMASDES
		Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa	3	225.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa	3	180.644.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa	3	4.880.500	DINSOSPERMASDES
		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	4	575.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	4	417.500.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	4	71.342.000	DINSOSPERMASDES
		Program Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa	4	400.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa	4	537.500.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa	4	133.822.815	DINSOSPERMASDES
					Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa	2	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa	2	-	
		Sub Total	23	4.000.000.000			23	3.273.144.000			23	910.193.315	

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Keluarga Berencana	6	1.350.000.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Keluarga Berencana	6	577.102.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Keluarga Berencana	7	827.166.000	DPPKBP3A
		Program Peningkatan Daya jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	5	7.972.800.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Daya jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	5	7.768.118.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Daya jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	5	7.627.505.000	DPPKBP3A
		Sub Total	11	9.322.800.000			11	8.745.220.000			12	8.454.671.000	
15	Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	3.700.000.000	Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	3.475.500.000	Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	2.867.619.000	DINHUB
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	225.000.000	Perhubungan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	150.000.000	Perhubungan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	190.748.730	DINHUB
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	7	2.550.000.000	Perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	7	2.535.000.000	Perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	7	1.506.136.450	DINHUB
		Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	9	1.000.000.000	Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	9	1.100.000.000	Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	9	509.499.630	DINHUB
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	14	9.500.000.000	Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	14	8.452.225.000	Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	14	7.086.494.180	DINHUB

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	14	3.425.000.000	Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	14	2.582.000.000	Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	14	1.337.895.754	DINHUB
		Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	4	6.700.000.000	Perhubungan	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	4	6.175.000.000	Perhubungan	Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	4	1.087.284.280	DINHUB
		Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	5	1.400.000.000	Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	5	1.325.000.000	Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	5	1.246.501.000	DINHUB
		Sub Total	64	28.500.000.000			64	25.794.725.000			64	15.832.179.024	
16	Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	1.850.000.000	Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	1.938.000.000	Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	1.656.061.000	DINKOMINFO
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	100.000.000	Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	49.500.000	Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	14.758.570	DINKOMINFO
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3	425.000.000	Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3	200.000.000	Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3	46.401.250	DINKOMINFO
		Program Pengembangan E Government	4	1.375.000.000	Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan E Government	4	1.400.000.000	Komunikasi dan Informatika	Program Pengembangan E Government	4	911.303.559	DINKOMINFO

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	3	2.650.000.000	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	3	6.596.500.000	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	3	6.542.045.708	DINKOMINFO
		Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	9	1.750.000.000	Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	9	2.812.500.000	Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	9	2.946.277.000	DINKOMINFO
		Sub Total	29	8.150.000.000			29	12.996.500.000			29	12.116.847.087	
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3	350.000.000	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3	595.500.000	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3	495.594.701	DINAKERKOP UKM
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7	1.300.000.000	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7	1.032.500.000	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7	291.643.763	DINAKERKOP UKM
		Sub Total	10	1.650.000.000			10	1.628.000.000			10	787.238.464	
18	Penanaman Modal	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	3.910.000.000	Penanaman Modal	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	4.085.000.000	Penanaman Modal	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	3.836.355.176	DPMPTSP
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	100.000.000	Penanaman Modal	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	28.500.000	Penanaman Modal	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	5.174.400	DPMPTSP
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	3	280.000.000	Penanaman Modal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	3	188.500.000	Penanaman Modal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	3	30.626.000	DPMPTSP

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1	100.000.000	Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1	75.000.000	Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1	36.570.000	DPMPTSP
		Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	3	300.000.000	Penanaman Modal	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	3	100.000.000	Penanaman Modal	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	3	11.062.100	DPMPTSP
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3	362.400.000	Penanaman Modal	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3	147.500.000	Penanaman Modal	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3	113.600.000	DPMPTSP
		Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan	3	450.000.000	Penanaman Modal	Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan	3	147.500.000	Penanaman Modal	Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan	3	39.743.150	DPMPTSP
		Sub Total	24	5.502.400.000			24	4.772.000.000			24	4.073.130.826	
19	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.150.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.885.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.694.184.413	DINPORABUDPAR
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	80.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	50.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	4.140.000	DINPORABUDPAR
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	4	950.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	4	810.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	4	181.113.460	DINPORABUDPAR

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1	50.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1		Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	1		DINPORABUDPAR
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2	1.525.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2	425.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	2	111.422.000	DINPORABUDPAR
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	2	150.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	2	75.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	2	-	DINPORABUDPAR
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3	1.200.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3	1.200.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3	776.385.371	DINPORABUDPAR
		Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	3	3.700.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	3	1.815.000.000	Kepemudaan dan Olah Raga	Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	3	1.347.433.729	DINPORABUDPAR
		Sub Total	25	9.805.000.000			25	7.260.000.000			25	5.114.678.973	
20	Statistik	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	3	250.000.000	Statistik	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	3	75.000.000	Statistik	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	3	13.810.000	DINKOMINFO
		Sub Total	3	250.000.000			3	75.000.000			3	13.810.000	
21	Persandian	Program Peningkatan Keamanan Informasi	4	450.000.000	Persandian	Program Peningkatan Keamanan Informasi	4	348.500.000	Persandian	Program Peningkatan Keamanan Informasi	4	299.385.380	DINKOMINFO
		Sub Total	4	450.000.000			4	348.500.000			4	299.385.380	

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
22	Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	350.000.000	Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	65.000.000	Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	1	-	DINPORABUDPAR
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	4	2.050.000.000	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	4	1.405.000.000	Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	4	1.088.456.307	DINPORABUDPAR
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5	1.750.000.000	Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5	1.705.000.000	Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5	937.483.582	DINPORABUDPAR
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	4	790.000.000	Perpustakaan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	4	640.000.000	Perpustakaan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	4	286.134.960	DINARPUSDA
		Sub Total	14	4.940.000.000			14	3.815.000.000			14	2.312.074.849	
23	Kearsipan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	3.851.000.000	Kearsipan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	3.230.000.000	Kearsipan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.990.100.000	DINARPUSDA
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	40.000.000	Kearsipan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	30.000.000	Kearsipan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	4.719.345	DINARPUSDA
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	3	415.000.000	Kearsipan	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	3	350.000.000	Kearsipan	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	3	147.795.170	DINARPUSDA
		Sub Total	13	4.306.000.000			15	3.662.500.000			15	3.207.611.015	
24	Kelautan dan perikanan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.592.840.000	Kelautan dan perikanan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.430.185.000	Kelautan dan perikanan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.265.342.212	DINKANNAK

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	445.000.000	Kelautan dan perikanan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	425.000.000	Kelautan dan perikanan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	258.921.500	DINKANNAK
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	5	750.000.000	Kelautan dan perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	5	994.982.000	Kelautan dan perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	5	270.191.780	DINKANNAK
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	3	450.000.000	Kelautan dan perikanan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	3	260.000.000	Kelautan dan perikanan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	3	43.566.550	DINKANNAK
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	1	150.000.000	Kelautan dan perikanan	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	1	75.000.000	Kelautan dan perikanan	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	1	11.376.150	DINKANNAK
		Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar	1	200.000.000	Kelautan dan perikanan	Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar	1	350.000.000	Kelautan dan perikanan	Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar	1	350.000.000	DINKANNAK
		Sub Total	21	4.587.840.000			21	4.535.167.000			21	3.199.398.192	
25	Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2	1.250.000.000	Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2	1.100.000.000	Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2	85.491.673	DINPORABUDPAR
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7	4.043.642.331	Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7	6.240.870.000	Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7	3.405.095.620	DINPORABUDPAR
		Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3	850.000.000	Pariwisata	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3	420.000.000	Pariwisata	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3	78.156.074	DINPORABUDPAR
		Sub Total	12	6.143.642.331			12	7.760.870.000			12	3.568.743.367	

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
26	Pertanian	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	3	11.123.454.000	Pertanian	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	3	6.595.000.000	Pertanian	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	3	2.736.596.000	DINPERTAN KP
		Program Perlindungan Tanaman	1	385.000.000	Pertanian	Program Perlindungan Tanaman	1	123.750.000	Pertanian	Program Perlindungan Tanaman	1	93.523.900	DINPERTAN KP
		Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	4	2.620.000.000	Pertanian	Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	4	1.225.000.000	Pertanian	Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	4	555.810.500	DINPERTAN KP
		Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian	1	550.000.000	Pertanian	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian	1	300.000.000	Pertanian	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian	1	77.399.130	DINPERTAN KP
		Program Penyediaan Benih Pertanian	1	500.000.000	Pertanian	Program Penyediaan Benih Pertanian	1	300.000.000	Pertanian	Program Penyediaan Benih Pertanian	1	291.000.000	DINPERTAN KP
		Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2	4.790.000.000	Pertanian	Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2	640.000.000	Pertanian	Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2	131.647.058	DINPERTAN KP
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	3	200.000.000	Pertanian	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	3	90.000.000	Pertanian	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	3	34.047.560	DINKANNAK
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3	1.900.000.000	Pertanian	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3	2.016.580.000	Pertanian	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3	959.922.300	DINKANNAK

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan	2	330.000.000	Pertanian	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan	2	200.000.000	Pertanian	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan	2	44.993.000	DINKANNAK
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1	100.000.000	Pertanian	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1	100.000.000	Pertanian	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1	215.500.000	DINKANNAK
		Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT	1	477.000.000	Pertanian	Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT	1	400.000.000	Pertanian	Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT	1	400.000.000	DINKANNAK
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	1	200.000.000	Pertanian	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	1	286.000.000	Pertanian	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	1	233.000.000	DINKANNAK
		Program Penyediaan Daging Ternak ASUH	1	200.000.000	Pertanian	Program Penyediaan Daging Ternak ASUH	1	200.000.000	Pertanian	Program Penyediaan Daging Ternak ASUH	1	200.000.000	DINKANNAK
		Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian	5	2.648.194.000	Pertanian	Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian	5	1.263.553.000	Pertanian	Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian	5	907.443.450	DINPERTAN KP
		Sub Total	29	26.023.648.000			29	13.739.883.000			29	6.880.882.898	
27	Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	8	509.600.000	Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	8	560.000.000	Perdagangan	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	8	355.878.550	DINPERINDAG

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1	640.515.000	Perdagangan	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1	86.400.000	Perdagangan	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1	78.529.650	DINPERINDAG
		Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	4	8.262.985.000	Perdagangan	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	4	7.661.383.000	Perdagangan	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	4	9.671.101.000	DINPERINDAG
		Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian	3	1.594.680.000	Perdagangan	Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian	3	485.000.000	Perdagangan	Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian	3	60.759.257	DINPERINDAG
		Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I	1	442.000.000	Perdagangan	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I	1	470.000.000	Perdagangan	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I	1	470.000.000	DINPERINDAG
		Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II	1	436.800.000	Perdagangan	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II	1	381.000.000	Perdagangan	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II	1	381.000.000	DINPERINDAG
		Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat	1	416.000.000	Perdagangan	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat	1	440.000.000	Perdagangan	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat	1	440.000.000	DINPERINDAG
		Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur	1	395.075.000	Perdagangan	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur	1	460.000.000	Perdagangan	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur	1	460.000.000	DINPERINDAG
		Sub Total	20	12.797.655.000			20	10.543.783.000			20	11.917.268.557	

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
28	perindustrian	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	4.862.838.000	perindustrian	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	6.981.828.000	perindustrian	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	6.548.204.261	DINPERINDAG
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	182.000.000	perindustrian	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	150.000.000	perindustrian	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	14.323.888	DINPERINDAG
		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4	672.007.000	perindustrian	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4	730.074.669	perindustrian	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4	528.345.835	DINPERINDAG
		Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	52.000.000	perindustrian	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	110.000.000	perindustrian	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	44.339.188	DINPERINDAG
		Penataan Struktur Industri	2	312.000.000	perindustrian	Penataan Struktur Industri	2	545.000.000	perindustrian	Penataan Struktur Industri	2	509.045.370	DINPERINDAG
		Sub Total	18	6.080.845.000			18	8.516.902.669			18	7.745.262.542	
29	transmigrasi	Program Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi	2	250.000.000	transmigrasi	Program Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi	2	147.500.000	transmigrasi	Program Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi	2	-	DINAKERKOP UKM
		Sub Total	2	250.000.000			2	147.500.000			2	-	
30	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	12	38.298.732.686	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	12	32.645.139.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	12	29.709.569.377	27 KECAMATAN
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	978.550.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	426.304.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	356.654.475	27 KECAMATAN

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD dan Sekretariat	1	4.700.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD dan Sekretariat	1	5.313.200.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD dan Sekretariat	1	3.763.200.000	SETWAN
		Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan	2	1.300.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan	2	900.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan	2	750.000.000	SETWAN
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2	525.600.000	Administrasi Pemerintahan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2	350.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2	87.151.926	SETDA
		Program Informasi dan Layanan Hukum	6	972.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Informasi dan Layanan Hukum	6	1.075.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Informasi dan Layanan Hukum	6	418.113.900	SETDA
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	4	810.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	4	1.150.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	4	927.946.975	SETDA
		Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	3	1.311.750.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	3	875.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan	3	540.470.002	SETDA
		Program Pelayanan Keprotokolan	1	554.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Keprotokolan	1	225.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Pelayanan Keprotokolan	1	144.682.500	SETDA
		Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2	315.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2	435.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2	81.493.468	SETDA

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian	6	965.250.000	Administrasi Pemerintahan	Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian	6	518.750.000	Administrasi Pemerintahan	Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian	6	248.419.351	SETDA
		Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	967.500.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	442.500.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	160.656.567	SETDA
		Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa	2	135.000.000									SETDA
		Program Pembinaan Keagamaan	4	2.970.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan Keagamaan	4	2.884.998.000	Administrasi Pemerintahan	Program Pembinaan Keagamaan	4	1.207.156.412	SETDA
		Program Kesra	2	555.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Kesra	2	1.150.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Kesra	2	753.141.084	SETDA
		Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	1.855.900.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	2.025.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3	1.036.240.470	SETDA
		Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan	118	64.022.588.000	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan	119	45.374.982.100	Administrasi Pemerintahan	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan	119	45.374.982.100	27 KECAMATAN
		Program Fasilitas Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum	4	9.550.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Fasilitas Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum	4	9.572.600.000	Administrasi Pemerintahan	Program Fasilitas Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum	4	6.922.600.000	SETWAN

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Fasilitas Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	3	14.100.000.000	Administrasi Pemerintahan	Program Fasilitas Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	3	11.493.800.000	Administrasi Pemerintahan	Program Fasilitas Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	3	8.293.800.000	SETWAN
		Sub Total	182	144.826.870.686			181	116.857.273.100			181	100.776.288.607	
31	Perencanaan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.423.540.000	Perencanaan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.767.000.000	Perencanaan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.163.436.000	BAPPEDA LITBANG
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3	860.000.000	Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3	318.000.000	Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3	500.910.000	BAPPEDA LITBANG
		Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	1	400.000.000	Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	1	550.000.000	Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	1	354.762.720	BAPPEDA LITBANG
		Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3	450.000.000	Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3	425.000.000	Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3	156.004.700	BAPPEDA LITBANG
		Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan	3	500.000.000	Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan	3	824.927.800	Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan	3	158.137.500	BAPPEDA LITBANG

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Sosial				Sosial				Sosial			
		Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	7	1.425.000.000	Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	7	1.350.000.000	Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	7	820.328.000	BAPPEDA LITBANG
		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	100.000.000	Perencanaan	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	100.000.000	Perencanaan	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	67.544.500	BAPPEDA LITBANG
		Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Perencanaan	2	150.000.000	Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Perencanaan	2	150.000.000	Perencanaan	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Perencanaan	2	24.300.000	BAPPEDA LITBANG
		Sub Total	29	6.308.540.000			29	6.484.927.800			29	4.245.423.420	
32	Keuangan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	2.540.000.000	Keuangan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	3.248.286.000	Keuangan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	3.118.442.788	BAPENDA/SKAD

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	55.000.000	Keuangan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	175.000.000	Keuangan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	96.793.000	BAPENDA;BKAD
		Program Peningkatan Pendapatan Daerah	5	1.507.000.000	Keuangan	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	5	2.286.476.850	Keuangan	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	5	950.652.920	BKAD
		Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah	5	5.472.600.000	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah	8	8.390.859.250	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah	8	7.198.914.594	BKAD
		Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	577.500.000	Keuangan	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	1.182.079.250	Keuangan	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	464.040.000	BKAD
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3	780.000.000	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3	1.583.459.150	Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3	312.083.000	BKAD
		Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran	5	1.220.000.000	Keuangan	Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran	6	964.702.000	Keuangan	Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran	6	777.973.055	BKAD
		Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah	4	850.000.000	Keuangan	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah	4	10.443.399.500	Keuangan	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah	4	796.917.675	BKAD
		Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keuangan Daerah	3	29.154.000.000	Keuangan	Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keuangan Daerah	3	28.115.000.000	Keuangan	Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keuangan Daerah	3	28.893.000.000	BKAD
		Sub Total	39	42.256.100.000			59	56.389.262.000			59	42.608.817.032	

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
33	Kepegawalan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	2.473.500.000	Kepegawalan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	2.286.255.340	Kepegawalan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	10	2.097.116.487	BKPSDM
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	10.000.000	Kepegawalan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	-	Kepegawalan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	-	BKPSDM
		Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	4	780.000.000	Kepegawalan	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	4	217.750.000	Kepegawalan	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	4	143.660.000	BKPSDM
		Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN	4	980.000.000	Kepegawalan	Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN	4	2.428.788.900	Kepegawalan	Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN	4	2.106.737.500	BKPSDM
		Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN	5	720.000.000	Kepegawalan	Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN	5	890.246.760	Kepegawalan	Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN	5	733.652.801	BKPSDM
		Sub Total	24	4.963.500.000			24	5.823.041.000			24	5.081.166.788	
34	Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Kompetensi ASN	3	6.460.000.000	Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Kompetensi ASN	3	4.197.215.000	Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Kompetensi ASN	3	365.976.659	BKPSDM
		Sub Total	3	6.460.000.000			3	4.197.215.000			3	365.976.659	
35	Penelitian dan Pengembangan	Program Kajian Strategis Daerah	1	350.000.000	Penelitian dan Pengembangan	Program Kajian Strategis Daerah	1	500.000.000	Penelitian dan Pengembangan	Program Kajian Strategis Daerah	1	227.102.169	BAPPEDA LITBANG
		Program Pengembangan Sistem Inovasi, Kreativitas dan Litbang	2	250.000.000	Penelitian dan Pengembangan	Program Pengembangan Sistem Inovasi, Kreativitas dan Litbang	2	146.330.000	Penelitian dan Pengembangan	Program Pengembangan Sistem Inovasi, Kreativitas dan Litbang	2	34.020.000	BAPPEDA LITBANG
		Sub Total	3	600.000.000	-	-	3	646.330.000	-	-	3	261.122.169	

No.	RKPD				APBD				Perubahan				SKPD
	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran RKPD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran APBD	Urusan/ Bidang	Program	Jumlah Keg	Anggaran Perubahan	
36	Pengawasan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	1.455.000.000	Pengawasan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	1.863.800.000	Pengawasan	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	9	1.639.098.000	INSPEKTORAT
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	17.480.000	Pengawasan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	15.000.000	Pengawasan	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	1	9.330.000	INSPEKTORAT
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	5	3.050.000.000	Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	5	3.211.200.000	Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	5	2.736.461.990	INSPEKTORAT
		Sub Total	15	4.562.480.000			15	5.090.000.000			15	4.384.889.990	
		TOTAL	1360	784.650.903.017		TOTAL	1411	1.534.568.957.424		TOTAL	1417	1.330.652.959.165	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka penanganan dan pemulihan terhadap pandemi Covid-19 yang memberikan dampak luas pada kehidupan masyarakat sehingga mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas. Kondisi tersebut berdampak terhadap kesesuaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 termasuk terhadap keuangan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian pada RKPD Tahun 2020 sebagai dokumen rencana pembangunan daerah yang digunakan sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, terutama pada fokus prioritas daerah, fokus program dan kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19.

Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2020 antara lain memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta perubahan rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya. Dokumen perubahan RKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020. Selanjutnya KUPA-PPAS Tahun 2020 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Implementasi program pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020 akan tercapai apabila didukung komitmen semua pihak. Agar masyarakat Banyumas pulih kembali dan semakin siap untuk memulai kebiasaan dan kehidupan normal baru.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASEKBANG	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA SANPEDAUTBANG	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN